



AccUSI

Journal Of Accounting USI

E - ISSN : 2620 - 5815
Volume : Vol 4 Edisi 1 Mei 2022

- Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Lapraan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018 - 2020) 1 - 15
Irwan Marulitua Ambarita, Djuli Sjafei Purba, Mahaitin H Sinaga
- Analisis Perbandingan Piutang Tidak Tertagih Pada CU. Bina Kasih Kota Pematangsiantar (Periode 2019 - 2020) Selama Pandemi Covid - 19 16 - 30
Mario Manullang, Djuli Sjafei Purba, Vitryani Tarigan
- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar 31 - 39
Gustia Laras Ayu, Eva Sriwiyanti, Elfina OP Damanik
- Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi 40 - 54
Nur Hafidzah, Eva Sriwiyanti, Mahaitin H Sinaga
- Penerapan Metode Activity Based Costing System Untuk Meningkatkan Keakuratan Penghitungan Profitabilitas Pada Hotel Sapadia Pematangsiantar 55 - 79
Jesika M Simamora, Rosintan Sipayung, Fandra Dikhi Januardani
- Peran Motivasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar 80 - 109
Rio Juanda Putra Saragih, Artur Simanjuntak, Yosephine N Sembiring, DIMITA H P Purba

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SIMALUNGUN
PEMATANG SIANTAR**



EDITORIAL TEAM

JURNAL ILMIAH ACCUSI

Editor In Chief	Eva Sriwiyanti, SE, Ak, CA, M.Si - Universitas Simalungun
Editor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wico J Tarigan SE, M.Si - Universitas Simalungun 2. Adat Muli Peranginangin - STIE Surya Nusantara
Section Editor	Djuli Purba SE, M.Si
Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elfina O.P Damanik, SE, MM – Universitas Simalungun 2. Vitryani Tarigan SE, M.Si - Universitas Simalungun 3. Marintan Saragih SE, M.Si - Universitas Simalungun 4. Mahaitin Sinaga SE,Ak,MM,M.Si,CA - Universitas Simalungun 5. Arthik Davianti - Universitas Kristen Satya Wacana 6. Sri Imaningati - STIE Bank BPD Jateng 7. Desman Serius Nazara - STIE Pembangunan Nasional 8. Dedi Suhendro - AMIK Tunas Bangsa

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Jl. Sisingamangaraja No. 1 P.Siantar

Email : prodiakuntansi.usi@gmail.com

PRODI AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SIMALUNGUN

PEMATANGSIANTAR

2022

JURNAL ILMIAH ACCUSI
(JURNAL OF ACCOUNTING USI)
E - ISSN 2620 – 5815

VOLUME 4, NO 1 MEI 2022

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Lapraan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018 - 2020)).....	1 - 15
<i>Irwan Marulitua Ambarita, Djuli Sjafei Purba, Mahaitin H Sinaga</i>	
Analisis Perbandingan Piutang Tidak Tertagih Pada CU. Bina Kasih Kota Pematangsiantar (Periode 2019 - 2020) Selama Pandemi Covid – 19	16 - 30
<i>Mario Manullang, Djuli Sjafei Purba, Vitryani Tarigan</i>	
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar	31 - 39
<i>Gustia Laras Ayu, Eva Sriwiyanti, Elfina OP Damanik</i>	
Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi	40 – 54
<i>Nur Hafidzah, Eva Sriwiyanti, Mahaitin H Sinaga</i>	
Penerapan Metode Activity Based Costing System Untuk Meningkatkan Keakuratan Penghitungan Profitabilitas Pada Hotel Sapadia Pematangsiantar .	55 – 79
<i>Jesika M Simamora, Rosintan Sipayung, Fandra Dikhi Januardani</i>	
Peran Motivasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar	
<i>Rio Juanda Putra Saragih, Artur Simanjuntak, Yosephine N Sembiring, DIMITA H P Purba</i>	80 - 109

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2020)

¹Irwan Marulitua Ambarita, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : irwanmarulituaambarita@gmail.com

²Djuli Sjafei Purba, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : djulipurba484@gmail.com

³Mahaitin H Sinaga, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : sinagamahaitin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jumlah perusahaan dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan dengan tahun pengamatan selama 3 tahun berturut-turut sehingga diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 data keuangan perusahaan pertambangan dari tahun 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis pada tingkat signifikansi 5% dan uji determinasi. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda memperoleh persamaan regresi $Y = -0,279 + 1,995X_1 + 0,009X_2 - 0,233X_3 + e$. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa likuiditas dan leverage keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan leverage keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, likuiditas dan leverage sebesar 14,7% dan sisanya 85,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

Kata Kunci : Ketepatan Waktu, Laporan Keuangan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of profitability, liquidity and leverage on the timeliness of submitting financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The type of research used in this research is quantitative research. The number of companies in this study were 49 companies with 3 consecutive years of observation so that the number of samples in this study was 30 financial data mining companies from 2018-2020 listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique used was purposive sampling method. The analytical tools used are descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing at a significance level of 5% and determination test. The results of the test with multiple linear regression obtained the regression equation $Y = -0.279 + 1.995X_1 + 0.009X_2 - 0.233X_3 + e$. The results of partial hypothesis testing indicate that profitability has a significant effect on the timeliness of submitting financial statements. However, there is no evidence that liquidity and financial leverage have a significant effect on the timeliness of submitting financial statements. Meanwhile, the results of



simultaneous hypothesis testing show that profitability, liquidity and financial leverage have no significant effect on the timeliness of submitting financial statements. The results of the determination test indicate that the timeliness of financial statement submission is influenced by the profitability, liquidity and leverage variables by 14.7% and the remaining 85.3% is influenced by other variables that have not been studied in this study.

Keyword : Punctuality, Financial statements, Profitability, Liquidity, Financial leverage

I. Pendahuluan

Laporan keuangan adalah salah satu media yang berguna bagi instansi untuk memberikan informasi serta pengukuran informasi sumber daya dan kinerja didalam perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal seperti investor, pihak manajemen perusahaan, kreditor serta pengguna laporan keuangan yang lain. Ketepatan waktu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk digunakan sebagai penyajian suatu informasi yang relevan. Laporan keuangan akan mempunyai manfaat jika disampaikan dengan tepat waktu kepada para pemakainya untuk mengambil suatu keputusan. Dalam proses suatu pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan akan bersikap hati-hati karena sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan predikat baik yang akan menimbulkan rasa kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang berisi perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa Efek Indonesia yang meliputi laporan keuangan interim dan laporan keuangan auditan tahunan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan interim paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan dan batas waktu penyampaian laporan keuangan audit tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan auditan tahunan

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 peraturan nomor I-H tentang Sanksi. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang terdiri atas (Bursa Efek Indonesia, n.d.):

1. Peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
2. Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan;
3. Peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas;
4. Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan

Selain sanksi administrasi dan denda oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bapepam juga dapat memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Dalam lampirannya disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertakan dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan.



Namun peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan *go public* yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep 346/BL/2011 tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan *go public* yang efeknya tercatat di bursa efek Indonesia dan bursa efek di negara lain. Dalam lampirannya disebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun tetap saja masih banyak perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Pada fenomena tahun 2020 Bursa Efek Indonesia menetapkan denda sebesar Rp50.000.000 kepada emiten karena terlambat menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2020. Sanksi yang sama juga diberikan kepada emiten yang belum membayar denda Rp50.000.000, karena terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia, terdapat 801 perusahaan tercatat yang terdiri dari 673 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2020 dan 8 perusahaan tercatat yang berbeda tahun bukunya sampai dengan 31 Maret 2020. Selain itu, ada 121 efek dan perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan lapkeu interim per 31 Maret 2020. Hingga 29 Agustus 2020, masih terdapat 30 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan lapkeu interim per 31 Maret 2020 dan yang belum membayar denda Rp50.000.000,- karena terlambat menyampaikan lapkeu. Bursa Efek Indonesia telah mengenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,- kepada 30 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2020

Adapun, penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir 31 Maret 2020 yang tidak diaudit selambat-lambatnya pada 30 Juni 2020. Sedangkan untuk laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik harus menyampaikan sebelum 3 Agustus 2020. Untuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik harus segera menyerahkan laporan ke Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Agustus 2020 (Berita Bisnis dalam Bisnis.com ,08 September 2020)

Penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public* ini, telah banyak dilakukan dan berkembang baik di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, opini akuntan publik, umur perusahaan, dll

Dian Mutiara, Tatas Ridho Nugroho, M. Bahril Imiddviq (2020) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan profitabilitas sebagai variabel moderisasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). Penelitian ini menguji ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variabel moderasi (M. Bahril Ilmiddaviq, Dian Mutiara Angesti Putri, 2020). Hasil penelitiannya yaitu:

1. Pengujian parsial, *size* berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, sedangkan *liquidty* dan *leverage* keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Pengujian simultan, *size liquidity* dan *leverage* keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Hasil pengujian moderasi dengan uji interaksi (MRA) memberikan hasil profitabilitas tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage* keuangan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan

Afriyeni, Doni Marlius melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, kepemilikan publik, reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan likuiditas, *leverage* keuangan, dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Afriyeni & Marlius, 2012).

Bukti-bukti empiris ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun demikian juga dapat diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)

II. Kajian Pustaka

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut KBBI patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang agar lebih mematuhi suatu peraturan yang telah diberlakukan, begitu juga dengan perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena hal itu merupakan sangat bermanfaat bagi pengguna-pengguna laporan keuangan baik pihak intern maupun ekstern (Afriyeni & Marlius, 2012)

2.2. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Perusahaan memiliki banyak kerjasama, misalnya kerjasama antara pegawai perusahaan dengan para manajernya dan kerjasama pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kedua jenis kerjasama ini sering kali dibuat berdasarkan angka laba bersih. Oleh karena itu, teori keagenan dapat mempunyai implikasi terhadap akuntansi (Silaban, 2017).

2.3 Teori Sinyal

Menurut (Ni Luh De Erik Trisnawati, 2021) teori sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi dan data yang akurat merupakan unsur penting karena informasi tersebut menggambarkan tentang keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan.

2.4 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 1 Tahun 2007, laporan keuangan adalah hasil dari proses sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya (Attarie, 2016). Secara umum laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Sujarweni, 2020).

2.5 Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat karena adanya kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Beberapa pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yaitu investor dan pemegang saham, manajer, karyawan, *supplier* dan kreditur, pelanggan dan pemerintah (Murhadi, 2013)

2.6 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia

Sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang berisi tentang perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa Efek Indonesia yang meliputi laporan keuangan interim dan laporan keuangan audit tahunan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan interim paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan



keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit atas laporan keuangan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan audit tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan auditan tahunan.

2.7 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan cara yang dilakukan untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan dan rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan harus memenuhi delapan syarat yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan, mempunyai daya uji, netral, tepat waktu, dan lengkap (Sujarweni, 2020). Laporan keuangan yang disusun secara baik, sesuai aturan, serta disampaikan kepada publik dengan tepat waktu dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi suatu perusahaan (Danaatmaja & Suzan, 2018)

2.8 Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2018), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

2.9 Likuiditas

Menurut (Kasmir, 2018), rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek. Penilaian ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu;

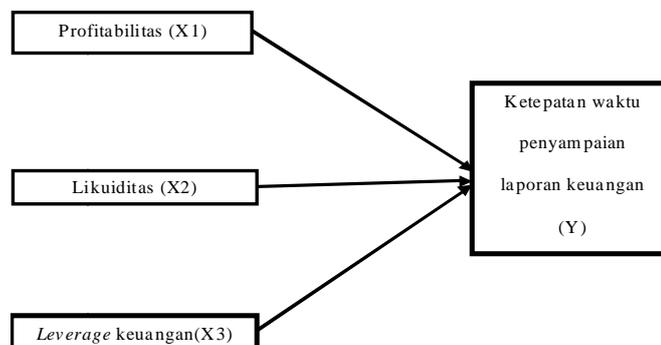
2.10 Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2018).

2.11 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Afriyeni, Doni Marluis (2012) yang membedakan yaitu metode penelitian, sehingga faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi dalam penelitian ini disesuaikan dengan yang digunakan dalam Afriyeni, Doni Marluis (2012). Faktor-faktor tersebut adalah profitabilitas, likuiditas dan leverage keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara profitabilitas, likuiditas, leverage keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran



2.12 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan (Purba, Elidawaty, 2021). Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho : Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3) berpengaruh tidak signifikan secara parsial maupun simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y).

Ha : Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3) berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y)

III. Metode Penelitian

3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Sebagai contoh pengaruh iklan terhadap motivasi belanja. Motivasi belanja digunakan sebagai variabel dependen. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu ini diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan audit. Perusahaan dikategorikan tepat waktu jika laporan keuangan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Variabel ini merupakan variabel 2 alternatif di mana tepat waktu dan tidak tepat waktu memiliki sifat dummy variabel sehingga pengukuran yang dilakukan hanyalah memberikan nilai 1 pada perusahaan yang tepat waktu dan memberikan nilai 0 pada perusahaan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini menggunakan skala nominal

3.2 Variabel Independen

Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas yaitu variabel yang akan memengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya dan timbulnya variabel dependen (terikat). Apabila variabel independen berubah, maka variabel dependen juga ikut berubah. Variabel independen merupakan variabel yang faktornya dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diteliti. Jika diartikan lebih lanjut, variabel independen disebut juga sebagai perubah bebas dan sering dikatakan dengan variabel bebas, stimulus, faktor, *treatment*, *predictor*, input atau *antecedent* (Purba, Elidawaty, 2021).

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sejumlah objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya untuk menjadi sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode waktu 2018, 2019, 2020. Digunakan tiga periode ini dengan pertimbangan yaitu untuk melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang diperoleh dari suatu populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sujarweni, 2015). Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 2015)

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah :

a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018, 2019, 2020;

- b. Perusahaan pertambangan yang memiliki data laporan keuangan tahunan untuk periode 2018, 2019, 2020;
- c. Perusahaan pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan untuk periode 2018, 2019, 2020

Alasan menggunakan mata uang rupiah karena mata uang asing sifatnya berubah-ubah dalam waktu tertentu selain itu juga untuk mempermudah penelitian sehingga menggunakan mata uang rupiah. Apabila menggunakan mata uang rupiah dan dolar secara bersamaan akan menyebabkan data tidak normal sehingga perlu mengeluarkan data ekstrem

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan untuk tahun 2018-2020

3.4.2 Sumber data

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi (Sujarweni, 2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut meliputi data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2018-2020

3.5 Metode Analisis Data

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menafsir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi, etc), distribusi, dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus probabilitas apapun. *Descriptive* juga diartikan untuk menggambarkan tentang suatu variabel seperti jumlah rata - rata, standar deviasi, varian, nilai terendah maupun nilai t tertinggi (Suliyanto, 2018)

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan kriteria - kriteria yang sudah ditetapkan pada sebelumnya maka diperoleh beberapa data keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1
Kriteria Sampel

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Akumulasi
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2018, 2019, 2020;	-	41
2	Perusahaan pertambangan yang memiliki data laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk periode 2018,2019,2020	(14)	27
3	Perusahaan pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah untuk periode 2018, 2019, 2020 secara berturut-turut.	17	10
Jumlah Perusahaan Sampel			10
Tahun Pengamatan			3
Jumlah Sampel Total Selama Periode Penelitian			30



(Sumber: Data sekunder, data diolah)

Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yaitu 10 perusahaan selama 3 tahun sehingga ada 30 data keuangan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan leverage keuangan. Variabel - variabel ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dengan variabel tersebut diperoleh faktor - faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 2
Daftar Perusahaan

No	KODE	Nama Perusahaan
1	PTBA	Bukit Asam Tbk
2	ELSA	Elnusa Tbk
3	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
4	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
5	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk
6	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk
7	SURE	Super Energy Tbk
8	ANTM	Aneka Tambang Tbk
9	TINS	Timah Tbk
10	MITI	Mitra Investindo Tbk

(Sumber: Data sekunder, data diolah)

Tabel 3
Distribusi Perusahaan yang Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu

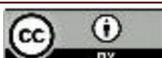
Kategori Perusahaan	Tahun Penelitian					
	2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	jumlah	%
Tepat Waktu	35	85 %	22	54 %	22	54 %
Tidak Tepat Waktu	6	15 %	19	46 %	19	46 %
Total	41	100 %	41	100,00%	41	100,00%

(Sumber: Data sekunder, data diolah)

a. Statistik Deskriptif

Tabel 4
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketepatan Waktu	30	,00	1,00	,7333	,44978
Profitabilitas	30	-2,82	,50	,1283	,57407



Likuiditas	30	,11	7,03	1,4910	1,24939
Leverage	30	-5,91	6,36	,8259	2,03615
Valid N (listwise)	30				

(Sumber: Output SPSSv21)

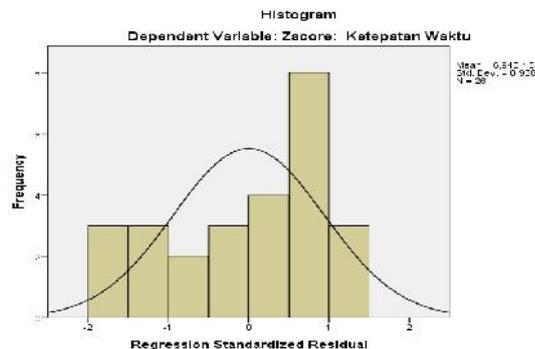
Nilai minimum variabel profitabilitas yang diproksikan dengan GPM (*Gross Profit Margin*) adalah -2,82 yaitu pada Mitra Investindo Tbk 2020 dan nilai maksimum adalah 0,50 yaitu pada Cita Mineral Investindo Tbk tahun 2020. Rata - rata variabel profitabilitas (ROA) adalah 0,1283 dengan standar deviasi 0,57407. Hal ini menunjukkan bahwa rata - rata keberhasilan perusahaan sampel dalam menghasilkan laba bersih adalah sebesar 12,83%.

Nilai minimum variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR (*Current Ratio*) adalah 0.11 yaitu pada Super Energy Tbk tahun 2018 dan nilai maksimum adalah 7,03 yaitu pada Super Energy Tbk tahun 2020. Rata-rata variabel likuiditas (CR) adalah 0,8259 dengan standar deviasi 1,24939. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah sebesar 124,93, artinya setiap Rp1 kewajiban dijamin oleh Rp124,93 aset lancar. Nilai minimum variabel leverage yang diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) adalah -5,91 yaitu pada Mitra Investindo Tbk 2019 dan nilai maksimum adalah 6,36 yaitu pada Super Energy Tbk tahun 2019. Rata - rata variabel leverage keuangan adalah 0,8259 dengan standar deviasi 2,03615.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada hasil uji normalitas dengan histogram jika bentuk grafik tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, maka menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal. Pada gambar histogram dibawah ini menunjukkan pola berdistribusi normal.



Gambar 2 Uji Normalitas (Histogram)

(Sumber: Output SPSSv21)

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Zscore: Profitabilitas	,997	1,003
	Zscore: Likuiditas	,756	1,322
	Zscore: Leverage	,757	1,322

a. Dependent Variable: Zscore: Ketepatan Waktu

(Sumber: Output SPSSv21)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan untuk variabel GPM, CR dan DER tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10, sedangkan untuk nilai tolerance 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil perhitungan tabel dibawah ini menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, di mana tidak ada nilai t-hitung yang signifikan atau nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05 (p 0,05). Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,955	,066		14,479	,000
1 Zscore: Profitabilitas	-1,298	,226	-,770	-5,758	,000
Zscore: Likuiditas	-,086	,113	-,117	-,763	,453
Zscore: Leverage	-,125	,149	-,129	-,840	,410

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Output SPSSv21)

4. Uji Autokoreasi

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,499 ^a	,249	,147	,92901356	1,777

a. Predictors: (Constant), Zscore: Leverage, Zscore: Profitabilitas, Zscore: Likuiditas

b. Dependent Variable: Zscore: Ketepatan Waktu

(Sumber: Output SPSSv21)

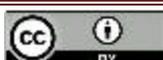
Nilai d = 1,777 hasil dari Durbin Watson ini masuk dalam Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.



	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,279	,223		-1,253	,223
Zscore:	1,995	,762	,485	2,620	,016
1 Profitabilitas					
Zscore: Likuiditas	,009	,381	,005	,023	,982
Zscore: Leverage	-,233	,502	-,098	-,464	,647

a. Dependent Variable: Zscore: Ketepatan Waktu
(Sumber: Output SPSS v 21)

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta (nilai) sebesar -0.279, dan untuk profitabilitas yang diproksikan dengan GPM (*Gross Profit Margin*) nilai sebesar 1,995 sementara likuiditas yang diproksikan dengan CR (*Current Ratio*) nilai sebesar 0,009 serta untuk leverage keuangan yang diproksikan dengan DER (*Total Debt to Equity Ratio*) nilai sebesar - 0,233 sehingga dapat diperoleh persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,279 + 1,995X_1 + 0,009X_2 - 0,233X_3 + e$$

d. Uji Hipotesis

1. Uji t

Dari tabel 8 Regresi Linier Berganda di atas dapat dijelaskan hasil Uji t sebagai berikut:

- H1 menyatakan profitabilitas yang diproksikan dengan gross profit margin berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan analisis data pengujian H1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,620. Probabilitas kesalahan sebesar $0,016 < 0,05$. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima maka angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap ketepatan waktu. Artinya jika profitabilitas semakin tinggi maka ketepatan waktu semakin tinggi. Jika digunakan dengan kriteria ($df = n - k$) kedua maka diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $2,620 > 2,05183$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - H2 menyatakan likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan analisis data pengujian H2 menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,023 Probabilitas kesalahan sebesar $0,982 > 0,05$. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak maka angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya jika likuiditas semakin tinggi maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan semakin menurun. Jika digunakan dengan kriteria ($df = n - k$) kedua maka diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $0,023 < 2,05183$ H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - H3 menyatakan leverage keuangan yang diproksikan dengan *total debt to equity ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan analisis data pengujian H3 menunjukkan t_{hitung} sebesar -0,464 probabilitas kesalahan sebesar $0,647 > 0,05$. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak maka angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya jika leverage semakin meningkat maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan semakin menurun. Jika digunakan dengan kriteria ($df = n - k$) kedua maka diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $-0,464 < 2,05183$ H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Uji Simultan (F)

Hasil analisis secara simultan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9
Uji F

ANOVA^a



Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6,299	3	2,100	2,433	,092 ^b
Residual	18,987	22	,863		
Total	25,286	25			

a. Dependent Variable: Zscore: Ketepatan Waktu

b. Predictors: (Constant), Zscore: Leverage, Zscore: Profitabilitas, Zscore: Likuiditas

(Sumber: Output SPSSv21)

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 22$ maka tabel didapat $F(3;22) = 3,05$. Dalam perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , yaitu $2,433 < 3,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah $0,092 < 0,05$ maka keputusannya juga H_0 diterima berarti hal ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas (GPM), likuiditas (CR), leverage keuangan (DER) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Data di atas menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,147, hal ini berarti bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh ketiga variabel yaitu profitabilitas (GPM), likuiditas (CR), dan leverage keuangan (DER) sebesar 14,7% sisanya yaitu 85,3% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,499 ^a	,249	,147	,92901356	1,777

a. Predictors: (Constant), Zscore: Leverage, Zscore: Profitabilitas, Zscore: Likuiditas

b. Dependent Variable: Zscore: Ketepatan Waktu

(Sumber: Output SPSSv21)

Data di atas menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,147, hal ini berarti bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh ketiga variabel yaitu profitabilitas (GPM), likuiditas (CR), dan leverage keuangan (DER) sebesar 14,7% sisanya yaitu 85,3% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian

V. Kesimpulan Dan Ss

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)” sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka di dapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,279 + 1,995X_1 + 0,009X_2 - 0,233X_3 + e$$

2. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena $t_{hitung} (2,620) > t_{tabel} (2,05183)$. Dengan meningkatnya profitabilitas atau laba

maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia akan semakin meningkat.

3. Secara parsial likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena t_{hitung} (0,023) t_{tabel} (2,05183). Dengan meningkatnya likuiditas atau aset lancar maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia akan semakin menurun.
4. Secara parsial leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena t_{hitung} (-0,464) t_{tabel} (2,05183). Dengan meningkatnya leverage atau liabilitas maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia akan semakin menurun.
5. Secara simultan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena F_{hitung} (2,433) F_{tabel} (3,05).
6. Pengujian koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, likuiditas dan leverage dalam menjelaskan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI adalah sebesar 14,7% dan sisanya 85,3% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

5.2 Saran

Agar ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bisa lebih meningkat maka perusahaan perlu meningkatkan nilai profit. Dari hasil penelitian ini yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah profitabilitas, sehingga saran saya:

1. Investor

Saran bagi investor ketika membeli saham harus memperhatikan nilai profitabilitas yang ada dilaporan keuangan karena jika profitnya bagus maka perusahaan akan semakin tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya.

2. Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan supaya menambah periode tahun penelitian yang lebih panjang, menambah variabel independen dan menggunakan metode penelitian yang beda dari peneliti-peneliti sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Afriyeni, & Marlius, Doni. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. 1–17. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rv4qf>
- Attarie, Prima Noermaning. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(3), 1–15.
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). *Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 peraturan nomor I-H tentang Sanksi*. 1–6.
- Danaatmaja, Andhika Ramadhan, & Suzan, Leny. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 803–810.
- Damanik, E., Simanjuntak, W. T., Martina, S., & Sriwiyanti, E. (2021). PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY (DER) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pakan Ternak Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 - 2018). *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(1). <https://doi.org/10.36985/accusi.v3i1.485>
- Dewi, Ni Putu Yohana, Novitasari, Ni Luh Gde, & Dewi, Ni Luh Putu Sandrya Dewi. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Leverage



- Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Kharisma*, 3(2), 244–254
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lisa Andriani, Djuli Sjafei Purba, & Damanik, E. O. P. (2021). Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Priode 2018 - 2020). *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 124–131. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.131>
- M. Bahril Ilmiddaviq, Dian Mutiara Angesti Putri, Tatas Ridho Nugroho. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)*.
- Mahaitin H Sinaga. (2020). PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(2), 96 – 113. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i2.352>
- Marathani, Dhea Tiza. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20
- Murhadi, Werner R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham* (Adnan Rasyid, ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ni Luh De Erik Trisnawati. (2021). *Enterprise Risk Management Disclosure Siklus Hidup Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan (Pertama)*. Bali: NILACAKRA.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2011). Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011. *Kep-346/BL/2011*, (Juli), 1–4.
- Prastyo, Ardian Dwi. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Opini Akuntan Publik dan Rasio Aktivitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, xx(xx), 1–13
- PRASTYO, ARDIAN DWI, & Purwanto, Nanang. (2016). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–13
- Purba, Elidawaty, Dkk. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi* (Cetakan 1; Ronal Watrionthos, ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Silaban, Adanan. (2017). *Teori Akuntansi* (Kedua). Medan: Universitas HKBP Nomensen Medan.
- Susilo, Tri Pujadi, & Fatmayeti, Sri. (2017). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie*, 23
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Pertama; Aditya Cristian, ed.). Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Tarigan, W. J., & Djuli Sjafei Purba. (2020). PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(2), 81–95. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i2.354>
- Veronika, A., Nangoi, G., & ... (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Opini Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Riset Akuntansi Dan Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/25611%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/viewFile/25611/25265>

Veronika, Angelia, Nangoi, Grace, & Tinangon, Jantje. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Opini Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL,” 10(2), 136. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25611>

**ANALISIS PERBANDINGAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA CU. BINA
KASIH KOTA PEMATANGSIANTAR
(PERIODE 2019 - 2020) SELAMA PANDEMI COVID-19**

¹Mario Manullang, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : mariosimanullang7@gmail.com

²Djuli Sjafei Purba, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : djulipurba484@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com

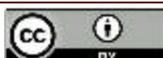
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya piutang tidak tertagih pada CU. Bina Kasih selama masa pandemi covid 19 periode 2019-2020. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan lapangan. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2019 - 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Faktor internal antara lain adalah lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, hal ini terjadi pada tahun 2020 dengan total piutang sebesar Rp. 567.000.00,- lemahnya sistem informasi total piutang pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak Rp. 4.780.000.00,-, kredit pihak kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga kelayakan kredit yang diberikan CU. diberikan dan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembenaan kredit tidak tepat diberikan koperasi kepada pihak debitur dengan total piutang pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 2.970.000.00,-. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor internal di CU. Bina Kasih di dominan pada indikator lemahnya sistem informasi di CU. Bina Kasih. Faktor eksternal yaitu penurunan kegiatan ekonorni karena nilai tingkat bunga naik sehingga debitur tidak mampu membayar cicilan pada hal ini piutang tidak tertagih untuk CU Bina Kasih tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 12.228.000.00,-. Kegagalan usaha debitur untuk hal ini jumlah piutang tidak tertagih CU. Bina Kasih pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.164.000.00,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.090.000.00,-, dan adanya debitur mengalami musibah terjadi dikarenakan pihak debitur tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga mengakibatkan debitur tidak bisa membayar atau melunasi kewajibannya untuk hal ini jumlah piutang tidak tertagih CU. Bina Kasih pada tahun 2019 - 2020 sebesar Rp. 12.730.000.00,-. Dapat disimpulkan bahwa untuk faktor eksternal paling dominan adalah pada indikator kegagalan usaha debitur.

Kata Kunci : Faktor Internal, Faktor Eksternal, Piutang Tidak Tertagih

ABSTRACT

This study aims to determine what are the factors that cause bad debts at CU. Bina Kasih during the COVID-19 pandemic period 2019-2020. This study uses a research and field design. The population in this study is the financial statements for the period 2019-2020. Data collection was done by interview and documentation. The type of data used is qualitative data and quantitative data. The data sources used are primary data and secondary data. Internal factors include the weakness of the credit administration and supervision system, this happened in 2020 with a total receivables of Rp. 567,000.00,- weak total receivables information system in 2019 and 2020 as much as Rp. 4.780.000.00,-, the credit party is not careful in conducting the analysis so that the creditworthiness of the CU is given. given and deviations in the implementation of improper credit assignment procedures were given by the cooperative to the debtor with a total receivable in 2019 and 2020 of Rp. 2.970.000.00,-. In this case, it can be concluded that internal factors in CU. Bina Kasih is dominant



on indicators of weak information systems in CU. Bina Kasih. The external factor is a decrease in economic activities because the value of the interest rate increases so that the debtor is unable to pay the installments in this case the uncollectible receivables for CU Bina Kasih in 2019 and 2020 amounting to Rp. 12.228.0000.00,-. The debtor's business failure for this amount of bad debts CU. Bina Kasih in 2019 amounted to Rp. 9.164,000.00, - and in 2020 it is Rp. 13.090.000.00,-, and the debtor experienced a disaster because the debtor could not manage his business properly, resulting in the debtor not being able to pay or paying off his obligations for this amount of uncollectible CU receivables. Bina Kasih in 2019 - 2020 of Rp. 12.7300.00,-. It can be concluded that the most dominant external factor is the indicator of the debtor's business failure

Keyword : Internal factors, External Factors, Uncollectible Accounts

I. Pendahuluan

Kegiatan simpan pinjam yang memberikan pinjaman uang kepada anggota CU dalam laporan keuangan akan dimasukkan dalam perkiraan piutang. Kadang – kadang ada juga debitur yang sengaja pindah alamat tanpa memberi kabar. Jika terdapat piutang yang tidak dapat diterima pembayaran, maka harus dicatat dalam akun kerugian piutang tidak tertagih. Masalah umum yang dihadapi perusahaan ataupun koperasi dalam piutang usaha adalah sering terjadinya penagihan piutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat tertagih seluruhnya dan akan menimbulkan piutang tidak tertagih.

Piutang usaha yang tidak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu - ragu atau beban piutang tidak tertagih. Tidak ada satupun dari perusahaan yang mengharapkan bahwa dari sekian banyaknya debitur terdapat sebagian yang tidak bisa membayar kewajibannya walaupun dalam proses pemberian kredit telah diteliti sebaik-baiknya. Resiko tidak tertagih atas sejumlah piutang pasti akan ditemui, untuk itu perusahaan seringkali membuat daftar piutang berdasarkan umurnya untuk memudahkan perhitungan piutang yang beredar kemudian menghitung cadangan kerugian piutang yang akan dibebankan pada akhir periode untuk mengakomodasikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih ini biasanya oleh pihak perusahaan menetapkan persentase tertentu untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi keuangan.

Penyebab terjadinya piutang tidak tertagih dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu faktor intern yaitu faktor - faktor yang berasal dari pihak koperasi yang memberikan pinjaman kepada debitur yang terdiri dari lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lembaga sistem informasi kredit, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari pihak debitur yang meminjam kepada koperasi yang terdiri dari adanya penurunan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh Covid -19 dan mengakibatkan kegagalan dalam usahanya

Kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih ini oleh akuntansi diakui sebagai kerugian piutang. Penyebab piutang tidak tertagih dari segi pemilik piutang karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya analisis seleksi dalam pemberian kredit, atau perusahaan tersebut memiliki piutang di perusahaan lain tetapi perusahaan lain juga belum bisa membayar piutangnya sehingga perusahaan tersebut menunggu piutangnya dibayar oleh pihak lain, dan jika piutangnya dibayar oleh pihak lain maka perusahaan tersebut akan membayar piutangnya kepada perusahaan yang bersangkutan, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba - tiba mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau pihak yang berutang memang mempunyai motif secara sengaja tidak membayar utang.

Kondisi ketidakpastian merupakan suatu hal yang wajar jika ada sejumlah piutang dagang perusahaan yang tidak tertagih pada saat jatuh tempo dan bahkan ada yang benar - benar tidak dapat dibayar oleh pihak yang berutang, sehingga terpaksa dihapuskan oleh pemilik piutang. Tetapi perusahaan biasanya tidak dapat mengetahui dengan tepat berapa besar nilai piutang yang dapat

ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Akibat dari adanya piutang yang tidak tertagih ini maka akan sangat berpengaruh pada laba operasional. Dimana semakin besar biaya yang disisihkan untuk kerugian piutang tidak tertagih, maka semakin sedikit laba operasional yang didapatkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan piutang tidak tertagih ada 2 faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat muncul dari pihak pemberi piutang (kreditur) dan pihak yang berhutang (debitur). Fungsi - fungsi yang berkaitan dengan penagihan maupun pemberian kredit dipisahkan sesuai dengan bagian atau fungsinya masing – masing. (Naibaho et al, 2019)

CU merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari CU adalah kesejahteraan seluruh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dicapai dengan bekerja sama melakukan usaha diutamakan melayani anggota, sebab anggota sebagai pelanggan dan sebagai pemilik. CU primer yang bergerak dengan dua sistem, sistem single Purpose dan multi purpose, CU yang bergerak dengan sistem .single purpose yaitu CU yang mengusahakan hanya satu macam kesempatan untuk memperluas produksi, sedangkan CU yang hergerak dengan multi purpore bekerja dan melakukan kegiatan pada berbagai macam usaha, salah satu kegiatan yang dilakukan CU melakukan kegiatan simpan pinjam yang memberikan pinjaman uang kepada anggota CU

CU Bina Kasih yang menjadi tempat penelitian adalah koperasi primer yang bergerak dalam sistem Multi Purpose, dengan kegiatannya adalah bergerak dalam usaha simpan pinjam kepada anggotanya. Permasalahan pada CU Bina Kasih terjadi Piutang tidak tertagih selama pandemi Covid - 19. Permasalahan ini terjadi selama tahun 2019 – 2020, sehingga piutang tidak tertagih dari simpan pinjam tersebut memiliki jumlah yang material

II. KAJIAN PUSTAKA

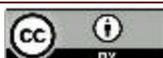
2.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan salah satu informasi mengenai pemberian kepastian dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Menurut (Nur, 2020), “akuntansi merupakan sebuah proses yang meliputi pencatat, penggolongan, pengolahan, pelaporan keuangan sehingga hasilnya dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.” Sedangkan Menurut (Rudianto., 2012) ”akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Akuntansi adalah aktifitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktifitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”

Selain itu Menurut Wild & Kwok dalam buku (Agoes & Trisnawati, 2013) “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna”.

Dalam proses akuntansi akan dihasilkan sebuah laporan keuangan, dengan adanya akuntansi kita dapat melihat aktifitas keuangan suatu perusahaan atau instansi tujuan akuntansi sangatlah penting untuk kemajuan perusahaan atau instansi, karena tanpa akuntansi kegiatan ekonomi dijalankan oleh entitas usaha baik swasta maupun pemerintahan tidak akan berjalan baik dan lancar. Menurut (Nur, 2020) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Sementara menurut (Dunia et al, 2018) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi yang berguna kepada pihak - pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi”. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyiapkan informasi laporan keuangan bagi suatu entitas atau pihak yang berkepentingan agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat mengelola data keuangan sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan

Sedangkan menurut (Agoes & Trisnawati, 2013) pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal, yaitu :



1. Pengguna internal adalah individu-individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seperti manajer, supervisor, direktur, internal audit dan karyawan perusahaan.
2. Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), pemegang saham, pelanggan, dan pemerintah

2.2. Analisis Laporan Keuangan

Bagi pihak - pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi keuangan, sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Menurut (Kariyoto, 2017), “analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang”. Menurut (Rudianto., 2012) ”analisis laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada diantara unsur - unsur dalam laporan keuangan, dan membandingkan unsur - unsur laporan keuangan tahun lalu dengan unsur-unsur yang sama tahun yang lalu atau angka perbandingan lain serta menjelaskan penyebab perubahannya ”.

Sedangkan menurut (Septiana, 2019) “analisis laporan keuangan merupakan proses penganalisan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, serta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan teknik tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah penerapan metode dan teknik analisis pada laporan keuangan guna melihat adanya hubungan tertentu didalamnya untuk dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak - pihak yang berkepentingan

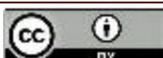
Sedangkan menurut (Rudianto., 2012), “tujuan analisis laporan keuangan dilakukan agar informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi lebih bermakna bagi keperluan pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi”. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai alat untuk mengkomunikasikan data atau informasi keuangan yang menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan atau posisi keuangan dan kinerja perusahaan sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan

2.2 Piutang

Bagi perusahaan dagang, besarnya pendapatan dihasilkan dari penjualan karena merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan menempuh dengan salah satu cara yaitu penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit diharapkan dapat meningkatkan volume pendapatan akan tetapi menimbulkan munculnya perkiraan piutang. Piutang itu sendiri merupakan hak perusahaan untuk menuntut pembayarannya atas penjualan barang atau jasa kepada pihak pelanggan.

Menurut (Mardiasmo, 2002), piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit.. Menurut (Ferdinan, 2012), piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa (aset) tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Sedangkan menurut (Warren et al, 2014), piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Merujuk pada pengertian para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan (klaim) perusahaan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan baik perorangan maupun kelompok (badan usaha) yang ditimbulkan oleh penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan operasional perusahaan.

2.3 Piutang Tidak Tertagih



Piutang usaha tidak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunanaktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham (Keiso & Weygant, 2012). Menurut (Halim, 2010) secara konseptual semakin tinggi risiko pemberian kredit, semakin tinggi pula terjadinya kredit macet atau piutang tidak tertagih. Sedangkan menurut (Jusuf, 2011), piutang tidak tertagih adalah piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau membayar atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Analisis piutang tidak tertagih sangat penting untuk mengetahui perputaran piutang, apakah kreditur mengembalikan piutangnya sesuai jatuh tempo atau melebihi jatuh tempo (Sulistiawan, et al, 2021)

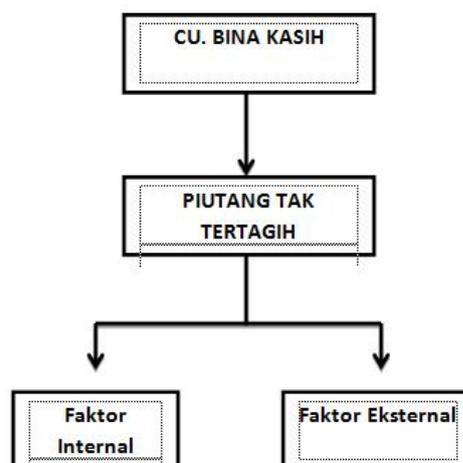
2.4 Koperasi

Menurut golongan nominalist, koperasi berdasarkan modern economic scientific methode sehingga dalam koperasi timbul principle of identity, yakni anggota (members) adalah sebagai pemilik (owners) sekaligus sebagai pelanggan (costumers). Jadi koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok kelompok individu yang bermaksud untuk mewujudkan tujuan tujuan umum atau sasaran sasaran konkritnya melalui kegiatan kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi pemanfaatan bersama. Menurut Fay dalam (Hendrojogi, 2012) menyatidakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka ang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemiliknya atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi yang merupakan pemilik dan pelanggan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip –prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan pedoman bagi kerja koperasi. Prinsip koperasi merupakan esensi dasar kerja koperasi yang membedakannya dari organisasi ekonomi lain.

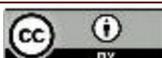
2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan hal yang sangat penting guna memberikan gambaran ringkas tentang isi dari penelitian, sehingga penelitian lebih terarah sesuai dengan maksud dengan tujuan yang diharapkan



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN



3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2016:21) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel - variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka - angka maupun kata – kata.

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, maka dibutuhkan desain penelitian untuk menunjang dan memberikan hasil penelitian yang sistematis. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data

3.2 Variabel Dan Parameter Penelitian

Defenisi operasional variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok besar. Defenisi untuk masing - masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Faktor Internal	Faktor yang berasal dari pihak koperasi yang memberikan pinjaman kepada nasabah	1. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
		2. Lemahnya sistem informasi kredit
		3. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit
Faktor Eksternal	Faktor yang berasal dari pihak debitur yang meminjam kepada koperasi	1. Penurunan kegiatan ekonomi
		2. Kegagalan usaha debitur
		3. Debitur melarikan diri

3.3 Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan- keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas

1. Mempersiapkan instrument

Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan dan pernyataan untuk memudahkan pengumpulan data.

2. Pengumpulan data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

3. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci., untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

4. Penyajian data
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya
5. Verifikasi (penarikan kesimpulan)
Langka berikutnya dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pemberian Kredit

4.1.1 Analisis 7C Dalam Analisis Kredit

1. Caracter
Karakter calon debitur yang meliputi prilaku, kejujuran, pergaulan, dan kertaatan memenuhi pembayaran transaksi dapat diperoleh dengan melakukan Credit Cheking
2. Capacity
Penilaian kemampuan tehnis dan manajemen calon nasabah agar Bank yakni bahwa pembiayaan yang akan diberikan dikelola oleh orang/perusahaan yang tepat.
3. Capital
Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kekayaan calon debitur.
4. Condition
Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupu luar negeri, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha calon debitur,
5. Collateral
Dalam melakukan analisis agunan, agar diperhatikan bahwa barang yang dapat dijadikan agunan kredit harus memiliki kriteria, yaitu memiliki nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan usaha uang dan dapat diajdikan uang, dapat dipertahankan, memiliki nilai yuridis, dapat diikat dengan sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Cash Flow
Hal utama yang perlu di perhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana/uang perusahaan / usaha calon debitur baik yang disimpan maupun yang diinvestasikan.
7. Constraint
Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu.

4.2 Piutang Tidak Tertagih

Berikut dapat dijelaskan nama anggota penunggak dan menjadi piutang ragu-ragu yang masa > 6 bulan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Anggota Yang Tidak Tertagih
Periode 2019

No	NBA	NAMA	Saldo Pinjaman	Faktor	Analisis 7c
1	322	ESRON PANJAITAN	Rp. 1.797.000,-	Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit	<i>Collateral</i>
2	358	SAHAT SITORUS	Rp. 1.767.000,-	Lemahnya Sistem informasi kredit	<i>Capital</i>

3	605	MARTCHNEN RAJAGUGUK	Rp. 3.043.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capacity</i>
4	683	MADDAN R PARDEDE	Rp. 1.132.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capacity</i>
5	689	SONIA	Rp. 1.672.000,-	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	<i>Collateral</i>
6	730	FEBBY NANDA TARIGAN	Rp. 2.614.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
7	609	ROSIANA SITEPU	Rp. 3.191.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>
8	360	SONDANG	Rp. 3.103.000,-		<i>Collateral</i>
9	335	MHD NASIR	Rp. 2.413.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capital</i>
10	429	DARMANSYAH TARIGAN	Rp. 1.965.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
11	45	ROSIANA SITOMPUL	Rp. 900.000,-	Kegagalan usaha debitur	<i>Constraint</i>
12	1199	JUNIARTA SINAGA	Rp. 685.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capital</i>
13	617	DARISMAN PURBA	Rp. 1.298.000,-	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	<i>Cash Flow</i>
14	616	RIJKI M SARAGIH	Rp. 2.419.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capital</i>
15	717	ROSPITA SIMANJUNTAK	Rp. 959.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>
16	408	ROSIKSON PARDEDE	Rp. 3.470.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capacity</i>
17	416	HARTATI E SIMANJUNTAK	Rp. 961.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Collateral</i>
18	1055	BERLINA	Rp. 3.713.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
19	1063	KRISTINA E SIAHAAN	Rp. 3.898.000,-	Kegagalan usaha debitur	<i>Capacity</i>
20	1392	HERI M HANDAYI	Rp. 1.087.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>
TOTAL			Rp. 42.879.000,-		

Sumber data CU Bina Kasih 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 7C yang digunakan CU. Bina Kasih untuk nasabah terdapat 4 nasabah yang menggunakan Collateral, Dalam hal ini nasabah melakukan agunan dalam melakukan peminjaman seperti, sertifikat tanah. Terdapat 4 yang menggunakan analisis Capital, dalam hal ini nasabah diberikan pinjaman berdasarkan kekayaan, atau tabungan yang dimiliki di CU. Bina Kasih. Terdapat 4 yang menggunakan analisis Capacity, bahwa pembiayaan yang akan diberikan dikelola oleh orang/perusahaan yang tepat, misalnya nasabah bekerja di suatu perusahaan dan menjadi karyawan tetap. Terdapat 3 yang menggunakan analisis Constraint, yang artinya nasabah diberikan pinjaman berdasarkan usaha yang di kelolanya. Terdapat 4 yang menggunakan analisis Cash Flow, memahami dengan jelas fungsi dana/uang perusahaan / usaha calon debitur baik yang disimpan maupun yang diinvestasikan, yang artinya pinjaman diberikan berdasarkan tabungan yang dimiliki nasabah.

Tabel 4.2

**Data Piutang Tidak Tertagih
 Priode 2020**

No	NBA	NAMA	Saldo Pinjaman	Faktor	Analisis 7c
1	322	ESRON PANJAITAN	Rp. 1.797.000,-	Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit	<i>Collateral</i>
2	358	SAHAT SITORUS	Rp. 1.767.000,-	informasi kredit	<i>Capital</i>
3	605	MARTCHNEN RAJAGUGUK	Rp. 3.043.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capacity</i>
4	683	MADDAN R PARDEDE	Rp. 1.132.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capacity</i>
5	689	SONIA	Rp. 1.672.000,-	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	<i>Collateral</i>
6	730	FEBBY NANDA TARIGAN	Rp. 2.614.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
7	609	ROSIANA SITEPU	Rp. 3.191.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>
8	360	SONDANG	Rp. 3.103.000,-	informasi kredit	<i>Collateral</i>
9	335	MHD NASIR	Rp. 2.413.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capital</i>
10	429	DARMANSYAH TARIGAN	Rp. 1.965.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
11	45	ROSIANA SITOMPUL	Rp. 900.000,-	Kegagalan usaha debitur	<i>Constraint</i>
12	1199	JUNIARTA SINAGA	Rp. 685.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Capital</i>
13	617	DARISMAN PURBA	Rp. 1.298.000,-	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	<i>Cash Flow</i>
14	616	RIJKI M SARAGIH	Rp. 2.419.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capital</i>
15	717	ROSPITA SIMANJUNTAK	Rp. 959.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>
16	408	ROSIKSON PARDEDE	Rp. 3.470.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	<i>Capacity</i>
17	416	HARTATI E SIMANJUNTAK	Rp. 961.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Collateral</i>
18	1055	BERLINA	Rp. 3.713.000,-	Kegagalan Usaha Debitur	<i>Constraint</i>
19	1063	KRISTINA E SIAHAAN	Rp. 3.898.000,-	Kegagalan usaha debitur	<i>Capacity</i>
20	1392	HERI M HANDAYI	Rp. 1.087.000,-	Debitur Melarikan Diri	<i>Cash Flow</i>

21	1290	DIANA SMANJUNTAK	Rp. 567.000,-	Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit	Cash Flow
22	342	ASDINAR MANALU	Rp. 1.320.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	Capital
23	278	BERLINA TAMBUNA	Rp. 2.150.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	Cash Flow
24	1902	CRISTIAN SINAGA	Rp. 456.000,-	Penurunan Kegiatan Ekonomi	Capacity
TOTAL			RP. 47.372.000,-		

Sumber data CU Bina Kasih 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 7C yang digunakan CU. Bina Kasih untuk nasabah terdapat 4 nasabah yang menggunakan Collateral, Dalam hal ini nasabah melakukan agunan dalam melakukan peminjaman seperti, sertifikat tanah. Terdapat 5 yang menggunakan analisis Capital, dalam hal ini nasabah diberikan pinjaman berdasarkan kekayaan, atau tabungan yang dimiliki di CU. Bina Kasih. Terdapat 5 yang menggunakan analisis Capacity, bahwa pembiayaan yang akan diberikan dikelolah oleh orang/perusahaan yang tepat, misalnya nasabah bekerja di suatu perusahaan dan menjadi karyawan tetap. Terdapat 3 yang menggunakan analisis Constraint, yang artinya nasabah diberikan pinjaman berdasarkan usaha yang di kelolahnya. Terdapat 7 yang menggunakan analisis Cash Flow, memahami dengan jelas fungsi dana/uang perusahaan / usaha calon debitur baik yang disimpan maupun yang diinvestasikan, yang asrtinya pinjaman diberikan berdadsarkan tabungan yang dimiliki nasabah.

Berikut rekapitulasi hasil jumlah piutang tidak tertagih di CU. Bina Kasih Pematangsiantar

Tabel 4.3
Data Piutang Tidak Tertagih
Priode 2019

No.	Faktor	Jumlah NBA	Jumlah Piutang
Faktor Internal			
1	Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit	-	-
2	Lemahnya sistem informasi kredit	358, 360	Rp. 4.780.000.00,-
3	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	689, 617,	Rp. 2.970.000.00,-
Faktor Eksternal			
1	Penurunan kegiatan ekonomi	335, 616, 408,	Rp. 12.228.000.00,-
2	Kegagalan usaha debitur	730, 429, 45, 1055, 1063	Rp. 9.164.000.00,-
3	Debitur melarikan diri	605, 683, 689, 609, 119, 717, 416, 1392	Rp. 12.730.000.00,-
Total			Rp. 42.879.000,-

Sumber Data CU Bina Kasih 2021

Tabel 4.4
Data Piutang Tidak Tertagih
Periode 2020

No.	Faktor	Jumlah NBA	Jumlah Piutang
Faktor Internal			

1	Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit	1290	Rp. 567.000.00,-
2	Lemahnya sistem informasi kredit	358, 360	Rp. 4.780.000.00,-
3	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	689, 617,	Rp. 2.970.000.00,-
Faktor Eksternal			
1	Penurunan kegiatan ekonomi	335, 616, 408, 342, 278, 1902	Rp. 12.228.000.00,-
2	Kegagalan usaha debitur	730, 429, 45, 1055, 1063	Rp. 13.090.000.00,-
3	Debitur melarikan diri	605, 683, 689, 609, 119, 717, 416, 1392	Rp. 12.730.000.00,-
Total			RP. 47.372.000,-

Sumber Data CU Bina Kasih 2021

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan piutang tidak tertagih antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam Koperasi yaitu terdiri dari:

- a) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh koperasi CU. Bina Kasih adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Kredit.

a. Tahapan permohonan kredit

Pada CU. Bina Kasih pada tahapan kredit, telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun masih saja terjadi piutang tidak tertagih ini diakibatkan masih lemahnya koperasi dalam menganalisis keabsahan kosnumen. Yang artinya CU Bina kasih masih kurang dalam menganalisis konsumen pada saat melakukan permohonan peminjaman. Sebelumnya calon kreditur diwajibkan mengisi formulir yang ada di gambar 4.2.

b. Tahapan analisis kredit

Pada CU. Bina Kasih, pada tahap pemberian kredit sudah menetapkan untuk menganalisis debitur menggunakan tahap SC, namun pada kenyataannya tidak dilakukan metode analisis yang komprehensif dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan kredit macet di koperasi. Hal ini biasanya para kreditur mengisi orang penjamin di dalam CU. Bina Kasih (anggota) CU. Bina Kasih jika ada. lihat seperti gambar di atas. Seharusnya, tindakan yang dilakukan oleh CU. Bina Kasih harus menganalisis yang sebenarnya, agar pada tahap persetujuan kredit tidak salah dalam mengambil keputusan.

c. Tahapan keputusan kredit

Pada CU. Bina Kasih dalam memberikan keputusan kredit dalam debiturnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan jangan hanya cukup mengenal pemohon dan mengetahui alamat lengkap serta pekerjaan pemohon yang diketahui dari lampiran persyaratan perjanjian kredit KTP, KK. Dengan hanya memenuhi syarat tersebut makadengan mudah kredit diberikan kepada konsumen tanpa benar-benar mempertahankan SC pemohon (Character, Capacity, Capital, Col/atera/1 dan condition) Karakter CU. Bina Kasih pada yaitu:

- a) Debitur yang janji-janji untuk membayar hutang.
- b) Debitur yang sulit untuk ditemui
- c) Debitur yang kabur pindah alamat tanpa diketahui tanpa debitur
- d) Status kepemilikan rumah bukan milik sendiri
- e) Debitur yang tidak memiliki pendapatan yang tetap

Pemberian kredit seperti ini akan memperbesar risiko piutang tidak tertagih karena hanya memikirkan cara untuk mengejar target tanpa memikirkan resiko yang akan timbul dikemudian hari dan menyebabkan piutang tidak tertagih

d. Tahapan Pengikat Kontrak Jaminan

Pada CU. Bina Kasih pada tahap ini tidak ada pengikata kontrak jaminan, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa koperasi tidak berorientasi pada jaminanya, Seharusnya harus menerapkan peningkatan kontrak jaminan untuk berjaga-jaga jika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jaminan ini biasanya surat listrik, BPKB Dan Surat tanah

e. Tahapan pelunasan pemberian kredit

Tahap terakhir dalam pemberian kredit pada CU. Bina Kasih ini adalah pelunasan pemberian kredit. Pelunasan pembayaran kredit pada CU Bina Kasih ini dapat dilakukan dengan debitur datang langsung untuk membayar. Apabila dalam pelunasannya debitur tidak melakukan kewajibannya maka koperasi harus memberikan sanksi atau bertindak tegas kepada pihak debitur

b) Lemahnya Sistem Informasi Kredit

Pada CU Bina Kasih masih bnyak terdapat debitur kurang paham atau bahkan kurang mengetahui informasi mengenai pengkreditan, seperti prosedur permohonan kredit, syarat yang diperlukan, kemudian dari pihak adminstrasi tidak memberikan penjelasan secara mendetail mengenai pengkreditan kepada debitur Sehingga, pada Koperasi CU Bina Kasih seharusnya menerangkan secara mendetail kepada calon debitur mengenai perkreditan. perkreditan.. Bagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan dan ditaati oleh debitur sampai debitur paham betul mengenai kredit, dengan demikian debitur paham mengenai kredit. Agar, pada saat konsumen membayar kredit tepat pada waktunya

c) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit

Berupa kurang disiplinnya penerapan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mengenai kredit kurang memadai. Akibat dalam pemberian kredit tidak sesuai dan mengalami habatan dalam pengembalian dana. Melaksanakan presedur pemberian kredit harus sesuai dengan tata cara pemberian kredit dan kualitas sumber daya manusia dalam menangani kredit haruslah yang memiliki profesional dalam hal kredi

2. Faktor-Faktor Ekstern

Faktor eksternal penyebab terjadi piutang tidak tertagih antara lain:

a) Penurunan Kegiatan ekonomi

Disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan yang diakibatkan karena besarnya pengeluaran di bandingkan dengan pendapatan yang di terima dan diakibatkan karena semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, membayar biaya sekolah anak, dan belum lagi kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam hal ini agar terhindar dari kredit macet/ piutang tidak tertagih yang dapat menyebabkan kerugian bagi koperasi itu sendiri. Sebaiknya, CU Bina Kasih harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menganalisis kelayakan kredit dan memberikan kredit kepada nasabah.

b) Kegagalan Usaha Debitur

Maksudnya adalah usaha yang dijalani selama ini mengalami kebangkrutan seperti banyaknya pesaing sehingga pendapatan yang di terima tidak sesuai dengan membuat debitur tidak mampu membayar angsuran kredinya. CU Bina Kasih tidak dapat lagi menagih piutang yang ada pada pihak debitur seharusnya pihak koperasi memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pihak debitur supaya pihak debitur mampu mengelolah usahanya dengan baik.

c) Debitur Melarikan Diri

Debitur tersebut melarikan diri keluar pulau/kota sehingga keberadaanya debitur tidak dapat diacak keberadaanya. Debitur tersebut memiliki itikat tidak baik dengan segala upaya untuk mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dipertanggungjawabkan. Debitur

sudah melarikan diri dari tanggung jawab melakukan penipuan guna mempermudah debitur melarikan diri dengan mengatasnamakan orang lain

Dalam hal ini, seharusnya perusahaan lebih cermat dan teliti lagi mengambil keputusan pembenaan kredit agar tidak hal yang tidak diinginkan oleh koperasi dan menghindari kerugian yang terjadi pada perusahaan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berusaha

Pembahasan

Hasil penelitian untuk piutang tidak tertagih pada CU.aaa Bina Kasih untuk tahun 2019 - 2020:

Tabel 4.5
Faktor Internal

No.	Faktor	2019	2020
Faktor Internal			
1.	Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit	-	1
2.	Lemahnya sistem informasi kredit	2	2
3.	Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit	3	3
Faktor Eksternal			
1.	Penurunan kegiatan ekonomi	3	6
2.	Kegagalan usaha debitur	5	5
3.	Debitur melarikan diri	7	7
Total		20	24

Sumber data CU. Bina Kasih 2021

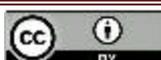
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui piutang tidak tertagih pada CU. Bina Kasih berdasarkan faktor internal diantaranya adalah faktor internal antara lain adalah lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi, kredit pihak koperasi kurang teliti dalam melakukan analisis, sehingga kelayakan kredit yang diberikan mengalami masalah dan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembenaan kredit tidak tepat diberikan koperasi kepada pihak debitur dan faktor eksternal diantaranya.

Faktor intern yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak koperasi yang memberikan pinjaman kepada debitur yang terdiri dari lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lembaga sistem informasi kredit, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kre. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit terdapat 1 kreditur di dasarkan pada faktor ini. Lemahnya sistem informasi kredit pada faktor ini terdapat 2 kreditur yang ada pada faktor ini. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit terdapat 2 kredit yang ada pada faktor ini.

Kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih ini oleh akuntansi diakui sebagai kerugian piutang. Penyebab piutang tidak tertagih dari segi pemilik piutang karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya analisis seleksi dalam pemberian kredit, atau perusahaan tersebut memiliki piutang di perusahaan lain tetapi perusahaan lain juga belum bisa membayar piutangnya sehingga perusahaan tersebut menunggu piutangnya dibayar oleh pihak lain, dan jika piutangnya dibayar oleh pihak lain maka perusahaan tersebut akan membayar piutangnya kepada perusahaan yang bersangkutan, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau pihak yang berutang memang mempunyai motif secara sengaja tidak membayar utang

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan



Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan diantaranya faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih pada CU Bina Kasih berasal dari pihak koperasi dan pihak debitur :

1. CU. Bina Kasih memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan analisis 7C.
2. Faktor internal antara lain adalah lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, hal ini terjadi pada tahun 2020 dengan total piutang sebesar Rp. 567.000.00,- lemahnya sistem informasi total piutang pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak Rp. 4.780.000.00,- kredit pihak koperasi kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga kelayakan kredit yang diberikan dan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembenaan kredit tidak tepat diberikan koperasi kepada pihak debitur dengan total piutang pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 2.970.000.00,-. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwasannya faktor internal di CU. Bina Kasih di dominan pada indikator lemahnya sistem informasi di CU. Bina Kasih.
3. Faktor eksternal yaitu penurunan kegiatan ekonomis karena nilai tingkat bunga naik sehingga debitur tidak mampu membayar cicilan pada hal ini piutang tidak tertagih untuk CU Bina Kasih tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 12.228.000.00,- kegagalan usaha debitur untuk hal ini jumlah piutang tidak tertagih CU. Bina Kasih pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.164.000.00,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.090.000.00,- dan adanya debitur mengalami musibah terjadi dikarenakan pihak debitur tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga mengakibatkan debitur tidak bisa membayar atau melunasi kewajibannya untuk hal ini jumlah piutang tidak tertagih CU. Bina Kasih pada tahun 2019-2020 sebesar Rp. 12.730.000.00,-. Dapat disimpulkan bahwa untuk faktor eksternal paling dominan adalah pada indikator kegagalan usaha debitur

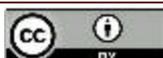
5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis mampu memberikan saran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih pada CU Bina Kasih yaitu:

1. Untuk faktor internal yang paling dominan dalam melakukan sistem administrasi dan pengawasan kredit harus benar-benar teliti dan mengikuti pedoman 7C yaitu character (menganalisis calon debitur), (capacity), capital (memeriksa kekayaan calon debitur), condition (menganalisis kondisi ekonomi debitur), collateral (menganalisis agunan), cash flow (menganalisis jenis dana yang akan dipinjam), dan constrain (batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan), sehingga jika CU. Bina Kasih mengikuti prosedur tersebut maka akan berkurang piutang tidak tertagih di CU. Bina Kasih.
2. Sedangkan untuk faktor eksternal di CU. Bina Kasih dalam mengatasi masalah yang di hadapi oleh debitur dalam kegagalan usahanya sebaiknya harus memberi solusi dan saran terhadap debitur sehingga tidak mengalami suatu kegagalan usaha.
3. Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan yang ada pada penulis, penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dan belum dapat mengungkap seluruh variabel yang telah faktor-faktor yang mempengaruhi piutang tidak tertagih di CU. Bina Kasih Pematangsiantar. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pembaca departemen menyempurnakannya dengan variabel baru yang dapat mempengaruhi lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2010). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: YKPN.
- Agoes, Soekrisno, & Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*, edisi ketiga. In *Penerbit: Salemba Empat, Jakarta*.
- Al Haryono Jusuf. (2011). *Dasar - dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Arifin, Ali. (2007). *Membaca Saham Panduan Dasar Seni Berinvestasi*. In Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Basri, & Riva'i. (2015). *Penilaian Kinerja dan Organisasi*. In Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carl S. Warren, dkk. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, F. A., Abdullah, W. and Sasongko, C. (2018). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.



- Giri Efraim Ferdinan. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendrojogi. (2012). *Koperasi Asas - Asas, Teori dan praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Horne, James C. Van dan Wachowicz, John M. (2012). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat., 1, 11–22
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Analisa_Laporan_Keuangan/DjBODwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kariyoto+2017&printsec=frontcover
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Keiso dan Weygant. (2012). *Intermediate Accounting* (10th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Keuangan Dasar* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE
- Masrunik, Endah, Wahyudi, Arif, & Frenti, Dewi. (2020). Penyelesaian Piutang Tak Tertagih Pada Primer Koperasi Purnawirawan Abri (Primkoppabri) Kabupaten Blitar Endah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 165–176.
- Naibaho, Efriliana, Supitriyani, Supitriyani, Manurung, Sepbeariska, & Ervina, Nelly. (2019). PENGENDALIAN INTERN PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH KP-RI JAYA DINAS P DAN K KABUPATEN SIMALUNGUN. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 5(2), 11–21. <https://doi.org/10.37403/financial.v5i2.106>
- Nur, S. W. (2020). *Akuntansi Dasar*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Dasar_Teori_dan_Teknik_Penyusu/li0PEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+dasar&printsec=frontcover
- Rudianto. (2012). Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS. In *Erlangga*.
- Septiana, Aldila. (2019). Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan. In *Analisis Laporan Keuangan*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xyH7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=laporan+keuangan&ots=0j3jICLH74&sig=0iGR_0iTpKLztAVnEkB36ldQX2E&redir_esc=y#v=onepage&q=laporan-keuangan&f=false%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/ANALISIS_LAPORAN_KEUANGAN
- Sinaga, M. H., & Saragih, M. (2021). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KESEHATAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MEKAR SARI PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.36985/accusi.v3i1.492>
- Sulistiwani, Tessa, Bramana, Sally Maria, Anwar, Yuniarti, & Yunsepa, Yopi. (2021). Analisis Piutang Tak Tertagih Terhadap Tingkat Perputaran Piutang Pada CV. SURYAMAS Di Kabupaten Oku. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 125–142.
- Triyulianto, Toni, Rangkuti, Tavitri, & Mukoronah. (2016). Analisis Akuntansi Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Usaha Mandiri Bekasi 2014. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079
- Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Muhamad Arifin, Nur Cahyadi. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Batam: CV Rey Media Grafika
- Ulma, Fitri Dwi, Fadjar, Mumu Mohamad, & Kartini, Tina. (2020). ANALISIS FAKTOR INTERNAL PENYEBAB TERJADINYA PIUTANG TAK TERTAGIH. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 151–161. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1280>
- Wico J Tarigan. (2020). PENERAPAN SISTIM AKUNTANSI PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN KAS PADA CU . BINA KASIH. 2(1), 16–27. Retrieved from <http://usi.ac.id/jurnal/index.php/accusi/article/view/49>
- Yuliana, Rena, Susilawati, R., & Purwanto, Nanang. (2016). Analisis Metode Dana Cadangan Terhadap Piutang Tak Tertagih Sesuai Sak-Etap (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kp-Ri Asehatâ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–11

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANGSIANTAR

¹Gustia Laras Ayu, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : gustialaras2608@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Elfina OP Damanik, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan kewajiban moral relevan dengan Teori atribusi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dikualitatifkan dengan jumlah responden 100 UMKM yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan pengumpulan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui google form, dan mendatangi langsung pelaku UMKM yang dalam hal ini sebagai responden penelitian. Hasil penyebaran kuesioner dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dioalah dengan memanfaatkan IMB SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar

Kata Kunci : Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan UMKM, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax services, and MSME taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness, tax service, and compliance with moral obligations are relevant to attribution theory. This research is a qualitative quantitative research with the number of respondents 100 MSMEs registered at the Pematangsiantar Tax Service Office. The sampling technique used is the Slovin formula and the sample collection used is random sampling. The data used is primary data by using a questionnaire distributed via google form, and coming directly to MSME actors who in this case are research respondents. The results of the distribution of the questionnaires were collected first, then processed using the SPSS version 25 IMB. The results of this study indicate that taxpayer awareness, service, and moral obligations have a positive and significant impact on tax revenues at the Pematangsiantar Tax Service Office.

Keyword : Awareness, Service, MSME Compliance, Tax revenue

I. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran atau pungutan biaya yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada Negara yang ditetapkan berdasarkan undang - undang. Indonesia menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan untuk membiayai kebutuhan Negara. Di masa pandemi covid-19, Kebutuhan Negara semakin tinggi dan perekonomian Indonesia semakin menurun. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan survei pada Mei 2020. Lembaga penelitian ini merilis hasil survei dampak pandemi Covid-19 pada pekerja. Survei dilakukan terhadap 1.112 pekerja di seluruh Indonesia. Data survei menunjukkan 2% pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pesangon, 15% pekerja mengalami PHK tanpa pesangon, dan 65% pekerja dapat bekerja dari



rumah. Pekerjaan yang paling terdampak adalah sektor perdagangan, rumah makan, akomodasi, dan sektor jasa.

Sempat beredar wacana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, akhirnya pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak, baik untuk pelaku UMKM dan beberapa pengusaha lain yang terdampak wabah virus covid-19. Fasilitas pajak yang diberikan terkhusus kepada UMKM berupa tarif final 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dimana tarif tersebut ditanggung oleh pemerintah sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Kebijakan tersebut merupakan langkah tepat pemerintah dalam menekan dampak pandemi covid-19. Fasilitas pajak penghasilan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menguatkan arus kas perusahaan. Selain itu, berbagai insentif pajak diharapkan dapat menarik investor ke Indonesia. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha yang sangat drastis. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah.

Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara II tahun 2020 berada di posisi 86,61% atau sekitar Rp 4,3 triliun dan optimis hingga akhir tahun akan tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 5,03 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, target penerimaan pajak sebesar Rp 6,3 Triliun maka tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan. Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat membayar pajak bukan semata-mata karena adanya kesadaran melainkan karena paksaan. Sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dikatakan belum mencapai tingkat yang diharapkan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak. Ditambah lagi Negara kita sedang dilanda covid-19 dimana sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Covid_19 juga mengakibatkan para pekerja terutama pegawai pajak mengalami kendala dalam pelayanan karena tidak sedikit dari mereka ada yang menjalankan WFH. Sehingga membuat beberapa masyarakat berusaha menghindari dari membayar pajak yang kemungkinan akan mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Maka saya tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar”

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut P.J.A Andriani dalam buku (Agoes, 2020) “ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut MJH Smeets “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh; Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:



- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilakukan dengan mencari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM)

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Merupakan pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sebagai fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat memasukkan dana ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017). Adapun faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak menurut (Resmi, 2019) yaitu:

- a. Sosialisasi perpajakan
- b) Kualitas pelayanan
- c) Kualitas individu wajib pajak
- d) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- e) Tingkat ekonomi wajib pajak
- f) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Ada juga faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak yaitu:

- a) Prasangka negatif kepada fiskus
- b) Barrier dari instansi di luar pajak
- c) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- d) Wujud pembangunan dirasa kurang
- e) Adanya anggapan bahwa pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

2.3 Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak juga dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Dimana pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat daerah, atau dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (Rahayu, 2017).

Menurut (Rahayu, 2017) Wajib Pajak dapat menilai tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh instansi dengan memperhatikan hal berikut:

- a) Diperlakukan dengan manusiawi, sopan,jujur dan hormat
- b) Wajib Pajak dilayani sepenuh hati
- c) Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik Wajib Pajak yang dilayaninya
- d) Mendapatkan jawaban atas permintaan Wajib Pajak dengan cepat dan pasti
- e) Mendapatkan pelayanan yang tepat waktu
- f) Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan.
- g) Pegawai pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah
- h) Tersedianya fasilitas pelayanan baik berupa sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.



- i) Sarana, prasarana dapat berupa lahan parkir, ruangan konsultasi, tempat pelayanan pajak, media pelayanan, sistem maupun media informasi.
- j) Penampilan fisik Pegawai Pajak (*Performance*) rapi, dan sehat
Menurut (Lukman, 2021) indikator kualitas pelayanan pajak antara lain;
 - a) Fiskus diharapkan memiliki kompetensi skill (kemampuan), *knowledge* (pengetahuan), *experience* (pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang - undangan.
 - b) Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayanan publik.
 - c) Perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT)
 - d) TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
 - e) Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013)

2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut (Pohan, 2013) “Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”. Sedangkan menurut (Rahayu, 2017) Penerimaan pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”. Menurut (Resmi, 2019) “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No 14 Tahun 2015 tentang APBN, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Adapun indikator penerimaan Pajak menurut (Resmi, 2019) yaitu : “Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar - besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, hal ini berarti hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”

2.6 UMKM

UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. (Budi 2013).

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan



2. Usaha kecil

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

3. Usaha Menengah

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

Berdasarkan pengertian UMKM diatas, dapat kita ketahui perbedaannya dengan perusahaan besar. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Asset
- b. Omset
- c. Jumlah karyawan

Status usaha yang dijalankan memiliki kewajiban pajak yang berbeda. Ketentuan umum tentang pajak bagi UKM dan UMKM tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pada UU ini ditetapkan bahwa setiap orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tepat, merupakan objek dari pajak penghasilan. Artinya UKM dan UMKM wajib membayar pajak penghasilan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Sebagai pengusaha UKM kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak bulanan yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya dan pajak tahunan yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun

2.7 Kerangka Pemikiran

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotongroyong masyarakat dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan

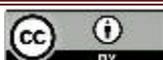
III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berada di Kota Pematangsiantar. Waktu penelitian yang akan digunakan peneliti dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan September. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono 2017)

“Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian” (Siyoto 2015). Menurut Neuman W Lawrence dalam buku (Sugiyono 2019) menyatakan penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif dimana peneliti menanyakan ke beberapa orang (responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siyoto 2015). Ada juga menurut Arikunto dalam buku (Siyoto 2015) yang berpendapat



bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto 2015)

3.2 Variabel Penelitian dan Parameter Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono 2017).

3.2.1 Definisi Operasional Variabel

- a. Variabel Independen
 - a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)
 - b) Pelayanan Perpajakan (X2)
 - c) Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

- b. Variabel Dependen
Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak merupakan suatu hasil dari pengutipan iuran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak

Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal ini diperoleh dengan metode Kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (Sugiyono 2019). Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2019).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2017).yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal ini diperoleh dengan metode Kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (Sugiyono 2019).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang telah disebar dengan objek penelitian adalah pelaku UMKM di kota Pematangsiantar dalam bentuk angket yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel X₁, 4 pernyataan untuk variabel X₂, 4 pernyataan untuk variabel X₃ dan 4 pernyataan untuk variabel Y. Kuesioner disebar kepada 100 responden yang sudah memiliki NPWP. Penyebaran dilakukan mulai tanggal 17 Agustus samapai tanggal 22 Agustus. Berikut data penerimaan pajak UMKM dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang terdiri dari PPh Final, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Tabel 1
Penerimaan Pajak PPh Final, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
KPP Pratama Pematangsiantar 2016 - 2020

Tahun	Jumlah UMKM	Penerimaan Pajak		
		PPh Final (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	PPh Pasal 23 (Rp)
2020	991	12,414,496,633	300,513,198	179,176,776
2019	4.856	13,978,747,487	286,206,908	130,514,694
2018	4.430	16,030,052,373	165,265,890	96,236,419



2017	2.449	16,458,673,873	216,482,851	39,884,111
2016	2.007	13,488,904,216	134,860,184	38,594,377

Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada responden dan mengumpulkannya kembali. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di Kota Pematangsiantar, peneliti melakukan pengujian analisis dengan data menggunakan program SPSS V25. Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS V. 25 dinyatakan semua item pernyataan dari masing-masing variabel kuesioner dapat dinyatakan valid dan reliabilitas. Selain itu masing-masing hipotesis pada penelitian dapat dinyatakan diterima yang berarti terbukti berpengaruh positif dan signifikan

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} 3.630 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Sedangkan tingkat signifikansi 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kesadaran masyarakat UMKM dalam membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

2) Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 6.299 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi yang dapat membantu atau mempermudah masyarakat Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM dalam melakukan penyetoran dan sebagainya.

3) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} 4.468 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Sedangkan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepatuhan masyarakat dengan melaporkan SPT tepat waktu, membayar tunggakan sebelum jatuh tempo dan sebagainya

4) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 65.525 dengan nilai F_{tabel} 2.69 maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak, Pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan penerimaan pajak juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah kesadaran pelayanan dan kepatuhan wajib pajak membuat penerimaan pajak menurun karena ketidak mampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.

Hasil penelitian ini memperkuat bahwa upaya wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan meningkat

V. KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Ini berarti upaya wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan meningkat.
- Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ dimana $Y = 0.652 + 0.261X_1 + 0.393X_2 + 0.317X_3 + e$ Menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak. Dimana variabel kesadaran wajib pajak untuk setiap kenaikan satu satuan variabel akan mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 0.261. Kemudian variabel pelayanan perpajakan untuk setiap kenaikan satu satuan variabel akan mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 0.393. Selanjutnya variabel kepatuhan wajib pajak untuk setiap kenaikan satu satuan variabel akan mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 0.317. Dengan demikian faktor-faktor yang lain dianggap 0.
- Berdasarkan hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 67,2%. Kemudian 32,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar dari pada penelitian

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

- Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanannya dalam membantu wajib pajak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Sehingga masyarakat terutama pelaku UMKM memperoleh pelayanan yang nyaman serta informasi yang jelas tentang perpajakan. Hal ini dapat menciptakan wajib pajak yang lebih patuh dan sadar akan kewajiban dan hak perpajakannya.
- Mengingat pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kantor pajak tentang bagaimana mudahnya dalam melakukan transaksi di kantor pelayanan pajak maka diharapkan kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM untuk turut serta dalam kegiatan tersebut sehingga terciptanya pemahaman bagi pelaku wajib pajak. Dengan demikian kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai warga Negara yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Anggi Erlina, Damanik, E. O. P. ., & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.127>
- Amalia, R. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Ghozali, Prof.Dr.H.Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap*



- Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Kusuma, R. S. (2018). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Lukman, Dr.Sampara. (2021). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Bandung: Rosda.
- Martina. (2020). Jenis Pajak dan Tarif Pajak yang Harus Dibayarkan UKM dan UMKM. Jurnal: <https://ukirama.com/en/blogs/jenis-pajak-dan-tarif-pajak-yang-harus-dibayarkan-ukm-dan-umkm>
- Pohan, Drs.Chairi.Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* (Edisi Revi). Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Pert). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Robert Tua Siregar, H. P. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar. Pematangsiantar: Jurnal ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/view/3736
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Saragih, R. C., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. Jurnal Ilmiah Accusi, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.130>
- Sitompul, C. F., Damanik, E. O. P., & Tarigan, V. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Jurnal Ilmiah Accusi, 3(2), 106–116. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.129>
- Sugiyono, Prof.Dr. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- . 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI KARYAWAN PTPN IV KEBUN BAH JAMBI

¹Nur Hafidzah, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : fidzah2708@gmail.com

²Eva Sriwiyanti Sinaga, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Mahaitin H.Sinaga, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e – mail : sinagamahaitin@gmail.com

¹²³Universitas Simalungun, Pematangsiantar

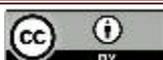
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum menerapkan SAK ETAP dengan benar. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi hanya menyajikan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan tetapi belum menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAK ETAP. Dalam neraca dan laporan perhitungan hasil usaha terdapat beberapa istilah dan akun yang digunakan yang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi Pegawai PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak mengklasifikasikan aktiva tetap berdasarkan likuiditas. Pencatatan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan aktiva tetap Koperasi Pegawai PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi Pegawai PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak menyajikan format laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP

Kata Kunci : Kooperatif, Laporan keuangan, SAK ETAP

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze how the application of SAK ETAP in the preparation of financial statements at the PTPN IV Kebun Bah Jambi Employee Cooperative. The method used in this research is a qualitative descriptive method with a case study approach. The types of data used are qualitative data and quantitative data. The data source used is primary data. Data obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique. The results showed that the Financial Statements of the PTPN IV Kebun Bah Jambi Employee Cooperative had not implemented SAK ETAP correctly. The preparation of financial reports for external parties of the PTPN IV Kebun Bah Jambi Employee Cooperative only presents a balance sheet, a report on the calculation of operating results and notes to the financial statements but has not prepared a cash flow statement and a statement of changes in equity in accordance with SAK ETAP. In the balance sheet and the report on the calculation of operating results there are several terms and accounts used that are not in accordance with SAK ETAP. Employee Cooperative PTPN IV Kebun Bah Jambi does not classify fixed assets based on liquidity. The recording of fixed assets and accumulated depreciation of fixed assets of PTPN IV Kebun Bah Jambi Employee Cooperative are not in accordance with SAK ETAP. The Employee Cooperative of PTPN IV Kebun Bah Jambi does not present a financial report format that is in accordance with SAK ETAP.



Keywords: Cooperative, Financial Statement, SAK ETAP

I. PENDAHULUAN

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012), koperasi didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memisahkan kekayaan anggota sebagai modal untuk mempertahankan suatu usaha, yang memenuhi tujuan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Informasi akuntansi yang terbatas dan kelemahan dalam laporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak memiliki standar menyulitkan koperasi di Indonesia dalam memperoleh dana atau bantuan modal dari pemerintah, rekan kerja atau perbankan. Kondisi ini secara positif akan menyulitkan koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama mengapa pemerintah menantang memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan strategi yang belum jelas. Oleh karena itu, pelaku koperasi secara implisit diharapkan untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan standar peraturan yang berlaku sehingga tidak hanya dapat dipahami oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, misalnya pemerintah atau perbankan yang akan menyediakan modal.

Penyusunan laporan keuangan memerlukan kebijakan yang memastikan bahwa laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terdapat keseragaman dalam setiap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan diharapkan dapat mempermudah pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan masing-masing perusahaan.

Indonesia saat ini memiliki lima standar akuntansi keuangan yaitu PSAK - IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAS (Standar Akuntansi Syariah), SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). SAK ETAP disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan dan usaha menengah. Bersamaan dengan dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP, koperasi di Indonesia diinstruksikan untuk menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangan tahunannya. SAK ETAP merupakan suatu standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi terhadap UMKM dan koperasi di Indonesia, namun semua pelaksanaan koperasi juga diatur pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terbaru yang dikeluarkan oleh menteri yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap berarti suatu entitas harus menyajikan setidaknya dua periode dari setiap laporan keuangan dan catatan yang diperlukan untuk laporan keuangan yang terkait.

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi merupakan salah satu koperasi serba usaha yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, usaha kedai konsumsi dan usaha lain yang bermanfaat bagi koperasi. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi beralamat di Emplasmen Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun. Dalam penyajian laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi, laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. Adapun penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum lengkap dan masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan serta belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal tersebut diungkapkan bahwa pemahaman pengurus terhadap standar yang berlaku belum sepenuhnya dipahami. Melihat begitu pentingnya bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan

SAK ETAP, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “*Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi*”.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh (Simatupang & Purba, 2018) yang berjudul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematangsiantar” menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematangsiantar tidak sesuai dengan SAK ETAP, jenis dan susunan laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematangsiantar hanya terbatas pada neraca dan laporan perhitungan sisa hasil usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sekarwati & Mazidah, c2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG)” menyimpulkan bahwa koperasi karyawan IKSG tidak sepenuhnya menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan yang dibuat, yakni pada aset, pos asset sesuai dengan SAK ETAP, kecuali pada pos property investasi dan asset tidak berwujud. Hal ini dikarenakan dalam koperasi karyawan IKSG memang tidak memiliki asset dan kewajiban seperti yang digambarkan dalam SAK ETAP. Pada pos kewajiban, koperasi karyawan IKSG telah mengelompokkannya berdasarkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sesuai dengan ketentuan penyajian kewajiban dalam SAK ETAP. Koperasi karyawan IKSG sudah menerapkan perhitungan dan pengakuan pada pos ekuitas yang ada dalam SAK ETAP pada ekuitas untuk koperasi. Dalam laporan laba rugi, informasi yang disajikan dalam laporan pada dasarnya sudah mencakup pos - pos yang disyaratkan oleh SAK ETAP. Laporan arus kas yang dibuat oleh koperasi karyawan IKSG tidak sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP yang seharusnya menunjukkan perubahan kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 2019) yang berjudul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai” menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan KSU Sumber Rezeki Kota Binjai tidak sesuai dengan penerapan dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP, karena: (1) KSU Sumber Rezeki Kota Binjai hanya menyusun laporan keuangan berupa neraca, perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. (2) dalam penyusunan akun piutang di neraca, KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun piutang menjadi dua yaitu piutang dan piutang ragu - ragu. Sedangkan menurut SAK ETAP seharusnya penyajian akun piutang dibagi dua yaitu piutang anggota dan piutang non anggota. (3) dalam penyusunan akun pendapatan di laporan perhitungan laporan hasil usaha, KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan jasa pinjaman dan pendapatan unit usaha, sedangkan menurut SAK ETAP seharusnya penyajian akun pendapatan terbagi dua yaitu pendapatan anggota dan pendapatan non anggota.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi karena bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pencatatan laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kesesuaian terhadap SAK ETAP. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau kenyataan, situasi, fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dengan memperkenalkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer yaitu laporan keuangan yang diperoleh

langsung dari Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Menurut (Purba et al., 2021), dokumentasi sebagai pengumpul data dapat berupa bentuk tulisan, gambar-gambar atau karya lain seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian untuk diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang telah disusun.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Singkat Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan PTPN IV

Kebun Bah Jambi

Data utama yang digunakan untuk evaluasi yaitu laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tahun 2020, karena format laporan keuangan tahun sebelumnya sama dengan tahun ini. Laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan. Data ini akan dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam SAK ETAP sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi.

4.2 Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

a. Neraca

Tabel 1

Laporan Neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

KOPERASI KARYAWAN PTPN IV KEBUN BAH JAMBI		
NERACA		
31 DESEMBER 2020		
No. Rkg	Uraian	Jumlah
	AKTIVA	
	Aktiva Lancar	
100	Kas	Rp. 183.274.059
101	Bank	
	1.1 Bank Mandiri Pematangsiantar	Rp. 252.647.067
	1.2 Bank BNI Pematangsiantar	Rp. -
110	Piutang pada anggota atas penjualan barang	Rp. 1.184.302.094
111	Piutang pada PTPN-IV Bah Jambi	Rp. -
113	Piutang lain-lain	Rp. -
120	Piutang simpan pinjam	Rp. 3.487.911.607
121	Piutang kaplingan tanah	Rp. -
190	Biaya dibayar dimuka	(Rp. 1.307.645)
191	Pendapatan yang masih akan diterima	Rp. -
899	Persediaan akhir barang	Rp. 36.511.100
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 5.143.338.282
181	Penyertaan modal	
	Penyertaan pada PUSKOPKAR PTPN-IV	
	- Simpanan pokok	Rp. 1.000.000
	- Simpanan wajib	Rp. 550.000
	- Simpanan sukarela	Rp. -
	Penyertaan lainnya	Rp. -
	Jumlah Penyertaan Modal	Rp. 1.550.000

001	Bangunan		
	- Nilai perolehan	Rp. 7.040.000	
	- Akumulasi penyusutan	Rp. 7.039.999	
	- Penghapusan	Rp. -	Rp. 1
002	Tanah		
	- Nilai perolehan	Rp. 369.510.000	
	- Amortisasi	Rp. -	
	- Penghapusan	Rp. -	Rp. 369.510.000
011	Peralatan kantor		
	- Nilai perolehan	Rp. 5.469.525	
	- Akumulasi penyusutan	Rp. 5.469.524	
	- Penghapusan	Rp. -	Rp. 1
013	Peralatan teratak		
	- Nilai perolehan	Rp. 19.500.000	
	- Akumulasi penyusutan	Rp. 19.499.999	
	- Penghapusan	Rp. -	Rp. 1
014	Peralatan kedai		
	- Nilai perolehan	Rp. 8.650.000	
	- Akumulasi penyusutan	Rp. 8.649.999	
	- Penghapusan	Rp. -	Rp. 1
	Nilai Buku		Rp. 369.510.004
	JUMLAH SELURUH AKTIVA		Rp. 5.514.398.286
	PASIVA		
	Pasiva Lancar		
230	Hutang Niaga		Rp. -
231	Pajak yang masih harus dibayar		Rp. 241.287.624
239	Hutang lain-lain		Rp. -
240	Bagian SHU anggota		Rp. -
241	Dana pembangunan daerah kerja		Rp. 102.918.890
242	Dana pendidikan		Rp. 149.113.780
243	Dana pengurus/pengawas		Rp. -
244	Dana pegawai		Rp. -
245	Dana sosial		Rp. 87.508.723
250	Simpanan sukarela		Rp. 3.036.903.335
291	Biaya yang masih harus dibayar		Rp. -
292	Potongan kantor kedai afdeling		Rp. 100
293	Bagian SHU dari PUSKOPKAR PTPN-IV		Rp. -
	Jumlah Pasiva Lancar		Rp. 3.617.732.452
	Hutang Jangka Panjang		
210	Simpanan khusus anggota		Rp. 6.145.400
211.1	Pinjaman dana pembinaan dari PTPN-IV		Rp. -
211.2	Hutang pada Bank BNI Pematangsiantar		Rp. -
212	Pinjaman lain-lain		Rp. -
	Jumlah Hutang Jangka Panjang		Rp. 6.145.400
	Modal dan Cadangan		
200	Simpanan pokok		Rp. 16.160.000

201	Simpanan wajib	Rp. 554.586.616
202	Dana cadangan	Rp. 749.498.446
204	SHU Tahun 2019 sebelum pajak	Rp. -
	SHU bulan Januari 2020 sebelum pajak	Rp. 570.275.372
	Jumlah Modal dan Cadangan	Rp. 1.890.520.434
	JUMLAH SELURUH PASIVA	Rp. 5.514.398.286

Sumber: Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi (2021)

b. Laporan Hasil Usaha

Tabel 2
Laporan Hasil Usaha Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi
KOPERASI KARYAWAN PTPN IV KEBUN BAH JAMBI
LAPORAN HASIL USAHA
31 DESEMBER 2020

No. Rkg	Uraian	Jumlah
1	Penjualan Barang dan Jasa	
820	Penjualan barang konsumsi/pemasok	Rp. 1.484.125.788
880	Jasa simpan pinjam	Rp. 713.992.844
890	Jasa penjualan	Rp. 191.452.320
893	Pendapatan sewa teratak	Rp. -
894	Pendapatan jasa kaplingan tanah	Rp. -
898	Pendapatan lain-lain:	
	- Pendapatan sewa gedung	Rp. 7.450.000
898.1	- Pendapatan jasa potongan	Rp. 11.180.807
	Jumlah Penjualan Barang dan Jasa	Rp. 2.408.201.759
2	Harga Pokok Penjualan	
	- Persediaan awal	Rp. 58.950.834
	- Pembelian	Rp. 1.528.895.183
	- Persediaan akhir	(Rp. 36.511.100)
	Jumlah Harga Pokok Penjualan	Rp. 1.551.334.917
3	SHU Setelah Dikurangi Harga Pokok (1 – 2)	Rp. 856.866.842
4	Biaya Operasional	
410	Gaji upah/uang makan	Rp. 121.300.000
412	Perjalanan Dinas (SPJ)	Rp. 7.500.000
440	Pajak-pajak	Rp. -
441	Biaya bank	Rp. 432.162
450	Honorarium pengurus/pengawas	Rp. 57.700.000
452	Biaya rapat dan representasi	Rp. 8.549.000
455	Biaya legalisasi	Rp. 6.000.000
456	Biaya audit dan pembinaan	Rp. 500.000
460	Biaya komunikasi (telepon, perangko, dll)	Rp. -
461	Biaya ATK dan pembungkus	Rp. 9.420.000
462	Biaya perbaikan dan perawatan bangunan	Rp. 1.103.000
463	Biaya perbaikan dan perawatan kantor	Rp. 1.435.000
464	Biaya listrik	Rp. 1.012.000
466	Biaya perbaikan dan perawatan teratak	Rp. -
467	Biaya perbaikan dan perawatan peralatan kedai	Rp. 500.000

469	Biaya lain-lain	Rp. 71.916.000
490.1	Biaya penyusutan bangunan	Rp. -
490.2	Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp. -
490.3	Biaya penyusutan peralatan kedai	Rp. -
490.4	Biaya penyusutan peralatan teratak	Rp. -
492.1	Biaya penghapusan bangunan	Rp. -
492.2	Biaya penghapusan peralatan kantor	Rp. -
492.3	Biaya penghapusan peralatan kedai	Rp. --
492.4	Biaya penghapusan peralatan teratak	Rp. -
499.1	Biaya penghapusan piutang simpan pinjam	Rp. -
499.2	Biaya penghapusan piutang kedai	Rp. -
499.3	Biaya penghapusan piutang kaplingan tanah	Rp. -
	Jumlah Biaya Operasional	Rp. 287.358.162
5	Hasil Usaha Setelah Biaya Operasional (3-4)	Rp. 569.508.680
6	Pendapatan (Biaya) Lain-Lain:	
	Pendapatan bunga bank	Rp. 941.689
	Pajak atas bunga bank	Rp. 174.997
	Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	Rp. 766.692
7	Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp. 570.275.372

Sumber: Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 3
Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan
PTPN IV Kebun Bah Jambi

A. Kebijakan Akuntansi	
Kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Koperasi Indonesia.	
1. Laporan keuangan dipersiapkan atas dasar penggunaan biaya historis menggunakan metode FIFO.	
2. Piutang usaha :	
Koperasi tidak melakukan penyisihan untuk piutang ragu-ragu. Piutang akan dihapuskan apabila piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih.	
3. Aktiva tetap :	
Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Apabila aktiva tidak dipakai lagi atau dijual, maka nilai buku aktiva dan akumulasi penyusutan dihapuskan dari laporan keuangan, sedangkan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tersebut diakui dalam perhitungan usaha.	
B. Penjelasan Neraca	
Uraian	Jumlah(Rp)
tiva lancar	XXX
nyertaan modal	XXX
siva lancar	XXX
utang jangka panjang	XXX
bdal dan cadangan	XXX
C. Penjelasan Laporan Perhitungan Hasil Usaha	
Uraian	Jumlah(Rp)
njualan barang dan jasa	XXX
rga pokok penjualan	XXX
IU setelah dikurangi harga pokok	XXX
aya operasional	XXX
sil usaha setelah biaya operasional	XXX
ndapatan (biaya) lain-lain	XXX
sil usaha sebelum pajak	XXX

Sumber: Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dengan Penyusunan Laporan Keuangan Menurut Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

Tabel 4
Perbandingan Penyusunan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dengan Penyusunan Laporan Keuangan Menurut Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi

No	Item yang dibandingkan	SAK ETAP	Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi	Keterangan
A.	Komponen Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan perhitungan hasil usaha 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan	1. Neraca 2. Laporan perhitungan hasil usaha 3. Catatan atas laporan keuangan	Komponen laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sesuai dengan SAK ETAP karena tidak terdapat laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
B.	Neraca			
1.	Dasar Pencatatan	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual.	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual.	Dasar pencatatan neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
2.	Penyajian aset dalam laporan neraca	Pos-pos aset antara lain: a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud	Pos-pos aktiva antara lain: a. Kas dan bank b. Piutang pada anggota atas penjualan barang, piutang pada PTPN IV Bah Jambi, piutang lain-lain, piutang simpan pinjam dan piutang kaplingan tanah. c. Persediaan akhir barang d. Tidak terdapat akun properti investasi e. Bangunan, tanah, peralatan kantor, peralatan teratak, dan peralatan kedai f. Tidak terdapat akun aset tidak berwujud	Penyajian aktiva dalam neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sesuai dengan SAK ETAP karena Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi masih menggunakan istilah aktiva. Selain itu, pada akun aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan setiap pos aktiva tetap sehingga diketahui nilai buku dari masing-masing aktiva tetap untuk tahun berjalan. Namun seharusnya aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan untuk masing-masing pos aktiva tetap, kemudian pada pos akumulasi penyusutan aktiva tetap seharusnya koperasi tidak memisahkan pos akumulasi penyusutan aktiva tetap untuk masing-masing pos aktiva tetap, dan pencatatannya cukup dalam satu pos yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap. Serta penyajian aktiva dalam neraca tidak terdapat akun properti investasi dan akun aset tidak berwujud.
3.	Pengakuan aset	Suatu aset diakui dalam neraca apabila manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal.	Suatu aktiva diakui dalam neraca jika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aktiva dalam laporan neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi juga dapat diukur secara andal.	Pengakuan aset pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
4.	Pengukuran aset	Dasar pengukuran unsur	Dasar pengukuran aktiva	Pengukuran aset pada

		laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah biaya historis dan nilai wajar.	Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi ialah biaya historis dan nilai wajar. Untuk piutang diakui sebesar nilai pinjaman yang diberikan dan untuk aset tetap dicatat sebesar kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut.	Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
5.	Penyajian kewajiban dalam laporan neraca	Kewajiban menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. Utang usaha dan utang lainnya b. Aset dan kewajiban pajak c. Kewajiban diestimasi	Pos-pos pasiva antara lain: a. Hutang niaga, pajak yang masih harus dibayar, hutang lain-lain, bagian SHU anggota, dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan, dana pengurus/ pengawas, dana pegawai, dana sosial, simpanan sukarela, biaya yang masih harus dibayar, potongan kantor kedai afdeling dan bagian SHU dari PUSKOPKAR PTPN-IV. b. Tidak terdapat akun aset dan kewajiban pajak c. Tidak terdapat akun kewajiban diestimasi	Penyajian pasiva dalam neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih menggunakan istilah pasiva dan hutang, sedangkan menurut SAK ETAP penyajian pasiva dalam neraca menggunakan istilah kewajiban dan tidak terdapatnya akun aset dan kewajiban pajak, dan akun kewajiban diestimasi.
6.	Pengakuan kewajiban	Suatu kewajiban diakui dalam neraca apabila pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.	Suatu pasiva diakui dalam neraca jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan pasiva entitas dan jumlahnya dapat diukur secara andal.	Pengakuan pasiva pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
7.	Pengukuran kewajiban	Dasar pengukuran unsur laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah biaya historis dan nilai wajar.	Dasar pengukuran pasiva Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi ialah biaya historis dan nilai wajar. Hutang dicatat sesuai dengan nilai nominal pinjaman.	Pengukuran pasiva pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
8.	Ekuitas	Pos-pos yang terdapat dalam ekuitas yaitu: a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Hibah d. Cadangan e. SHU tahun berjalan	Pos-pos yang terdapat dalam ekuitas yaitu: a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Dana cadangan d. SHU tahun 2019 sebelum pajak e. SHU bulan Januari 2020 sebelum pajak	Penyajian ekuitas dalam laporan neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
9.	Klasifikasi aset dan kewajiban	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.	Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah menyajikan aktiva lancar, penyertaan modal, pasiva lancar dan hutang jangka panjang, terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan.	Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menyajikan klasifikasi aktiva dan pasiva belum sesuai dengan SAK ETAP, karena Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menyajikan klasifikasi aktiva dengan nama “penyertaan modal” di bawah aktiva lancar dan di atas aktiva tetap. Sifat aktiva dalam klasifikasi tersebut tidak disajikan berdasarkan likuiditasnya.
C. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA				
1.	Klasifikasi akun dalam laporan	Pos-pos dalam laporan perhitungan hasil usaha:	Pos-pos dalam laporan perhitungan hasil usaha:	Penyajian laporan hasil usaha pada Koperasi Karyawan

	perhitungan hasil usaha	<p>a. Pendapatan</p> <p>b. Beban keuangan</p> <p>c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas</p> <p>d. Beban pajak</p> <p>e. Laba atau rugi neto</p>	<p>a. Penjualan barang konsumsi/pemasok, jasa simpan pinjam, jasa penjualan, pendapatan sewa teratak, pendapat jasa kaplingan tanah, dan pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan sewa gedung dan pendapatan jasa potongan.</p> <p>b. Biaya operasional: Gaji upah/uang makan, perjalanan dinas (SPJ), pajak-pajak, biaya bank, honorarium pengurus/pengawas, biaya rapat dan representasi, biaya regalisasi, biaya audit dan pembinaan, biaya komunikasi, biaya ATK dan pembungkus, biaya perbaikan dan perawatan bangunan, biaya perbaikan dan peralatan Kantor, biaya listrik, biaya perbaikan dan perawatan teratak, biaya perbaikan dan perawatan peralatan kedai, biaya lain-lain, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya penyusutan peralatankedai, biaya penyusutan peralatanteratak, biaya penghapusan bangunan, biaya penghapusan peralatankantor, biaya penghapusan peralatankedai, biaya penghapusan peralatanteratak, biaya penghapusan piutangsimpan pinjam, biaya penghapusan piutangkedai dan biaya penghapusan piutangkaplingan tanah</p> <p>c. Tidak ada akun bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas</p> <p>d. Tidak adanya beban pajak</p> <p>e. SHU</p>	<p>PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sesuai dengan SAK ETAP karena pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi terdapat istilah biaya penghapusan pada akun biaya operasional, sedangkan menurut SAK ETAP tidak ada istilah biaya penghapusan.</p> <p>da penyajian laporan hasil usaha Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak terdapatnya akun bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas dan akun beban pajak dalam laporan perhitungan hasil usaha.</p>
2.	Pengakuan dan pengukuran pendapatan	Suatu pendapatan diakui dalam laporan perhitungan hasil usaha jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	Pengakuan pendapatan dilakukan saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha dapat diukur secara andal.	Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
3.	Pengakuan dan pengukuran beban	Suatu beban diakui dalam laporan perhitungan hasil usaha jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi, dapat diukur secara andal.	Pengakuan beban dilakukan saat terjadinya transaksi dan dapat diukur secara andal.	Pengakuan dan pengukuran beban pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sudah sesuai dengan SAK ETAP.

D. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.	Informasi yang disajikan	<p>a. Gambaran umum koperasi</p> <p>b. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan</p> <p>c. Kebijakan akuntansi</p> <p>d. Penjelasan yang mendukung pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha</p>	<p>a. Gambaran umum koperasi</p> <p>b. Kebijakan akuntansi</p> <p>c. Penjelasan neraca dan penjelasan laporan perhitungan hasil usaha</p>	<p>Penyajian catatan atas laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sesuai dengan SAK ETAP karena Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak membuat informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan.</p>
----	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data diolah (2021)

PEMBAHASAN

Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan komponen laporan keuangan yang diterapkan dalam SAK ETAP karena kurangnya pengetahuan mengenai standar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK ETAP serta keterbatasan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam membuat laporan keuangan.

Neraca

Neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menyajikan aktiva, pasiva dan ekuitas. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Namun dalam penyajiannya terdapat empat akun yang tidak terdapat dalam neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi yakni akun properti investasi, aset tidak berwujud, aset dan kewajiban pajak dan kewajiban diestimasi karena semua properti milik koperasi dan tidak ada yang merupakan hak dari lesse, tidak memiliki aset tidak berwujud, dan koperasi tidak mengakui kewajiban diestimasi tersebut sebagai kewajiban di neraca dan tidak mengakui jumlah dari kewajiban diestimasi tersebut sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Tidak terdapatnya akun-akun tersebut dalam neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi mengakibatkan neraca yang disajikan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menjadi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang disajikan berdasarkan SAK ETAP. Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen neraca, yaitu:

1. Aktiva (Aset)

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam menyajikan neraca masih menggunakan istilah aktiva, sedangkan yang ditunjukkan oleh SAK ETAP menggunakan istilah aset. Sehingga tidak sesuai dengan istilah dalam SAK ETAP. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menyajikan klasifikasi aktiva berdasarkan aktiva lancar dan penyertaan modal. Ini tidak sesuai dengan (SAK ETAP 4.5, 2016) karena tidak mengklasifikasikan aktiva berdasarkan likuiditasnya akibatnya tidak dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan kepada pengguna laporan keuangan.

Dasar pencatatan aktiva Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menggunakan dasar akrual, dimana aktiva diakui dalam neraca karena manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas. Dalam praktiknya, Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menggunakan dasar pengukuran biaya historis untuk mengukur unsur-unsur laporan keuangan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP.

Aktiva dalam neraca Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi antara lain:

a. Aktiva lancar (Aset Lancar)

Aktiva lancar Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi mencakup pos-pos berikut:

- 1) **Kas.** Kas Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diakui sebagai aktiva. Dalam perlakuan akuntansi Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi, pengakuan dan pengukuran transaksi kas diukur dengan biaya historis, dimana kas pada neraca dicatat sebesar nilai nominalnya.

Pengakuan dan pengukuran kas pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.

- 2) **Bank.** Bank pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambidiakui sebagai aktiva lancar dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran bank pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.
- 3) **Piutang.**Piutang Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diakui sebagai aktiva. Piutang Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diukur dengan biaya historis, dimana piutang pada neraca dicatat sebesar nilai perolehan piutang. Pengakuan dan pengukuran piutang pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.
- 4) **Biaya dibayar dimuka.** Biaya dibayar dimuka Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diakui sebagai aktiva dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran biaya dibayar dimuka pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.
- 5) **Persediaan.**Persediaan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diakui sebagai aktiva dan diukur dengan biaya historis, dimana persediaan dicatat sesuai nilai nominal dari harga beli barang persediaan tersebut. Pengakuan dan pengukuran persediaan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.

b. **Penyertaan modal**

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang. Dalam Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi penyertaan modal terdiri dari penyertaan pada PUSKOPKAR PTPN-IV (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukareladan penyertaan lainnya).

Penyertaan modal Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi diakui sebagai aktiva dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran penyertaan modal pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai SAK ETAP.

- 1) **Aktiva tetap.**Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah memisahkan aktiva tetap berupa bangunan, tanah, peralatan kantor, peralatan teratak dan peralatan kedai. Koperasi Karyawan mencatat aktiva tetap sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan untuk masing-masing aktiva tetap untuk tahun berjalan. Seharusnya aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan untuk masing-masing pos aktiva tetap.
- 2) **Akumulasi penyusutan aktiva tetap.**Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva tetap yang dimilikinya. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi memisahkan pos akumulasi penyusutan aktiva tetap untuk masing-masing pos aktiva tetap, sehingga diketahui nilai buku untuk masing-masing aktiva tetap dalam tahun berjalan. Namun seharusnya koperasi tidak memisahkan pos akumulasi penyusutan aktiva tetap untuk masing-masing pos aktiva tetap, dan pencatatannya cukup dalam satu pos yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap.

2. **Pasiva**

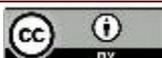
Menurut SAK ETAP, kewajiban menyajikan pos-pos: hutang usaha dan hutang lainnya, aset dan kewajiban pajak dan kewajiban diestimasi. Entitas dapat menyajikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang secara terpisah dalam laporan keuangan.

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam menyajikan neraca masih menggunakan istilah pasiva dan hutang, sedangkan dalam SAK ETAP menggunakan istilah kewajiban. Sehingga istilah yang digunakan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak sesuai dengan istilah dalam SAK ETAP. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam penyajiannya sudah mengklasifikasikan pasiva berdasarkan pasiva dan hutang jangka panjang.

Untuk pengakuan pasiva, Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi mencatat pasiva sesuai harga perolehannya sedangkan dasar pengukurannya adalah biaya historis. Hal ini sesuai dengan (SAK ETAP 2.30, 2016).

3. **Ekuitas**

Ekuitas yang disajikan oleh Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi terdiri dari:



- a) Simpanan pokok. Simpanan pokok pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi sebesar Rp.20.000/orang yang harus dibayar oleh anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib. Pembayaran simpanan wajib Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 5.000,
- c) Dana cadangan

Pos - pos dalam ekuitas tersebut diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Secara keseluruhan penyajian, pengakuan dan pengukuran ekuitas Koperasi karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi adalah sesuai SAK ETAP.

4. Klasifikasi Aset dan Kewajiban

Menurut SAK ETAP, suatu entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah di neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan.

Koperasi telah menyajikan aktiva lancar, penyertaan modal, pasiva lancar dan hutang jangka panjang, terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan. Koperasi menyajikan klasifikasi lain dalam aktiva dengan nama “penyertaan modal” di bawah aktiva lancar dan di atas aktiva tetap. Penggolongan tersebut tidak diklasifikasikan berdasarkan likuiditasnya, sehingga klasifikasi aktiva dan pasiva tidak sesuai dengan SAK ETAP. Akibatnya, Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan untuk pengguna laporan keuangan.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak menyajikan akun bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas karena Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi tidak memiliki transaksi dengan laba rugi dari investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi juga tidak menyajikan akun beban pajak karena Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum menerapkan kewajiban membayar pajak sebagaimana yang telah diwajibkan dalam SAK ETAP.

Tidak terdapatnya akun-akun tersebut mengakibatkan laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi menjadi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam menyajikan laporan perhitungan hasil usaha mencakup:

1. Pendapatan

Pendapatan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah diklasifikasikan dan dicatat sesuai nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi telah sesuai dengan SAK ETAP.

2. Biaya

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam menyajikan laporan perhitungan hasil usaha masih terdapat istilah biaya penghapusan pada akun biaya operasional, sedangkan berdasarkan SAK ETAP tidak ada istilah biaya penghapusan. Hal ini tidak sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi mencatat biaya-biaya tersebut sesuai nilai nominalnya. Hal ini telah sesuai dengan SAK ETAP.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi hanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan gambaran umum koperasi, kebijakan akuntansi yang digunakan koperasi serta penjelasan neraca dan penjelasan laporan perhitungan hasil usaha sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi terdapat beberapa pos yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yaitu tidak terdapatnya akun properti investasi, akun aset tidak berwujud, akun aset dan kewajiban pajak, akun kewajiban diestimasi, akun bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, akun beban pajak dan penyajian catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP. Sehingga penyajian laporan keuangan kurang memberikan informasi yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Muji Sri Sekarwati and Nurul Mazidah. 2018. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG)." 14(1):20–28.
- Fauzi, R., Pramiudi, U., & Djanegara, M. S. (2018). Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 217-226.
- Huvat, Y. J. (2017). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari di Samarinda. *Ekonomia*, 6(1), 9-23.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. 2011. "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik." *Sak Etap* 9(2):174–88.
- Indonesia, Republik. 2012. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian."
- Nurdiansyah, H., & Setiawan, H. (2016). Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada KOPKAR PDAM Tirta Sanita). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 4(2), 075-083.
- Pratiwi, A. A., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2014). Analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, Ahmad Syafii, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik, Valentine Siagian, Ari Muliarta Ginting, Hery Pandapotan Silitonga, Nurma Fitrianna, Arfandi SN, and Revi Ernanda. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Rolos, R. F., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora Pendidikan Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2).
- Sendow, S., Manengkey, J., & Kambey, A. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 25-29.
- Simatupang, Eva Malina and Arlina Pratiwi Purba. 2018. "Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematangsiantar." 3(1):43–48.
- Sinaga, M. H., & Tarigan, W. J. (2021). Implementasi SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan PERMEN KUKM RI NO. 13/PER/M. KUKM/IX/2015. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 11(2), 211-224
- Sinaga, M. H., & Saragih, M. (2021). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KESEHATAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MEKAR SARI PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.36985/accusi.v3i1.492>
- Siagian, R. P., & Pangemanan, S. S. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Singal, R. A., & Pinatik, S. (2015). Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multiguna Abadi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Susanto, S., Zarefar, A., & Ali, F. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 41-50.
- Sekarwati, A. M. S., & Mazidah, N. (2018). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemasan semen gresik (iksg). *INOVASI*, 14(1), 20-28.
- Tarigan, W. J. (2020). PENERAPAN SISTIM AKUNTANSI PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN KAS PADA CU. *BINA KASIH PEMATANGSIANTAR. Jurnal Ilmiah Accusi*, 2(1), 16-27
- Tuti, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(2), 98-107.
- Zainal. 2019. “Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai.” *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)* 3(November):1–9.

**PENERAPAN METODE *ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM* UNTUK
MENINGKATKAN KEAKURATAN PENGHITUNGAN PROFITABILITAS PADA
HOTEL SAPADIA PEMATANGSIANTAR**

¹Jesika M Simamora, Prodi Akuntansi, STIE Mars

e - mail : melinajesika@gmail.com

²Rosintan Sipayung, Prodi Manajemen, STIE Mars

e - mail : rosintansipayung3@gmail.com

³Fandra Dikhi Januardani, Prodi Manajemen, STIE Mars

e -mail : fandradj1801@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan keakuratan penghitungan profitabilitas dengan menggunakan Sistem Biaya Tradisional dan Activity Based Costing System pada Hotel Sapadia Pematangsiantar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif melalui pendekatan kuantitatif yang berupa studi kasus yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh selama tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Sapadia Pematangsiantar masih menggunakan metode tradisional dalam pembebanan biaya overhead untuk perhitungan harga pokok kamar masing-masing kamar sehingga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan sistem tersebut menghasilkan harga pokok kamar yang lebih tinggi (over statement) dan harga pokok yang lebih rendah (under statement) jika dibandingkan dengan penerapan metode Activity Based Costing System (ABC). Sarannya, agar diterapkannya penggunaan Activity Based Costing System dalam pembebanan biaya overhead yang terjadi. Hal ini berimplikasi kepada keakuratan perhitungan harga pokok penjualan masing-masing kamar sehingga pada akhirnya akan menyesuaikan kepada tarif kamar yang tepat dalam menghasilkan pendapatan penjualan kamar

Kata Kunci : Activity Based Costing System, Sistem Biaya Tradisional, Profitabilitas

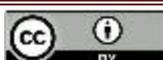
ABSTRACT

This study aims to compare the accuracy of calculating profitability using the Traditional Cost System and Activity Based Costing System at the Sapadia Hotel Pematangsiantar. The analytical method used in this research is descriptive comparative through a quantitative approach in the form of case studies, namely by collecting, processing and interpreting the data obtained during 2017-2020. The results of this study indicate that Hotel Sapadia Pematangsiantar still uses the traditional method of charging overhead costs for calculating the cost of each room so that the consequences of using the system result in a higher cost of the room (over statement) and a lower cost of goods. (under statement) when compared with the application of the Activity Based Costing System (ABC) method. The suggestion is to apply the use of an Activity Based Costing System in assigning overhead costs that occur. This has implications for the accuracy of the calculation of the cost of goods sold for each room so that in the end it will adjust to the right room rate in generating room sales revenue

Keyword : Activity Based Costing System, Traditional Fee System, Profitabilitas

I. Pendahuluan

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tingkat keberhasilan suatu perusahaan seringkali diukur dengan laba yang telah dihasilkan. Rasio profitabilitas (Profitability Ratio) adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas



seperti Gross Profit Margin dan Operating Eficiency Ratio dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan

Dalam sistem akuntansi tradisional, pembebanan biaya produksi dilakukan atas biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan produk. Pembebanan atas biaya tidak langsung dilakukan dengan menggunakan dasar pembebanan secara menyeluruh atau per departemen. Hal ini dapat menimbulkan under costing atau over costing pada produk yang dijual karena tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya dan hal ini akan berpengaruh pada laba perusahaan. Dengan mengubah proses perhitungan biaya dari metode tradisional menjadi Activity Based Costing System, perusahaan dapat melakukan pembebanan biaya lebih efektif dan efisien.

Hal inilah yang mendasari dikembangkannya metode Activity Based Costing System (ABC). Activity Based Costing System merupakan alternatif solusi yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi akuntansi yang relevan dalam pengambilan keputusan untuk menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk/jasa yang dihasilkan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Activity Based Costing System Untuk Meningkatkan Keakuratan Penghitungan Profitabilitas Pada Hotel Sapadia Pematangsiantar”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah : Bagaimana peran metode Activity Based Costing System dalam meningkatkan keakuratan penghitungan profitabilitas di Hotel Sapadia Pematangsiantar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana hasil metode Activity Based Costing System yang diterapkan di Hotel Sapadia Pematangsiantar
2. Mengetahui bagaimana keakuratan perhitungan profitabilitas dengan metode Activity Based Costing System di Hotel Sapadia Pematangsiantar

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan (Hotel Sapadia Pematangsiantar)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi hotel sebagai masukan atau referensi untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu strategi perusahaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan informasi pada periode selanjutnya agar membuat hotel semakin terus berkembang dan maju.

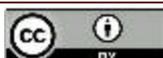
2. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan pengetahuandari pembaca lainnya serta menjadi referensi atau bahkan masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan activity based costing system menurut teori dan kondisi nyata pada penelitian yang akan datang

II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Sulastiyono, 2011), hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan, makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan, dengan membayar sejumlah uang yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima. Menurut AHMA (American Hotel and Motel Associations) (Budi, 2010), hotel adalah suatu tempat dimana disediakan penginapan, makanan, minuman, serta pelayanan lainnya untuk disewakan bagi para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu. Sedangkan menurut (Wiyasha, 2010) “hotel merupakan usaha yang mencari laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya”.

Pengertian Profitabilitas



Pengertian profit adalah hasil dari proses manufacturing yang akan ditawarkan dipasar untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Profitabilitas produk adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan produk barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba bagi perusahaan yang didapat dari selisih harga jual dengan biaya produksi produk barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Menurut (Sirait, 2017), “Profitabilitas atau kemampulabaan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas”

Pengertian profitabilitas dan pengertian produk, dapat disimpulkan bahwa pengertian profitabilitas produk adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan produk barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba bagi perusahaan yang didapat dari selisih harga jual dengan biaya produksi produk barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Bila perusahaan menerapkan metode penghitungan biaya menggunakan metode tradisional dengan perataan biaya atau dengan satu dasar alokasi biaya saja, perusahaan dapat mengalami ketidakakuratan penghitungan biaya produksi yang dapat menyebabkan adanya kekurangan biaya pada produk yang berarti sebuah produk yang sebenarnya membutuhkan biaya sumber daya yang banyak tetapi justru perusahaan menetapkan biaya per unitnya lebih rendah dari yang seharusnya.

Rasio Profitabilitas

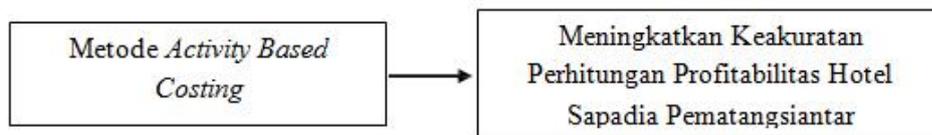
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini juga menunjukkan efisiensi perusahaan.

Adapun fungsi dari Rasio Profitabilitas adalah :

- 1) Mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu.
- 2) Membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas.
- 5) Mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 6) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 7) Mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dari Penelitian ini adalah :



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variable yang lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara varabel yang satu dengan yang lain. Desain penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Desain penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah).

Menurut (Sugiyono, 2017:14), menyatakan bahwa ada 2 jenis desain penelitian, yaitu:

- 1) Penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka
- 2) Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan Kuantitatif yang akan diperoleh langsung dari perusahaan.

Populasi dan Sampel

Data primer serta data dari buku - buku dan literature yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Serta data sekunder, berupa laporan keuangan komparatif yang bersumber langsung dari Hotel Sapadia Pematangsiantar dan sejarah perusahaan serta struktur organisasi yang bersumber dari Hotel Sapadia Pematangsiantar.

Prosedure Pengumpulan Data

Adapun Prosedure dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Dokumentasi
3. Studi Pengamatan

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis deskriptif komparatif yang berupa studi kasus yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017), “Penelitian deskriptif adalah peneltian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)”. Gambaran dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Hotel Sapadia Pematangsiantar dengan menggunakan laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan arus kas dan laporan laba rugi sebagai dasar untuk penerapan metode activity based costing untuk meningkatkan keakuratan penghitungan profitabilitas selama tahun 2017 – 2020.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok kamar merupakan biaya- biaya yang terjadi pada bagian atau unit penghasil jasa maupun biaya hasil alokasi dari bagian atau unit yang bersifat umum. Biaya-biaya dari bagian atau unit yang sifatnya umum ini proses pembebanannya dilakukan dengan cara alokasi. Besarnya alokasi biaya - biaya tersebut didasarkan berdasarkan kontribusi pendapatan masing- masing bagian atau unit penghasilan jasa kamar terhadap pendapatan total jasa kamar hotel. Terdapat beberapa tipe kamar yang tersedia di Hotel Sapadia Pematangsiantar. Yakni tipe kamar executive dengan fasilitas kamar berupa springbed, sofa, meja, kursi, TV Lcd, kulkas kecil, lemari, dan standing shower. Tipe kamar Junior deluxe dengan fasilitas berupa springbed, sofa, meja, kursi, TV Lcd, kulkas kecil, lemari, dan standing shower. Tipe kamar deluxe executive dengan fasilitas kamar berupa springbed, sofa, meja, kursi, TV Lcd, kulkas kecil, lemari, standing shower, dan balcony. Tipe kamar deluxe suite dengan fasilitas kamar berupa berupa springbed, sofa, meja, kursi, TV Lcd, kulkas kecil, lemari, standing shower, dan balcony. Tabel 1 menyajikan data terkait jenis kamar, jumlah kamar, dan tarif per kamar hotel Sapadia Pematangsiantar

Tabel 1
Tipe Kamar, Jumlah dan Rate

No	Tipe Kamar (1)	Jlh (2)	Tarif (Rp) (3)	Target Hunian/ Tahun (4) (1) x 360
1	<i>Executive</i>	48	875.000	1.780
2	<i>Junior Deluxe</i>	9	650.000	3.240
3	<i>Deluxe Executive</i>	9	775.000	3.240
4	<i>Deluxe Suite</i>	1	1.575.000	360

Sumber: Hotel Sapadia

Tabel 4.1 diatas memperlihatkan jumlah kamar yang tersedia dalam satu tahun yang diharapkan dicapai oleh hotel Sapadia Pematangsiantar yang juga digunakan untuk tujuan perhitungan occupancy rate. Occupancy rate merupakan persentase tingkat hunian real terjual terhadap target tahunan masing - masing kamar. Tabel 2 menyajikan occupancy rate hotel Sapadia untuk setiap tingkatan tipe kamar

Tabel 2
Occupancy Rate Hotel Sapadia Tahun 2017 – 2020

No	Tipe Kamar	Jumlah Penginapan Terjual (1)	Jumlah Penginapan Tersedia (2)	Occupancy Rate (1) : (2) x 100
Tahun 2017				
1	Executive	3.600	17.280	21%
2	Junior Deluxe	720	3.240	22%
3	Executive Deluxe	720	3.240	22%
4	Deluxe Suite	150	360	42%
	Jumlah	5.190	24.120	22%
Tahun 2018				
1	Executive	3.600	17.280	21%
2	Junior Deluxe	1.080	3.240	33%
3	Executive Deluxe	720	3.240	22%
4	Deluxe Suite	162	360	45%
	Jumlah	5.562	24.120	23%
Tahun 2019				
1	Executive	4.680	17.280	27%
2	Junior Deluxe	1.080	3.240	33%
3	Executive Deluxe	1.080	3.240	33%
4	Deluxe Suite	145	360	40%
	Jumlah	6.985	24.120	29%
Tahun 2020				
1	Executive	4.320	17.280	25%
2	Junior Deluxe	1.080	3.240	33%
3	Executive Deluxe	720	3.240	22%
4	Deluxe Suite	189	360	53%
	Jumlah	6.309	24.120	26%

Sumber : Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa pencapaian target untuk masing- masing kamar belum terpenuhi. Namun dapat dilihat bahwa persentase occupancy yang meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Ini memperlihatkan peningkatan permintaan terhadap jasa hunian kamar secara global di hotel Sapadia, kendati pun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Informasi dari tabel 1 dan tabel 2 dijadikan dasar untuk memperoleh informasi terkait pendapatan yang diperoleh hotel dari penjualan jasa kamar.

Tabel 3
Pendapatan Penjualan Jasa Kamar Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

No	Tipe Kamar	Penginapan Terjual (1)	Rate (Rp) (2)	Pendapatan (Rp) (1) x (2)
Tahun 2017				
1	Executive	3.600	875.000	3.150.000.000
2	Junior Deluxe	720	650.000	468.000.000
3	Executive Deluxe	720	775.000	558.000.000
4	Deluxe Suite	150	1.575.000	315.000.000
	Jumlah	5.190		4.491.000.000
Tahun 2018				
1	Executive	3.600	875.000	3.150.000.000
2	Junior Deluxe	1.080	650.000	702.000.000
3	Executive Deluxe	720	775.000	558.000.000
4	Deluxe Suite	162	1.575.000	348.075.000
	Jumlah	5.562		4.758.075.000
Tahun 2019				
1	Executive	4.680	875.000	4.095.000.000
2	Junior Deluxe	1.080	650.000	702.000.000
3	Executive Deluxe	1.080	775.000	837.000.000
4	Deluxe Suite	145	1.575.000	315.000.000
	Jumlah	6.985		5.949.000.000
Tahun 2020				
1	Executive	4.320	875.000	3.780.000.000
2	Junior Deluxe	1.080	650.000	702.000.000
3	Executive Deluxe	720	775.000	558.000.000
4	Deluxe Suite	189	1.575.000	366.975.000
	Jumlah	6.309		5.406.975.000

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Tabel di atas selanjutnya dijadikan dasar perhitungan persentase alokasi pendapatan terhadap masing-masing tipe kamar, seperti yang disajikan dalam tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
Alokasi Persentase Pendapatan Penjualan

No	Tipe Kamar	Pendapatan (1)	Total (2)	% Pendapatan (1) : (2) x 100
3	Executive Deluxe	558.000.000		12%
4	Deluxe Suite	348.075.000		7%
	Jumlah	4.758.075.000		100%
Tahun 2019				
1	Executive	4.095.000.000	5.949.000.000	69%
2	Junior Deluxe	702.000.000		12%
3	Executive Deluxe	837.000.000		14%
4	Deluxe Suite	315.000.000		5%
	Jumlah	5.949.000.000		100%
Tahun 2020				
1	Executive	3.780.000.000		70%

2	Junior Deluxe	702.000.000	5.406.975.000	13%
3	Executive Deluxe	558.000.000		10%
4	Deluxe Suite	366.975.000		7%
	Jumlah	5.406.975.000		100%

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Hasil perhitungan tersebut dalam analisa selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan pengeluaran biaya-biaya dasar alokasi pendapatan. Alokasi berdasarkan pendapatan adalah biaya yang didasarkan pada besarnya persentase terhadap jenis kamar penginapan terhadap total pendapatan suatu jenis kamar penginapan. Jadi, setiap jenis kamar penginapan akan menanggung beban biaya aktivitas jasa (tarif sewa kamar penginapan) sebesar nilai persentase yang diperoleh kamar penginapan itu sendiri terhadap perolehan pendapatan jasa kamar penginapan secara keseluruhan

Perhitungan Harga Pokok Penjualan Jasa Kamar Hotel Sapadia Dengan Metode Tradisional

Dalam menentukan harga pokok kamarnya, Hotel Sapadia menggunakan metode harga pokok full cost (biaya penuh). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk harga pokok kamar dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Penentuan harga pokok diawali dengan penentuan total biaya dalam satu tahun. Biaya langsung merupakan biaya yang dianggap dapat ditelusuri secara langsung kepada setiap jenis kamar. Sedangkan biaya tidak langsung atau disebut dengan biaya overhead merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada masing-masing tipe kamar

Tabel 5
Rincian Biaya Langsung Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

No	Tipe Kamar	Pendapatan (1)	Total (2)	% Pendapatan (1) : (2) x 100
Tahun 2017				
1	Executive	3.150.000.000	4.491.000.000	70%
2	Junior Deluxe	468.000.000		10%
3	Executive Deluxe	558.000.000		12%
4	Deluxe Suite	315.000.000		7%
	Jumlah	4.491.000.000		100%
Tahun 2018				
1	Executive	3.150.000.000	4.758.075.000	66%
2	Junior Deluxe	702.000.000		15%

No	Jenis Biaya	Tipe Kamar			
		Executive	Junior Deluxe	Executive deluxe	Deluxe suite
Tahun 2017 (Rp)					
1	Food & Beverage	275.377.186	44.790.265	36.910.496	58.061.455
2	House Keeping	159.091.738	25.000.130	21.212.232	29.015.303
3	Room Equipment	26.988.270	3.376.626	3.568.339	4.452.694
Tipe Kamar					
No	Jenis Biaya	Executive	Junior Deluxe	Executive deluxe	Deluxe suite
4	News Paper	2.228.466	403.753	285.444	538.337
	Jumlah (Rp)	463.685.660	73.570.774	61.976.511	92.067.788

Tahun 2018 (Rp)					
1	Food & Beverage	343.159.633	53.925.085	45.754.618	62.585.781
2	House Keeping	164.744.622	20.611.953	21.782.229	27.180.598
3	Room Equipment	16.688.024	3.023.532	2.137.567	4.031.377
4	News Paper	2.417.071	415.903	286.199	440.828
	Jumlah (Rp)	527.009.350	77.976.474	69.960.613	94.238.582
Tahun 2019 (Rp)					
1	Food & Beverage	475.631.706	59.508.458	62.887.144	78.472.692
2	House Keeping	208.999.275	37.866.442	26.770.694	50.488.589
3	Room Equipment	28.365.782	3.548.973	3.750.471	4.679.964
4	News Paper	2.502.955	313.156	330.936	412.953
	Jumlah (Rp)	715.499.718	101.237.029	93.739.244	134.054.198
Tahun 2020 (Rp)					
1	Food & Beverage	396.844.246	71.900.151	50.831.735	95.866.868
2	House Keeping	208.999.275	37.866.442	26.770.694	50.488.589
3	Room Equipment	14.379.644	2.605.301	1.841.887	3.473.734
4	News Paper	2.711.429	491.256	347.307	655.008
	Jumlah (Rp)	622.934.594	112.863.150	79.791.622	150.484.200

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Total biaya langsung tahun 2017 adalah sebesar Rp. 691.300.733,-, tahun 2018 sebesar Rp769.185.018,-, tahun 2019 sebesar Rp1.044.530.190,-, dan tahun 2020 sebesar Rp.966.073.566,-. Sedangkan untuk biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh manajemen hotel dapat dilihat pada tabel 5. Dari tabel 4.5 diketahui bahwa total biaya tidak langsung untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp3.008.042.884,-, tahun 2018 sebesar Rp3.000.739.178,-, tahun 2019 sebesar Rp3.170.433.077,- dan tahun 2020 sebesar Rp3.268.814.685,-. Total biaya ini berfluktuasi setiap tahunnya dengan mengalami peningkatan. Biaya-biaya tersebut merupakan over head cost dalam hubungannya dengan jasa penjualan masing - masing tipe kamar yang pembebanannya ke masing - masing tipe kamar berdasarkan alokasi persentase pendapatan.

Tabel 6
Biaya Tidak Langsung Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

Biaya	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Gaji Front Office	148.194.618	156.000.450	147.190.340	175.887.090
Adm & General	332.290.570	450.900.550	390.776.070	540.700.233
Sales & Marketing	70.394.656	65.900.665	87.540.000	54.775.000
Human Resources	315.846.147	320.900.130	298.700.344	376.500.554
Pomoc	189.428.530	134.500.727	156.907.050	145.444.900
Directors	191.655.000	191.655.000	220.950.000	222.700.000
Biaya Asuransi	62.857.688	62.857.688	62.857.688	62.857.688

Biaya	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Perawatan Bangunan	84.300.972	70.600.840	39.600.000	50.890.000
Perawatan Kendaraan	35.770.000	20.100.000	18.700.000	42.700.500
Listrik dan Air	751.885.393	650.887.200	878.000.900	756.790.000
Pengantaran Tamu	5.760.000	6.700.000	4.500.000	5.600.000
Seragam Karyawan	7.472.000	8.900.000	6.590.000	7.100.000

<i>Cleaning Supplies</i>	18.003.339	22.500.900	17.899.000	21.600.900
<i>Breakfast</i>	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883
<i>Loundry</i>	5.143.153	5.690.067	6.440.500	5.998.660
<i>Quest Supply</i>	2.500.000	1.900.000	2.720.000	2.456.000
Penyusutan	260.376.545	260.376.545	282.290.545	292.889.673
Bunga bank	127.383.660	127.383.660	127.383.660	127.383.660
Properti Tax	100.083.980	100.083.980	100.083.980	100.083.980
Total (Rp)	3.008.042.884	3.000.739.178	3.170.433.077	3.268.814.685

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Harga Pokok Penjualan Kamar Metode Tradisional

Untuk mengalokasikan biaya yang bersifat tidak langsung kepada masing- masing tipe kamar dilakukan dengan cara alokasi untuk memperoleh harga pokok masing- masing tipe kamar

Tabel 7

Total Biaya Langsung dan Tidak Langsung Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

Tahun	Biaya Langsung (Rp) (1)	Biaya Tidak Langsung (Rp) (2)	Total Biaya (Rp) (1) + (2)
2017	691.300.733	3.008.042.884	3.699.342.617
2018	769.185.018	3.000.739.178	3.769.924.196
2019	1.044.530.190	3.170.433.077	4.214.963.267
2020	966.073.566	3.268.814.685	4.234.888.251

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Alokasi biaya tidak langsung tertinggi untuk masing-masing tipe kamar setiap tahunnya selalu didominasi oleh tipe kamar eksekutif yakni sebesar 70% tahun 2017, 66% tahun 2018, 70% tahun 2019 dan 70% pada tahun 2020. Hal ini dapat dijelaskan sebagai dampak dari lebih banyaknya jumlah unit kamar terjual yang berdampak kepada hasil pendapatan yang dihasilkan oleh tipe kamar ini. Demikian sebaliknya yang terjadi pada tipe kamar deluxe suite

Tabel 8

Harga Pokok Setiap Tipe Kamar Tahun 2017 – 2020

Elemen Biaya	Tipe Kamar			
	Executive	Junior Deluxe	Deluxe Executive	Deluxe Exuite
Tahun 2017 (Rp)				
Biaya Langsung	463.685.660	73.570.774	61.975.511	92.067.788
Biaya Tidak langsung				
70% x Rp3.008.042.884	2.109.849.718			
10% x Rp3.008.042.884		313.463.387		
12% x Rp3.008.042.884			373.744.807	
7% x Rp3.008.042.884				210.084.072
Total Biaya	2.573.535.378	387.034.161	435.720.318	303.052.760
Unit Terjual	3600	720	720	200
Harga Pokok/ Unit	714.871	537.547	605.167	1.515.264
Tahun 2018 (Rp)				
Biaya Langsung	527.009.350	77.976.474	66.960.613	94.238.582

Biaya Tidak langsung 66% x Rp3.000.739.178 15% x Rp3.000.739.178 12% x Rp3.000.739.178 7% x Rp3.000.739.178	1.968.586.679		442.725.031		
				351.909.640	210.517.828
Total Biaya	2.513.596.029	520.701.505	421.870.253	421.870.253	313.756.410
Unit Terjual	3600	1080	720	720	221
Harga Pokok/ Unit	698.221	482.131	585.931	585.931	1.419.712
Tahun 2019 (Rp)					
Biaya Langsung	715.499.718	101.237.029	93.739.244		134.054.198
Biaya Tidak langsung 70% x Rp3.170.433.077 10% x Rp3.170.433.077 12% x Rp3.170.433.077 7% x Rp3.170.433.077	2.182.370.726		374.120.696		
				446.066.984	167.874.671
Total Biaya	2.897.870.444	475.357.725	539.806.228	539.806.228	301.928.869
Unit Terjual	4680	1080	1080	1080	200
Harga Pokok/ Unit	619.203	440.146	499.821	499.821	1.509.644
Tahun 2020 (Rp)					
Biaya Langsung	622.934.594	112.863.150	79.791.622		150.484.200
Biaya Tidak langsung 70% x Rp3.268.814.685 10% x Rp3.268.814.685 12% x Rp3.268.814.685 7% x Rp3.268.814.685	2.285.218.539		424.397.729		
				337.341.784	221.856.622
Total Biaya	2.908.153.133	537.260.879	417.133.406	417.133.406	372.340.833
Unit Terjual	4320	1080	720	720	322
Harga Pokok/ Unit	673.184	497.464	579.352	579.352	1.598.029

Sumber: Diolah Penulis

Rasio Profitabilitas Hotel Sapadia Pematangsiantar

Gross Profit Margin merupakan rasi yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan sebelum dikurangi dengan dengan biaya operasional. Dalam arti, rasio GPM mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor (gross profit). Semakin tinggi hasil dari rasio ini, maka semakin baik pula kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba kotor dan mengelola biaya. Rumus untuk rasio ini adalah:

$$GPM = \frac{\text{Sales} - \text{Cost Of Good sold}}{\text{Sales}} \times 100$$

Informasi penjualan, harga pokok, laba kotor, dan Gross Profit margin Ratio tahun 2016-2019 dari Hotel Sapadia adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Gross Profit Margin Hotel Sapadia Tahun 2017 - 2020

Tahun	Penjualan Kamar	Harga Pokok	Laba Kotor	GPM
2017	4.491.000.000	1.939.110.254	2.551.889.746	57%
2018	4.758.075.000	2.089.043.540	2.669.032.460	56%
2019	5.949.000.000	2.346.593.994	3.602.406.006	61%
2020	5.406.975.000	2.482.081.343	2.924.893.657	54%

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa GPM hotel Sapadia pada tahun 2017 adalah sebesar 57%, tahun 2018 sebesar 56%, tahun 2019 sebesar 61%, tahun 2020 sebesar 54%. Kenaikan biaya dan penurunan penjualan merupakan faktor utama penurunan dari GPM

Operating Efficiency Ratio (OER)

Rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah hotel dalam mengukur biaya operasi untuk setiap penjualannya untuk periode tertentu yang dimana semakin kecil tinggi dari OER maka akan semakin baik kinerja dari sebuah hotel tersebut. Rumus untuk rasio ini adalah:

$$OER = \frac{Gross\ Profit - Operational\ Cost}{Sales} \times 100$$

Informasi laba kotor, biaya operasi, Laba operasi, penjualan dan Operating Efficiency Ratio tahun 2017-2020 dari Hotel Sapadia adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Operating Efficiency Ratio Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

Tahun	Laba Operasi	Penjualan	OER
2017	1.019.124.023	4.491.000.000	23%
2018	1.215.618.444	4.758.075.000	26%
2019	1.961.504.373	5.949.000.000	33%
2020	1.399.554.389	5.406.975.000	26%

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa OER hotel Sapadia pada tahun 2017 adalah sebesar 23%, tahun 2018 sebesar 26%, tahun 2019 sebesar 33%, dan tahun 2020 sebesar 26%

Perhitungan Harga Pokok Kamar Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC) System

Dalam penentuan harga pokok kamar di hotel Sapadia Pematangsiantar dengan metode ABC, penulis menerapkan dua prosedur analisis. Dimana tahap pertama berupa (1) Identifikasi/analisis aktivitas overhead (2) Pembebanan biaya sumber daya kepada masing- masing aktivitas (3) Pengelompokan aktivitas sejenis untuk membentuk kelompok biaya aktivitas sejenis (cost pool) (4) Penentuan pemicu biaya (cost driver) penjumlahan biaya aktivitas sejenis untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis (homogeneous cost pool) (5) Menghitung tarif kelompok (pool rate). Sedangkan prosedur tahap kedua berupa pembebanan biaya overhead kepada masing- masing tipe kamar

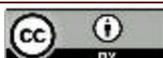
Prosedure Tahap Pertama (Mengidentifikasi Aktivitas Overhead)

Aktivitas-aktivitas yang terpilih merupakan aktivitas yang memiliki nilai tambah (value added). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan manajemen hotel, maka diidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terdapat di Hotel Sapadia Pematangsiantar

- 1) Aktivitas Penginapan
- 2) Aktivitas Breakfast
- 3) Aktivitas Laundry
- 4) Aktivitas Penggunaan Energi
- 5) Aktivitas Pemasaran
- 6) Aktivitas Pemeliharaan
- 7) Aktivitas Penyusutan
- 8) Aktivitas Penggajian
- 9) Aktivitas Keadministrasian

Tabel 11
Identifikasi Aktivitas Hotel Sapadia

No	Aktivitas	Sub Aktivitas
----	-----------	---------------



1	Penginapan	<i>Quest Supply</i> <i>Cleaning Supplies</i> Pengantaran Tamu
2	<i>Breakfast</i>	Sarapan Pagi (<i>breakfast</i>)
3	Laundry	<i>Laundry Linen</i>
4	Penggunaan Energy	Listrik Air
5	Pemasaran	<i>Sales & Marketing</i>
6	Pemeliharaan	Bangunan Kendaraan
7	Penyusutan	Bangunan Kendaraan <i>Furniture Glasware</i> Alat Elektronik Alat Non Elektronik
8	Penggajian	<i>Front Office</i> <i>Human Resources</i> <i>Directors</i> <i>Pomec</i> <i>Admin & General</i> Seragam karyawan
9	Administrasi	Asuransi Property Tax Bunga Bank

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Pada tahap ini biaya-biaya dari setiap aktivitas overhead dikaitkan dengan biaya masing-masing aktivitas :

Tabel 12
Biaya Aktivitas Overhead Tahun 2017-2020
(Dalam Rupiah)

Aktivitas	Jenis Aktivitas	2017	2018	2019	2020
Penginapan	<i>Quest Supply</i>	2.500.000	1.900.000	2.720.000	2.456.000
	<i>Cleaning Supplies</i>	18.003.339	22.500.900	17.899.000	21.600.900
	Pengantaran Tamu	5.760.000	6.700.000	4.500.000	5.600.000
<i>Breakfast</i>	Sarapan Pagi (<i>breakfast</i>)	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883
Laundry	<i>Laundry Linen</i>	5.143.153	5.690.067	6.440.500	5.998.660
Energy	Listrik & Air	751.885.393	650.887.200	878.000.900	756.790.000
Pemasaran	<i>Sales & Marketing</i>	70.394.656	65.900.665	87.540.000	54.775.000
Pemeliharaan	Bangunan	84.300.972	70.600.840	39.600.000	50.890.000
	Kendaraan	35.770.000	20.100.000	18.700.000	42.700.500
	Bangunan	44.301.936	44.301.936	44.301.936	44.301.936

Penyusutan	Kendaraan	45.301.248	45.301.248	45.301.248	55.900.340
	<i>Furniture</i>	28.829.000	28.829.000	28.829.000	28.829.000
	<i>Glasware</i>	240.000	240.000	240.000	240.000
	Alat Elektronik	121.986.000	121.986.000	143.900.000	143.900.000
	Alat Non Elektronik	19.718.361	19.718.361	19.718.361	19.718.361
Penggajian	<i>Front Office</i>	148.194.618	156.000.450	147.190.340	175.887.090
	<i>Human Resources</i>	315.846.147	320.900.130	298.700.344	376.500.554
	<i>Pomec</i>	189.428.530	134.500.727	156.907.050	145.444.900
	<i>Directors</i>	191.655.000	191.655.000	220.950.000	222.700.000
	<i>Admin & General</i>	332.290.570	450.900.550	390.776.070	540.700.233
	Seragam Karyawan	7.472.000	8.900.000	6.590.000	7.100.000
Administrasi	Asuransi	62.857.688	62.857.688	62.857.688	62.857.688
	Property Tax	100.083.980	100.083.980	100.083.980	100.083.980
	Bunga bank	127.383.660	127.383.660	127.383.660	127.383.660

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Pembentukan Aktivitas Sejenis Untuk Membentuk Kumpulan Biaya Sejenis (Cost Pool)

Tabel 13

Pengelompokan Aktivitas Sejenis Hotel Sapadia

Aktivitas	Jenis Aktivitas	Level Aktivitas
Penginapan	<i>Quest Supply</i>	<i>Unit-Level Activity</i>
	<i>Cleaning Supplies</i>	<i>Unit-Level Activiy</i>
	Pengantaran Tamu	<i>Unit- Level Activity</i>
<i>Breakfast</i>	Sarapan Pagi (<i>breakfast</i>)	<i>Unit- Level Activity</i>
Laundry	<i>Laundry Linen</i>	<i>Unit- Level Activity</i>
Penggunaan Energy	Listrik& Air	<i>Unit- Level Activity</i>
Pemasaran	<i>Sales & Marketing</i>	<i>Product- Sustaining Activity</i>
Pemeliharaan	Bangunan	<i>Fasilitas- Sustaining Activity</i>
	Kendaraan	<i>Fasilitas – Sustaining Activity</i>
Penyusutan	Bangunan	<i>Fasilitas- Sustaining Activity</i>
	Kendaraan	<i>Fasilitas- Sustaining Activity</i>
	<i>Furniture</i>	<i>Fasilitas – Sustaining Activity</i>
	<i>Glasware</i>	<i>Fasilitas- Sustaining Activity</i>
	Alat Elektronik	<i>Fasilitas – Sustaining Activity</i>
	Alat Non Elektronik	<i>Fasilitas- Sustaining Activity</i>
	<i>Front Office</i>	<i>Unit-Level Activity</i>

Penggajian	<i>Human Resources</i>	<i>Unit-Level Activiy</i>
	<i>Directors</i>	<i>Unit- Level Activity</i>
	<i>Pomec</i>	<i>Unit Level Activity</i>
	<i>Admin & General</i>	<i>Unit- Level Activity</i>
Administrasi	Seragam Karyawan	<i>Unit- Level Activity</i>
	Asuransi	<i>Unit- Level Activity</i>
	Property Tax	<i>Unit- Level Activity</i>
	Bunga Bank	<i>Unit- Level Activity</i>

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Biaya Aktifitas Dijumlahkan Untuk Mendefinisikan Kelompok Biaya Sejenis (Homogeneous Cost Pool) dan Pembentukan Cost Driver

Tabel 14
Biaya Aktivitas Sejenis Tahun 2017-2020 (Dalam Rupiah)

Tingkat Aktivitas	Sub Aktivitas	Biaya			
		2017	2018	2019	2020
<i>Unit-Level Activities</i>	<i>Quest Supply</i>	2.500.000	1.900.000	2.720.000	2.456.000
	<i>Cleaning Supplies</i>	18.003.339	22.500.900	17.899.000	21.600.900

Tingkat Aktivitas	Sub Aktivitas	Biaya			
		2017	2018	2019	2020
<i>(Cost Pool I)</i>	Pengantaran Tamu	5.760.000	6.700.000	4.500.000	5.600.000
	<i>Laundry Linen</i>	5.143.153	5.690.067	6.440.500	5.998.660
	Listrik & Air	751.885.393	650.887.200	878.000.900	756.790.000
	Asuransi	62.857.688	62.857.688	62.857.688	62.857.688
	Property & Tax	100.083.980	100.083.980	100.083.980	100.083.980
	Bunga Bank	127.383.660	127.383.660	127.383.660	127.383.660
	Total	1.144.011.869	1.043.904.160	1.287.425.728	1.137.545.888
<i>Unit-Level Activities (Cost Pool II)</i>	<i>Sarapan Pagi (breakfast)</i>	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883
	Total	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883

<i>Unit-Level Activities (Cost Pool III)</i>	<i>Front Office</i>	148.194.618	156.000.450	147.190.340	175.887.090
	<i>Human Resources</i>	315.846.147	320.900.130	298.700.344	376.500.554
	<i>Directors</i>	191.655.000	191.655.000	220.950.000	222.700.000
	<i>Pomec</i>	189.428.530	134.500.727	156.907.050	145.444.900
	<i>Admin & General</i>	332.290.570	450.900.550	390.776.070	540.700.233
	Seragam karyawan	7.472.000	8.900.000	6.590.000	7.100.000
	Total	1.184.886.865	1.262.856.857	1.221.113.804	1.468.332.777
<i>Facilities-Sustaining (Cost Pool IV)</i>	Bangunan	84.300.972	70.600.840	39.600.000	50.890.000
	Kendaraan	35.770.000	20.100.000	18.700.000	42.700.500
	Bangunan	44.301.936	44.301.936	44.301.936	44.301.936
	Kendaraan	45.301.248	45.301.248	45.301.248	55.900.340
	<i>Furniture</i>	28.829.000	28.829.000	28.829.000	28.829.000
	<i>Glasware</i>	240.000	240.000	240.000	240.000
Tingkat Aktivitas	Sub Aktivitas	Biaya			
		2017	2018	2019	2020
	Alat Elektronik	121.986.000	121.986.000	143.900.000	143.900.000
	Alat Non Elektronik	19.718.361	19.718.361	19.718.361	19.718.361
	Total	380.447.517	351.077385	340.590.545	386.480.137

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Tabel 15
Informasi Pemicu Biaya (Cost driver) Tahun 2017-2020
(Dalam Rupiah)

Pemicu Biaya	Tipe Kamar				Total
	Executive	Junior Deluxe	Deluxe Executive	Deluxe Exuite	
Tahun 2017					
<i>Cost Pool 1</i> Unit Kamar Terjual	3.600	720	720	200	5.190 Kamar
<i>Cost Pool 2</i> Jumlah Tamu Menginap	3.320	540	445	700	5.005 Orang
<i>Cost Pool 3</i> Jumlah Jam Karyawan	112.655	21.123	21.123	2.347	157.248 Jam
<i>Cost Pool 4</i> Luas Lantai	1.616	276	251	69	2.213 M ²
Tahun 2018					

Cost Pool 1					
Unit Kamar Terjual	3.600	1.080	720	162	5.562 Kamar
Cost Pool 2					
Jumlah Tamu Menginap	4.200	660	560	766	6.186 Orang
Cost Pool 3					
Jumlah Jam Karyawan	112.655	21.123	21.123	2.347	157.248 Jam
Cost Pool 4					
Luas Lantai	1.616	276	251	69	2.213 M ²
Tahun 2019					
Cost Pool 1					
Unit Kamar Terjual	4.680	1.080	1.080	145	6.985 Kamar
Cost Pool 2					
Jumlah Tamu Menginap	4.364	546	577	720	6.207 Orang
Cost Pool 3					
Jumlah Jam Karyawan	112.655	21.123	21.123	2.347	157.248 Jam
Cost Pool 4					
Luas Lantai	1.616	276	251	69	2.213 M ²
Tahun 2020					
Cost Pool 1					
Unit Kamar Terjual	4.320	1.080	720	189	6.309 Kamar
Cost Pool 2					
Jumlah Tamu Menginap	3.560	645	456	860	5.521 Orang
Cost Pool 3					
Jumlah Jam Karyawan	112.655	21.123	21.123	2.347	157.248 Jam
Cost Pool 4					
Luas Lantai	1.616	276	251	69	2.213 M ²

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Menghitung Kelompok Tarif (Pool Rate)

Setelah mengidentifikasi cost driver, langkah selanjutnya menentukan tarif per unit cost driver karena setiap kelompok aktivitas (cost pool) memiliki cost driver dengan cara membagi jumlah biaya dengan cost driver. Tarif per unit cost driver dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif per unit cost driver} = \frac{\text{Total cost pool}}{\text{Total cost driver}}$$

Tabel 16
Tarif Cost Driver Per Unit Tahun 2017-2020
 (Dalam Rupiah)

Sub Aktivitas		Biay			
		2017	2018	2019	2020
Cost Pool I					
Quest Supply	(Rp)	2.500.000	1.900.000	2.720.000	2.456.000
Cleaning Supplies	(Rp)	18.003.339	22.500.900	17.899.000	21.600.900
Pengantaran tamu	(Rp)	5.760.000	6.700.000	4.500.000	5.600.000
Laundry Linen	(Rp)	5.143.153	5.690.067	6.440.500	5.998.660
Listrik & Air	(Rp)	751.885.393	650.887.200	878.000.900	756.790.000
Asuransi	(Rp)	62.857.688	62.857.688	62.857.688	62.857.688
Property & Tax	(Rp)	100.083.980	100.083.980	100.083.980	100.083.980
Bunga Bank	(Rp)	127.383.660	127.383.660	127.383.660	127.383.660

<i>Sales & Marketing</i>	(Rp)	70.394.656	65.900.665	87.540.000	54.775.000
Juml	(Rp)	1.144.011.869	1.043.904.160	1.287.425.728	1.137.545.888
Kamar Terjual	(Unit)	5.190	5.562	6.985	6.309
if Cost Driver	(Rp)	220.426	187.685	184.313	180.305
<i>Cost Pool II Sarapan Pagi</i>					
	(Rp)	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883
Total	(Rp)	298.696.633	342.900.776	321.303.000	276.455.883
Tamu Menginap	(Orang)	5.005	6.185	6.207	5.521
if Cost Driver	(Rp)	59.680	55.441	51.765	50.074

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Tabel 4.16 (lanjutan)
Tarif Cost Driver Per Unit Tahun 2017-2020

Sub Aktivitas		Biaya			
		2017	2018	2019	2020
<i>Pool III</i>					
<i>Front Office</i>	(Rp)	148.194.618	156.000.450	147.190.340	175.887.090
<i>Human Resources</i>	(Rp)	315.846.147	320.900.130	298.700.344	376.500.554
<i>Directors</i>	(Rp)	191.655.000	191.655.000	220.950.000	222.700.000
<i>Pomoc</i>	(Rp)	189.428.530	134.500.727	156.907.050	145.444.900
<i>Admin & General</i>	(Rp)	332.290.570	450.900.550	390.776.070	540.700.233
Seragam Karyawan	(Rp)	7.472.000	8.900.000	6.590.000	7.100.000
Sub Aktivitas		B			
		2	201	201	202
Jumlah	(Rp)	1.184.886.865	1.262.856.857	1.221.113.804	1.468.332.777
Jam Kerja Karyawan	(Jam)	157.248	157.248	157.248	157.248
if cost driver	(Rp)	7.535	8.031	7.766	9.338
<i>Pool IV</i>					
Bangunan	(Rp)	84.300.972	70.600.840	39.600.000	50.890.000
Kendaraan	(Rp)	35.770.000	20.100.000	18.700.000	42.700.500
Bangunan	(Rp)	44.301.936	44.301.936	44.301.936	44.301.936
Kendaraan	(Rp)	45.301.248	45.301.248	45.301.248	55.900.340
<i>Furniture</i>	(Rp)	28.829.000	28.829.000	28.829.000	28.829.000
<i>Glasware</i>	(Rp)	240.000	240.000	240.000	240.000
Alat Elektronik	(Rp)	121.986.000	121.986.000	143.900.000	143.900.000
Alat Non Elektronik	(Rp)	19.718.361	19.718.361	19.718.361	19.718.361
Jumlah	(Rp)	380.447.517	351.077.385	340.590.545	386.480.137
Luas Lantai	(M ²)	2.213	2.213	2.213	2.213
if cost driver	(Rp)	171.915	158.643	153.904	174.641

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Prosedur Tahap Kedua (Pembebanan Biaya Overhead Untuk Menentukan Harga Pokok Kamar)

Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setiap kamar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOP yang dibebankan} = \text{Tarif/ Unit Cost Driver} \times \text{Cost Driver Terpilih}$$

Tabel 17
Harga Pokok Kamar Executive Tahun 2017-2020

<i>Cost Pool</i>	Tarif/ Unit	<i>Cost Driver</i>	Total (Rp)
Tahun 2017			
<i>Cost Pool I</i>	220.426	3.600	793.533.600
<i>Cost Pool II</i>	59.680	3.320	198.137.600
<i>Cost Pool III</i>	7.535	112.655	848.855.425
<i>Cost Pool IV</i>	171.915	1.616	277.814.640
Total BOP (Rp)			2.118.341.265
Biaya Langsung (Rp)			463.685.660
Unit Terjual			3.600
Harga Pokok (Rp)			717.230
Tahun 2018			
<i>Cost Pool I</i>	187.685	3.600	675.666.000
<i>Cost Pool II</i>	55.441	4.200	232.852.200
<i>Cost Pool III</i>	8.031	112.655	904.732.305
<i>Cost Pool IV</i>	158.643	1.616	256.367.088
Total BOP (Rp)			2.069.617.593
Biaya Langsung (Rp)			527.009.350
Unit Terjual			3.600
Harga Pokok (Rp)			721.285
Tahun 2019			
<i>Cost Pool I</i>	184.313	4.680	862.584.840

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 18
Harga Pokok Kamar Junior Deluxe Tahun 2017-2020

<i>Cost Pool</i>	Tarif/ Unit	<i>Cost Driver</i>	Total (Rp)
Tahun 2017			
<i>Cost Pool I</i>	220.426	720	158.706.720
<i>Cost Pool II</i>	59.680	540	32.227.200
<i>Cost Pool III</i>	7.535	21.123	159.161.805
<i>Cost Pool IV</i>	171.915	276	47.448.540
Total BOP (Rp)			397.544.265
Biaya Langsung (Rp)			73.570.774
Unit Terjual			720
Harga Pokok (Rp)			654.326
Tahun 2018			
<i>Cost Pool I</i>	187.685	1.080	202.699.800
<i>Cost Pool II</i>	55.441	660	36.591.060
<i>Cost Pool III</i>	8.031	21.123	169.638.813
<i>Cost Pool IV</i>	158.643	276	43.785.468
Total BOP (Rp)			452.715.141
Biaya Langsung (Rp)			77.976.474
Unit Terjual			1.080
Harga Pokok (Rp)			491.381
Tahun 2019			
<i>Cost Pool I</i>	184.313	1.080	199.058.140
<i>Cost Pool II</i>	51.760	546	28.260.960
<i>Cost Pool III</i>	7.766	21.123	164.041.218
<i>Cost Pool IV</i>	153.904	276	42.477.504
Total BOP (Rp)			433.837.722
Biaya Langsung (Rp)			101.237.029
Unit Terjual			1.080
Harga Pokok (Rp)			495.440
Tahun 2020			
<i>Cost Pool I</i>	180.305	1.080	194.729.400
<i>Cost Pool II</i>	50.074	645	32.297.730

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 19
Harga Pokok Kamar Deluxe Executive Tahun 2017-2020

<i>Cost Pool</i>	<i>Tarif/ Unit</i>	<i>Cost Driver</i>	<i>Total (Rp)</i>
Tahun 2017			
<i>Cost Pool I</i>	220.426	720	158.706.720
<i>Cost Pool II</i>	59.680	445	26.557.600
<i>Cost Pool III</i>	7.535	21.123	159.161.805
<i>Cost Pool IV</i>	171.915	251	43.150.665
		Total BOP (Rp)	387.576.790
		Biaya Langsung (Rp)	61.975.511
		Unit Terjual	720
		Harga Pokok (Rp)	624.378
Tahun 2018			
<i>Cost Pool I</i>	187.685	720	135.133.200
<i>Cost Pool II</i>	55.441	560	31.046.960
<i>Cost Pool III</i>	8.031	21.123	169.638.813
<i>Cost Pool IV</i>	158.643	251	39.819.393
		Total BOP (Rp)	375.638.366
		Biaya Langsung (Rp)	66.960.613
		Unit Terjual	720
		Harga Pokok (Rp)	651.913
Tahun 2019			
<i>Cost Pool I</i>	184.313	1.080	199.058.040
<i>Cost Pool II</i>	51.760	577	29.865.520
<i>Cost Pool III</i>	7.766	21.123	164.041.218
<i>Cost Pool IV</i>	153.904	251	38.629.904
		Total BOP (Rp)	431.594.682
		Biaya Langsung (Rp)	93.739.244
		Unit Terjual	1.080
		Harga Pokok (Rp)	486.420
Tahun 2020			
<i>Cost Pool I</i>	180.305	720	129.819.600
<i>Cost Pool II</i>	50.074	456	22.833.744
<i>Cost Pool III</i>	9.338	21.123	197.246.574
<i>Cost Pool IV</i>	174.641	251	43.834.891
		Total BOP (Rp)	393.734.809
		Biaya Langsung (Rp)	79.791.622
		Unit Terjual	720
		Harga Pokok (Rp)	657.676

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 20
Harga Pokok Kamar Deluxe Suite Tahun 2017-2020

<i>Cost Pool</i>	<i>Tarif/ Unit</i>	<i>Cost Driver</i>	<i>Total (Rp)</i>
Tahun 2017			
<i>Cost Pool I</i>	220.426	200	44.085.200
<i>Cost Pool II</i>	59.680	700	41.776.000
<i>Cost Pool III</i>	7.535	2.347	17.684.645
<i>Cost Pool IV</i>	171.915	69	11.862.135

		Total BOP (Rp)	115.407.980
		Biaya Langsung (Rp)	92.067.788
		Unit Terjual	200
		Harga Pokok (Rp)	1.037.379
Tahun 2018			
<i>Cost Pool I</i>	187.685	162	30.404.970
<i>Cost Pool II</i>	55.441	766	43.467.806
<i>Cost Pool III</i>	8.031	2.347	18.848.757
<i>Cost Pool IV</i>	158.643	69	10.946.367
		Total BOP (Rp)	102.667.900
		Biaya Langsung (Rp)	66.960.613
		Unit Terjual	162
		Harga Pokok (Rp)	1.047.090
Tahun 2019			
<i>Cost Pool I</i>	184.313	145	26.725.385
<i>Cost Pool II</i>	51.760	720	37.267.200
<i>Cost Pool III</i>	7.766	2.347	18.226.802
<i>Cost Pool IV</i>	153.904	69	10.619.376
		Total BOP (Rp)	92.838.763
		Biaya Langsung (Rp)	93.739.244
		Unit Terjual	145
		Harga Pokok (Rp)	1.286.745
Tahun 2020			
<i>Cost Pool I</i>	180.305	189	34.077.645
<i>Cost Pool II</i>	50.074	860	43.063.640
<i>Cost Pool III</i>	9.338	2.347	21.916.286
<i>Cost Pool IV</i>	174.641	69	12.050.229
		Total BOP (Rp)	111.107.800
		Biaya Langsung (Rp)	79.791.622
		Unit Terjual	189
		Harga Pokok (Rp)	1.010.050

Sumber: Diolah Penulis

Gross Profit Margin (GPM)

Tabel 21

Gross Profit Margin Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

Tahun	Penjualan Kamar	Harga Pokok	Laba Kotor	GPM
2017	4.491.000.000	3.471.875.977	1.019.124.023	29%
2018	4.758.075.000	3.542.456.556	1.215.618.444	34%
2019	5.949.000.000	3.987.495.627	1.961.504.373	49%
2020	5.406.975.000	4.007.420.166	1.399.554.389	35%

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Operating Efficiency Ratio (OER)

Tabel 22

Operating Efficiency Ratio Hotel Sapadia Tahun 2017-2020

Tahun	Laba Operasi	Penjualan	OER
2017	791.656.383	4.491.000.000	18%
2018	988.150.804	4.758.075.000	21%
2019	1.734.036.733	5.949.000.000	29%
2020	1.172.086.749	5.406.975.000	22%

Sumber: Hotel Sapadia (Diolah Penulis)

Pembahasan

Perbandingan Harga Pokok Metode Tradisional Dengan Metode ABC

Tabel di bawah ini akan menjelaskan perbedaan pembebanan biaya overhead pada hotel Sapadia dengan menggunakan metode sistem biaya tradisional dengan metode sistem biaya berdasarkan aktivitas

Tabel 23
Perbandingan Harga Pokok Kamar Executive Metode Sistem Biaya Tradisional dengan Metode ABC

Tahun	Sistem Biaya Tradisional (Rp)	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
2017	714.871	717.230	-2.359
2018	698.221	721.285	-23.064
2019	619.203	625.545	-6.342
2020	673.184	674.608	-1.424

Dapat dilihat bahwasanya metode ABC menghasilkan Harga pokok kamar yang lebih tinggi dari sistem biaya tradisional

Tabel 24
Perbandingan Harga Pokok Kamar Junior Deluxe Metode Sistem Biaya Tradisional dengan Metode ABC

Tahun	Sistem Biaya Tradisional (Rp)	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
2017	537.547	654.326	-116.779
2018	482.131	491.381	-9.250
2019	440.146	495.440	-55.294
2020	497.464	541.979	-44.515

Sumber: Diolah Penulis

Untuk kamar ini metode ABC juga menghasilkan Harga pokok kamar yang lebih tinggi dari sistem biaya tradisional

Tabel 25
Perbandingan Harga Pokok Kamar Deluxe Executive Metode Sistem Biaya Tradisional dengan Metode ABC

Tahun	Sistem Biaya Tradisional (Rp)	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
2017	605.167	624.378	-19.211
2018	585.931	651.913	-65.982
2019	499.821	486.420	13.401
2020	579.352	657.676	-78.324

Sumber: Diolah Penulis

Pada tahun 2019 sistem biaya tradisional menghasilkan harga pokok kamar yang lebih tinggi dari metode ABC. Walaupun dapat dilihat bahwa pada tahun lainnya, metode ABC masih menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dari sistem biaya tradisional.

Tabel 26
Perbandingan Harga Pokok Kamar Deluxe Suite Metode Sistem Biaya Tradisional dengan Metode ABC

Tahun	Sistem Biaya Tradisional (Rp)	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
-------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------

2017	1.515.264	1.037.379	477.885
2018	1.419.712	1.047.090	372.622
2019	1.509.644	1.286.745	222.899
2020	1.598.029	1.010.050	587.979

Jika dibandingkan berdasarkan tarif kamar yang berlaku yakni sebesar Rp1.575.000,-, metode ABC lebih menunjukkan harga pokok yang lebih realistis daripada harga pokok dengan sistem biaya tradisional. Pada kamar executive, junior deluxe, dan executive deluxe berdasarkan jumlah tahun analisa, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem biaya tradisional menghasilkan harga pokok yang lebih rendah dibandingkan harga pokok yang dihasilkan dengan metode ABC (under statements). Sebaliknya pada kamar deluxe suite, harga pokok yang dihasilkan oleh sistem biaya tradisional lebih tinggi dibandingkan metode ABC (over statements). Perbedaan harga pokok yang dihasilkan oleh kedua metode biaya ini disebabkan oleh pembebanan/alokasi biaya overhead masing-masing kamar.

Perbandingan Hasil Rasio Proffitabilitas

Tabel 27

Perbandingan Rasio Gross Profit Margin (GPM) Tahun 2017-2020

Tahun	Hotel Sapadia	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
2017	57%	23%	34%
2018	56%	26%	30%
2019	61%	33%	28%
2020	54%	26%	28%

Sumber: Diolah Penulis

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa metode ABC menghasilkan GPM yang lebih rendah dibandingkan GPM yang dihasilkan oleh pihak hotel Sapadia. Dimana tahun 2017 terdapat selisih secara positif sebesar 34%, tahun 2018 sebesar 30%, tahun 2019 sebesar 28%, dan tahun 2020 sebesar 28%. Perbedaan ini dikarenakan harga pokok yang dialokasikan oleh pihak manajemen hotel Sapadia lebih sedikit sehingga menghasilkan laba kotor yang tinggi. Dampaknya terhadap perhitungan rasio GPM menjadi lebih besar. Demikian halnya hasil Operating Efficiency Ratio (OER) tahun 2017-2020 lebih tinggi didapatkan oleh pihak manajemen disebabkan lebih besarnya laba kotor yang dikurangkan dari biaya operasional hotel sehingga laba operasi menjadi lebih besar. Akibatnya berdampak kepada tingginya perhitungan angka rasio OER

Tabel 28

Perbandingan Operating Efficiency Ratio (OER) Tahun 2017-2020

Tahun	Hotel Sapadia	Activity Based Costing Methode (Rp)	Selisih (Rp)
2017	23%	18%	5%
2018	26%	21%	5%
2019	33%	29%	4%
2020	26%	22%	4%

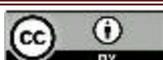
Sumber: Diolah Penulis

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari Pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hotel Sapadia Pematangsiantar masih menggunakan metode tradisional dalam pembebanan biaya overhead untuk perhitungan harga pokok masing-masing kamar. Dimana pembebanan biaya



overhead dilakukan secara arbitrer menggunakan metode proporsional/relative yakni persentase pendapatan sebagai dasar alokasi (pemicu biaya). Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan sistem tersebut menghasilkan harga pokok kamar yang lebih tinggi (over statement) dan harga pokok yang lebih rendah (under statement) jika dibandingkan dengan penerapan metode activity based costing (ABC).

- 2) Selisih yang terjadi diakibatkan oleh pertimbangan dan penggunaan pemicu biaya (cost driver) sebagai dasar alokasi biaya overhead kepada masing-masing tipe kamar. Metode ABC membebaskan biaya overhead kepada kamar berdasarkan penelusuran aktivitas dengan menggunakan beberapa pemicu biaya yang dianggap sebagai penggerak aktivitas yakni berdasarkan jumlah kamar terjual, jumlah tamu menginap, jam kerja karyawan, dan luas lantai. Hasilnya, diperoleh informasi harga pokok yang lebih akurat.
- 3) Analisis Rasio Gross Profit Margin (GPM) dan Operating Efficiency Ratio (OER) yang dilakukan oleh manajemen hotel Sapadia memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan rasio hasil penerapan metode ABC dalam pembebanan biaya overhead. Selisih yang terjadi didasarkan perbedaan jumlah harga pokok, jumlah laba kotor dan laba operasi yang digunakan dalam perhitungan rasio GPM dan OER

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penulis menyarankan agar diterapkannya penggunaan activity based costing dalam pembebanan biaya overhead yang terjadi. Hal ini berimplikasi kepada keakuratan perhitungan harga pokok penjualan masing-masing kamar yang mengkonsumsi aktivitas yang berbeda-beda sebagai pemicu timbulnya biaya. Dimana pada akhirnya akan menyesuaikan kepada tarif kamar yang tepat dalam menghasilkan pendapatan penjualan kamar.
- 2) Dikarenakan penerapan ABC memerlukan daftar dan biaya dari setiap aktivitas dalam penjualan kamar, maka pihak hotel sebaiknya mengidentifikasi dengan tepat rincian aktivitas - aktivitas yang diperlukan dalam penjualan kamar, dan melakukan pemeriksaan berkala untuk identifikasi aktifitas yang benar-benar bernilai tambah dan tidak bernilai tambah.
- 3) Praktik penerapan akuntansi untuk penyajian laporan keuangan terutama laporan laba-rugi sebaiknya disesuaikan kembali sesuai dengan standar yang berlaku untuk memudahkan pembaca memahami dan menganalisis laporan keuangan hotel. Penting untuk menggolongkan biaya dengan penyebab timbulnya biaya sebagai dampak proses memperoleh pendapatan.
- 4) Selain laporan keuangan yang wajib disajikan oleh pihak hotel, sebaiknya menyajikan juga laporan harga pokok kamar secara terpisah dari laporan laba-rugi hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMA (American Hotel & Motel Association). 2011. The Cornell School of Hotel Administration on Hospitality. USA : Cornell University
- Ariani, Niken. Dan Haryanto, Dany. 2010. Pembelajaran Multimedia Di Sekolah. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi. Cetakan Pertama. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Bambang, Riyanto. 2010. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Yogyakarta : BPF.
- Barus, Andreani Carolin, Vera Rica. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 4, Nomor 02.
- Dicky, Yoanes, dan Riki Martusa. 2011. Penerapan Activity Based Costing (ABC) System Dalam Penghitungan Profitabilitas Produk. Jurnal Akuntansi. Volume 3. No.1.
- Hery. 2012. Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi. Jakarta : Prenada.
- Hery. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah 1. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hery. 2016. Akuntansi Dasar. Jakarta : PT. Grasindo.
- Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Grasindo.

- Indra, A Zubaidi, Agus Zahron, Ana Rosianawati. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Erc):Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 16 No. 1
- Indriani, Poppy, Jaka Darmawan, Sitti Nurhawa. 2014. Analisis Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Khusus: Perusahaan Dagang Otomotif). *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.5. No. 1.
- Maulana, Ardi Helmy, Moch. Dzulkirom AR, dan Dwiatmanto. 2016. Analisis Activity Based Costing System (ABC System) Sebagai Dasar Menentukan Harga Pokok Kamar Hotel (Studi Kasus pada Hotel Selecta Kota Batu Thaun 2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 30 No. 1 Januari 2019.
- Mulyadi,D.2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan.Bandung :Alfabeta.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Munawir, S. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta : Liberty.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat.
- Pandia, Frianto. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pirmatua, Sirait. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Ekuilibria.
- Rahayu, Sri. 2012. Penerapan Metode Activity Based Costing System (ABC System) dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura* Vol. 1 No. 1, Desember 2012 Diakses 09 Juli 2019.
- Rudianto. 2012. Akuntansi Manajemen. Jakarta : Penerbit Erlangga. Samryn, L. M. 2012. Akuntansi Manajemen. Jakarta Kencana.
- Sholihah, Qomariyatus. 2012. Relationship Work Fatigue Related To Work Strees On Circadian Rhythm Night Shift Operator Employee PT. Indonesia Bulk Terminal Kotabaru, South Kalimantan, Indonesia. Eissn.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sulastiyono, Agus. 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi. Bandung : Alfabeta. Sumanjaya, Reski. Fery Panjaitan, dan Hariyani. 2017. Analisis Penerapan Activity Based Costing System (ABC System) pada Tarif Jasa Rawat Inap PT Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang (Studi Kasus pada PT Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis & Keuangan (JIABK)*. Vol. 12 No. 2. November 2017. Diakses 09 April 2019.
- Sumilat, Zinia Th. A. 2013. Penentuan Harga Pokok Penjualan Kamar Menggunakan Activity Based Costing System (ABC System) pada RSUD Pancaran Kasih GMIM. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. September 2013. Diakses 04 Agustus 2019.
- Tandiontong, Mathius, dan Lestari, Ardis. 2011.Peranan Activity Based Costing System (ABC System) Dalam Perhitungan Harga Pokok Terhadap Peningkatan Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT Retno Muda Pelumas Priima Tegal). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*. No. 5 Tahun ke-2. Mei-Agustus 2011. Diakses 09 Juli 2019.
- Wijaya, Yuke Oktalina, Lili Syafitri. 2012. Analisis Pengendalian Biaya Produksi Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pabrik Penggilingan (PP) Srikandi Palembang.
- Wiyasha, I.B.M. (2010). Akuntansi Perhotelan. Yogyakarta : Andi Offset.

**PERAN MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

¹Rio Juanda Putra Saragih, Universitas Methodist Indonesia

e – mail : riosaragih1711@gmail.com

^{2*}Arthur Simanjuntak, Universitas Methodist Indonesia

e – mail : as-smjt@rocketmail.com

³Yosephine Natalita Sembiring, Universitas Methodist Indonesia

e – mail : pipi.sablonmedan@gmail.com

⁴Dimita H P Purba, Universitas Methodist Indonesia

e – mail : dimitahppurba@gmail.com

*Correspondence Email : as-smjt@rocketmail.com

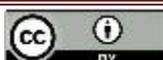
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis serta memberikan bukti empiris pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dengan komitmen organisasi dan motivasi sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pejabat Komitmen Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 99 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Analisa data yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS – SEM) dengan program perangkat lunak Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar. Variabel komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar. Namun, tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar. Variabel motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar. Namun, tidak dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Komitmen Organisasi, Motivasi

ABSTRACT

This study aims to examine, analyze and provide empirical evidence of the effect of budget planning, budget execution, human resource competence and the process of procurement of goods and services on budget absorption with organizational commitment and motivation as moderating variables. Research respondents are the Head of Regional Apparatus Organizations as Budget Users, Head of Sub-Division of Finance and Commitment Officials of Regional Apparatus Organizations as many as 99 respondents. This study uses primary data. Data analysis used is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS – SEM) with Smart PLS 3.0 software program. The results of the study show



that budget planning, budget execution, human resource competence and the process of procurement of goods and services have a positive effect on the absorption of the budget for the Regional Apparatus Organization of Pematang Siantar City Government. The organizational commitment variable can moderate the influence of budget planning, budget execution, the process of procurement of goods and services on the absorption of the budget for the Regional Apparatus Organization of Pematang Siantar City Government. However, it cannot moderate the influence of human resource competence on the absorption of the budget for the Pematang Siantar City Government Regional Apparatus Organization. The motivation variable can moderate the influence of budget planning, human resource competence, the process of procurement of goods and services on the absorption of the budget for the Regional Apparatus Organization of Pematang Siantar City Government. However, it cannot moderate the effect of budget execution on the absorption of the budget of the Pematang Siantar City Government Regional Apparatus Organizations

Keywords : Budget Absorption, Budget Planning, Budget Execution, Human Resource Competence, Goods and Services Procurement Process, Organizational Commitment, Motivation

I. PENDAHULUAN

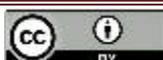
Anggaran pemerintah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan keuangan dari suatu organisasi meliputi informasi tentang pendapatan, belanja dan kegiatan, anggaran tersebut berisi tentang estimasi apa yang akan dilakukan organisasi (Halim, 2017). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019, disebutkan bahwa belanja pemerintah daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi, belanja tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.02/2017 penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Evaluasi kinerja dari aspek pelaksanaan anggaran bermanfaat untuk menghasilkan informasi pencapaian output dari masing – masing pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu faktor akuntabilitas keuangan pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penjelasan atas penggunaan anggaran yang dilakukan (Purtanto, 2015)

Salah satu indikator yang menunjukkan berhasilnya suatu program ataupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah realisasi anggaran (Anfujatin., 2016). Target aturan yang tidak terealisasi dengan baik. Terbatasnya asal penerimaan negara mewajibkan pemerintah supaya prioritas aktivitas dan alokasi aturan disusun menggunakan efisien dan efektif. Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama, seperti yang diistilahkan oleh Bank Dunia yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (Halim, 2017)

Tabel 1

Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2016 – 2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	
	Rupiah (Rp)	Rupiah (Rp)	%
2016	1.072.621.411.513,28	940.141.429.606,79	87,66



2017	1.083.339.076.573,96	934.471.598.872,42	86,26
2018	997.384.585.393,82	994.512.015.480,57	99,71
2019	1.090.413.256.601,00	934.784.426.978,51	85,73

Sumber : BPKPAD Kota Pematangsiantar

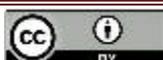
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar yang kurang maksimal serta pola penyerapan yang kurang proporsional. Sementara target penyerapan anggaran untuk setiap tahun yang telah direncanakan adalah 15% untuk tahun I, 40% untuk tahun II, 60% untuk tahun III dan 90 untuk tahun IV, hal tersebut sesuai dengan pola capaian penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Lambatnya penyerapan anggaran yang menyebabkan tingginya tingkat penyerapan anggaran pada semester kedua akan menimbulkan risiko akuntabilitas keuangan negara, seperti memaksakan kegiatan yang tidak perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan (BPKP, 2012) Tingkat penyerapan anggaran pada semester kedua yang menunjukkan jumlah kegiatan yang diselesaikan secara akumulasi pada akhir tahun anggaran berarti outputnya belum optimal. Jika hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum, maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya itu buruknya kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Malahayati, 2015)

Perencanaan anggaran yang matang dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang baik. Tetapi perencanaan anggaran yang kurang matang dan tidak akurat akan menyebabkan OPD untuk melakukan revisi anggaran (Seftianova & Adam, 2013). Rencana penganggaran yang tidak berpengalaman merupakan masalah yang muncul selama proses penganggaran, dan program kerja tidak berjalan sesuai harapan.. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pemanfaatan anggaran adalah kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dengan adanya kompetensi dari sumber daya manusia menjadikannya sebagai faktor penentu dalam pengelolaan anggaran (Zarinah, Darwanis, & Abdullah, 2016)

Penilaian terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan tugas - tugas dalam suatu organisasi dapat ditentukan oleh tingkat tanggung jawab dan kemampuan sumber daya tersebut. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang digunakan, maka hasil kinerja yang diperoleh akan semakin baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muda et al., 2017). Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga pengelolaan anggaran menjadi baik, karena sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan pengelolaan anggaran buruk dan berdampak pada realisasi anggaran yang terlambat (Nina et al. 2016)..

(Setiawan, 2016) mengemukakan permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa ialah kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan serta keengganan dan kehati-hatian menjadi pejabat pengadaan. Keterlambatan dalam penunjukkan panitia pengadaan barang/jasa serta tidak adanya perencanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengakibatkan terlambatnya jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Miliasih, 2012). Lambatnya penyerapan anggaran tersebut terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa proses teknis serta non teknis yang harus dijalankan dan harus melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang – undang (Arif & Halim, 2013)

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh (Priatno, 2013); (Zarinah et al., 2016); (Malahayati, 2015); (Sari, et al, 2019); (Koriatmaja & Surasni, 2020) menemukan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. (Sukandani & Istikhoro, 2016) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan (Malahayati, 2015); (Karakoro, 2018); (Harahap, Taufik & Azlina, 2020) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran dapat mempengaruhi



penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan (Halim, 2017); (Herriyanto, 2012); (Fitriany, Masdjojo & Suwarti, 2015); (Yumiati & Islahuddin, 2016); (Akram, Agusdin & Irtianna, 2017); (Sari et al., 2019) menemukan bahwa faktor sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran menjadi faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Penelitian tentang pengaruh pengadaan barang/jasa dilakukan oleh (Priatno, 2013); (Gagola, Sondakh, & Warongan, 2017); (Setiyono, 2016); (Akram, Agusdin & Irtianna, 2017); (Koriatmaja & Surasni, 2020) menemukan bahwa faktor Pengadaan Barang dan Jasa memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan (Koriatmaja, & Surasni, 2020) juga menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. (Purtanto, 2015); (Alumbida, Saerang, & Ilat, 2016); (Karakaro, 2018) menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan (Rifai, Inapty, & M, 2016) menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Alfarsi, 2017) menemukan bahwa sumber daya manusia serta pengadaan barang/jasa berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian (Handayani & Muda) menemukan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan (Yumiati & Islahuddin, 2016) menemukan perencanaan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran, (Fitriany, Masdjojo & Suwarti, 2015) menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran

Komitmen pengelola anggaran merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya komitmen, organisasi akan sulit mencapai tujuan. Komitmen organisasi adalah keyakinan yang kuat serta dukungan dari individu terhadap nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi (Mowday, Steers, & Porter, 1979). Komitmen organisasi merupakan pendorong dari aspek psikologis individu dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Arthana, Mimba, & Wirakusuma, 2016). Mowday mengemukakan bahwa faktor – faktor pembentuk komitmen organisasi akan berbeda bagi pegawai yang baru bekerja setelah menjalani masa kerja yang cukup lama, serta bagi pegawai yang bekerja dalam tahapan yang lama dan menganggap organisasi sudah menjadi bagian dalam hidupnya (Sopiah, 2008) Karyawan merupakan salah satu aset untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Semakin baik kinerja karyawan, semakin besar kemungkinan organisasi untuk mencapai tujuannya. Begitu juga sebaliknya jika kinerja pegawai kurang baik atau buruk dapat merugikan organisasi sehingga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas organisasi (Putra & Wikansari, 2017) Pengaruh kinerja karyawan dapat dilihat pada motivasi. Karyawan yang termotivasi bertindak berdasarkan keinginan untuk unggul dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Pegawai dengan motivasi yang tinggi memiliki hubungan yang searah dengan kepuasan kerja, sehingga hal tersebut akan meningkatkan produktivitas serta kreativitas (Joo & Lim, 2009)

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

(Lupia & McCubbins, 2000) menyatakan dalam pendelegasian wewenang seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk melakukan sesuai dengan keinginan prinsipal. Menurut (Lane, 2003) teori keagenan dapat aplikasikan pada organisasi public. Dalam organisasi sektor publik hubungan prinsipal dengan agen terjadi dalam hal pemberian wewenang di bidang penganggaran (Latifah, 2010). Praktek hubungan antara principal dengan agen pada organisasi sektor publik adalah eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai principal. Tangon (2002) mengatakan bahwa terdapat variabel kontigensi yang mempegaruhi kinerja, diantaranya adalah strategi, struktur, ukuran, lingkungan, teknologi, tugas dan faktor individual Teori kontingensi akuntansi manajemen didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada sistem akuntansi yang diterima secara

universal yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam semua keadaan. Teori ini mengidentifikasi suatu aspek spesifik dari sebuah sistem akuntansi yang ada kaitannya dengan suatu keadaan tertentu (Otley, 1980)

Teori penetapan tujuan akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi (Robbins & Jugde, 2017). Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa individu berkomitmen pada tujuan, meyakini bahwa dia dapat mencapai tujuan dan ingin mencapainya (Robbins & Jugde, 2017). Teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1960. Locke menunjukkan bahwa adanya suatu keterkaitan antara tujuan dengan kinerja. Dia menemukan bahwa tujuan yang spesifik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang mudah. (Hidayati, 2002) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan teori penetapan tujuan fokus pada hubungan desain pengendalian manajemen dengan variabel seperti komitmen organisasi, motivasi, kepuasan kerja dan kinerja. Keinginan dalam diri individu yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan menjadi suatu motivasi dalam kinerjanya. Capaian atas tujuan yang ditetapkan merupakan hasil kinerja yang individu harapkan (Lunenburg, 2011).

Penyerapan Anggaran Belanja

Anggaran pemerintah merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas, anggaran tersebut berisi tentang estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Halim, 2017). Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara (Halim, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari suatu anggaran adalah mewujudkan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. (Noviwijaya & Rohman, 2013) mengemukakan bahwa penyerapan anggaran OPD adalah proporsi anggaran yang telah direalisasikan selama satu tahun anggaran. (Anfujatin, 2016) menyatakan bahwa penyerapan anggaran adalah indikator yang mencerminkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah. (Yunarto, 2011) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang rendah menandakan adanya program dan kegiatan yang gagal dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak optimal. Banyak penyebab yang menjadikan anggaran sulit untuk direalisasikan. Selain dari kegagalan dari pemerintah dalam melaksanakan anggaran juga karena kualitas dari anggaran tersebut yang membuat sulit untuk dilaksanakan. (Mardiasmo, 2002) mengemukakan bahwa kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan capaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan (Heriberta, Tasman, & Yanilia, 2018) menemukan bahwa (1) semua SKPD mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran; (2) perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran adalah faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran; (3) penyerapan anggaran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja. (Salamah, 2018) melakukan penelitian strategi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor - faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu berkaitan dengan faktor perencanaan anggaran, faktor regulasi, dan faktor sumber daya manusia. (Purbadharmaja, et al, 2019) menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak serta merta mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih baik. Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kualitas anggaran daerah dan kualitas pengelolaan anggaran.

Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem

perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Bastian, 2010). Perencanaan merupakan kegiatan yang paling penting dalam konteks pengelolaan keuangan daerah karena seluruh kegiatan perumusan program dalam perencanaan akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya (Alumbida et al., 2016). Perencanaan yang baik terdiri dari penyusunan kegiatan dan anggaran yang akurat, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana dengan tepat waktu (Nugroho & Alfarisi, 2017). (Arif & Halim, 2013) mengemukakan bahwa apabila dalam penentuan anggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang akan mengakibatkan program kerja tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Kung, Huang, & Cheng, 2013) menunjukkan adanya fakta bahwa perencanaan anggaran berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi keputusan dan mencapai tujuan manajemen, serta memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan (Kwarteng, 2018) dalam studi penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penganggaran, manajemen kinerja dan alokasi sumber daya. Penelitian yang dilakukan (Sari, Basri & Indriani, 2017) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kinerja meningkatkan hubungan antara perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Hasil penelitian (Alam & Alam, 2022) menemukan adanya negoisasi informal para pimpinan politik memainkan peran penting dalam keputusan berbagi anggaran. Hasil survei yang dilakukan (Rafi et al, 2020) menunjukkan bahwa penganggaran merupakan alat yang berguna untuk memprediksi masa depan, mengendalikan sumber daya, dan meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. (Sirin, Indarto, & Saddewisasi, 2020) menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan adalah aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana ataupun kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat – alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran adalah upaya yang dilakukan untuk merealisasikan perencanaan anggaran terkait dengan anggaran yang dimiliki untuk kebutuhan program dan kegiatan OPD (Ramdhani & Anisa, 2017). Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran harus dilakukan konsisten sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Persoalan yang sering dihadapi dalam penyerapan anggaran adalah adanya kesenjangan yang terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak terealisasi dengan baik. Walaupun sudah direncanakan dengan baik tetapi jika dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala yang mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal maupun tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, maka dapat mengakibatkan realisasi anggaran tidak tepat waktu (Nugroho & Alfarisi, 2017). Adanya revisi terhadap program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan tidak dapat terlaksana, petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan seringkali memiliki perbedaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran, aturan tentang mekanisme pencairan anggaran pemerintah daerah tidak begitu jelas, hal tersebut dapat mengakibatkan realisasi anggaran menjadi lambat (Fitriany, Masdjojo & Suwarti, 2015).

Pada penelitian (Miliasih, 2012) menemukan permasalahan dalam proses realisasi anggaran yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja di satuan kerja menjadi terlambat. Permasalahan dalam tahapan proses realisasi anggaran belanja di satuan terjadi pada tahapan pembentukan pengelola anggaran, penerbitan dan penyusunan kelengkapan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP), sampai pada tahapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Penyebab

permasalahan berasal dari kebijakan teknis dan permasalahan kultur pengelola anggaran di satuan kerja. Penelitian yang dilakukan (Malahayati, 2015) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. (Sulaeman, Hamzah, & Priyanto, 2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan penyerapan anggaran satuan kerja belum optimal. Hasil penelitian (Rakhman, 2019) menemukan bahwa tingkat implementasi anggaran dipengaruhi oleh faktor – faktor kepemimpinan dan proporsi pengeluaran belanja modal, proporsi belanja modal yang lebih tinggi juga menurunkan tingkat implementasi anggaran. Penelitian (Asmara, Sularso & Sayekti, 2018) menunjukkan bahwa implementasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan belanja anggaran. Satuan kerja juga lebih mengutamakan kelengkapan administrasi daripada kecepatan dan ketepatan pencairan anggaran, dalam realisasi pelaksanaan anggaran

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kesuksesan suatu lembaga dalam meraih tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Pada organisasi sektor publik, kedudukan sumber daya manusia lebih diutamakan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap publik, akibatnya organisasi senantiasa mempunyai reputasi kinerja yang positif dalam masyarakat. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia menjadi sangat penting, baik di tingkat atasan ataupun bawahan. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Sudarmanto, 2019). (Mangkunegara, 2005) menyebutkan kompetensi sumber daya manusia ialah kompetensi yang berkaitan dengan wawasan, kemampuan, keterampilan serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi langsung pada kinerjanya.

(Galleli & Hourneaux, 2021) menemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan persyaratan untuk manajemen strategis berkelanjutan yang efektif. mereka menganjurkan bahwa hubungan antara kompetensi organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan strategi organisasi harus diselaraskan dan diperkuat. (Nasikhin & Danila, 2018) dalam penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan manajemen memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui kompetensi, diperlukan pengembangan sumber daya pegawai karena hanya mengandalkan kualitas yang didapat karyawan dari perguruan tinggi tidak cukup. Hasil penelitian (Otoo & Mishra, 2018) menunjukkan bahwa beberapa praktik pengembangan sumber daya manusia berdampak pada kinerja organisasi melalui pengaruhnya terhadap kompetensi pegawai. Penelitian (Pribadi, Kanto, & Kisman, 2020) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja penyerapan anggaran. (Dahana & Ermwati, 2020) mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran yang kurang optimal terjadi karena faktor internal faktor internal yaitu sumber daya manusia. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran dan proses pelaksanaan anggaran. Sehingga dapat meminimalisir inkonsistensi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. (Wadi, Herawati, & Husnan, 2017) mengemukakan bahwa faktor internal yang menjadi kendala satuan kerja adalah masalah sumber daya manusia dan rendahnya sinergi antar unsur di satuan kerja yang menjadi kendala di internal satuan kerja.

(Laka, Sukartha, & Wirama, 2017) menguji pengaruh kompetensi dan motivasi pada penyerapan anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. (Octariani, Akram, & Animah, 2017) menemukan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD. (Maman & Soffan, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor kurangnya kompetensi yang dimiliki sumber

daya manusia dapat memperlambat penyerapan anggaran. (Ramadhani & Setiawan, 2019) tentang penyerapan anggaran belanja menemukan sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. (Bastian, 2010) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik, proporsi utama pengeluaran publik pada setiap level organisasi sektor publik adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi. (Halim, 2017) mengemukakan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, semakin awal pelaksanaan kegiatan, maka manfaat serta efek stimulusnya juga akan semakin besar. Lambatnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa terjadi diakibatkan proses lelang yang lama, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan serta harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang – undang, ditambah lagi konflik yang terjadi selama proses lelang berlangsung semakin memperparah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan anggaran (Arif & Halim, 2013)

Tidak adanya dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan keterlambatan dalam penunjukan panitia pengadaan barang/jasa, mengakibatkan waktu pelaksanaan dan proses pelelangan pengadaan barang/jasa menjadi terlambat sehingga menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran (Miliasih, 2012). (Setiawan, 2016) mengemukakan permasalahan yang terjadi terkait proses pengadaan barang/jasa diantaranya adalah kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan, keengganan dan kehati-hatian menjadi pejabat pengadaan karena ketakutan akan tersangkut dengan kasus dugaan korupsi, keterlambatan proses lelang yang disebabkan.

(Sudarwati, Karamoy, & Pontoh, 2017) mengemukakan bahwa faktor pengadaan barang/jasa yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penumpukan realisasi anggaran. Hasil penelitian (Juliani & Sholihin, 2014) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dipengaruhi pengetahuan peraturan dari pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, komitmen manajemen yang kuat dari kepala OPD serta komitmen dari pegawai – pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa serta lingkungan di dalam OPD yang kondusif dengan adanya koordinasi dan kerja sama tim yang baik akan memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. (Rahim & Saputra, 2018) menemukan bahwa faktor proses lelang pengadaan barang dan jasa merupakan faktor yang paling dominan penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran. Penelitian (Handayati & Safitri, 2020) menemukan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di SKPD.

Komitmen Organisasi

(Mowday et al., 1979) menjelaskan komitmen organisasi merupakan kekuatan identifikasi individu dan keterlibatannya dalam organisasi. (Sudarmanto, 2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan individu dan kemauan menyerahkannya perilakunya dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi serta bertindak untuk tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan ikatan psikologis pegawai dalam suatu organisasi yang ditandai dengan: kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai – nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi (Sopiah, 2008). Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi akan mendorong individu untuk selalu menyerahkannya dirinya dengan tujuan dan kepentingan organisasi (Allen & Meyer, 1990).

Penelitian (Wentzel, 2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan partisipasi selama penganggaran menumbuhkan rasa keadilan, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen manajer terhadap tujuan penganggaran dan kemudian meningkatkan kinerja. (Rivito & Mulyani, 2019) menunjukkan komitmen organisasi dapat memperkuat pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian (Imamoglu, Ince, Turkcan, & Atakay, 2019) menunjukkan bahwa keadilan organisasi mempengaruhi komitmen organisasi serta komitmen organisasi mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil studi (Haque, Fernando, & Caputi, 2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif, normatif dan keberlanjutan. Hasil penelitian (Huynh & Hua, 2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berorientasi tugas memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi, selain itu, kepuasan kerja dan modal psikologis memainkan peran penting dalam komitmen organisasi karyawan. Hasil penelitian (Jehanzeb, 2020) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen organisasional dan perilaku anggota organisasi

Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. (Mangkunegara, 2005) menjelaskan bahwa motivasi terbentuk dari sikap individu dalam menghadapi situasi kerja di organisasi. Motivasi merupakan energi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. (Robbins & Jugde, 2017) mengemukakan bahwa motivasi merupakan sebagai proses yang menjelaskan tentang kekuatan, arah dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Kekuatan menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha, namun kekuatan yang besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut disalurkan dalam suatu arahan yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Ketekunan mengukur berapa lama seseorang dalam mempertahankan upayanya, individu yang termotivasi akan bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan. Motivasi menjadi penting dalam suatu organisasi karena adanya motivasi, maka setiap pegawai akan berkeinginan bekerja keras serta memiliki antusias yang besar untuk mencapai kinerja yang tinggi. (Hasibuan, 2011) menjelaskan suatu organisasi selain mengharapkan pegawai yang terampil, juga menginginkan pegawai yang giat bekerja dan memiliki keinginan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Kecapakan pegawai tidak akan ada artinya bagi organisasi jika mereka tidak mau bekerja dengan giat. (Hasibuan, 2011) mengemukakan bahwa teori motivasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan mendasarkan pendekatannya atas faktor – faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu.

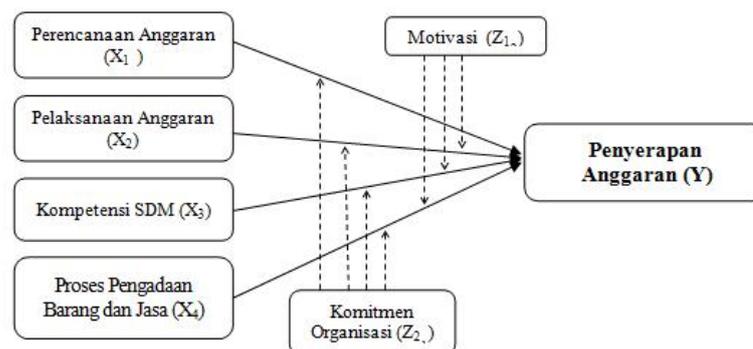
Teori X dan Y yang diperkenalkan oleh Mc. Gregor menyatakan bahwa manusia tidak tertarik akan rasa tanggung jawab, cenderung suka diperintah dan berkeinginan ada keamanan dalam semua hal. (Robbins & Jugde, 2017) mengemukakan bahwa teori X mengasumsikan bahwa individu tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab serta harus dipaksa mengerjakan, sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa individu suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, serta dapat menyodorkan diri dalam pekerjaannya. Menurut teori X untuk memotivasi individu harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau bekerja sungguh – sungguh. Sedangkan menurut teori Y untuk memotivasi individu hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama dan keterikatan pada keputusan. Mc. Gregor memandang suatu organisasi menjadi efektif apabila menggantikan pengawasan dan pengarahan dengan integrasi dan kerja sama serta individu ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Hasibuan, 2011)

Penelitian Penelitian (Wong-On-Wing, Guo, & Lui, 2010) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik untuk partisipasi dalam penganggaran berhubungan positif dengan kinerja. Dalam penelitian yang dilakukan (Zainuddin & Isa, 2011) menemukan keterlibatan manajer dalam proses penetapan anggaran mendorong perilaku manajer yang menguntungkan yang meningkatkan persepsi mereka terhadap keadilan yang dapat meningkatkan motivasi mereka.

(Nazaruddin & Setyawan, 2016) membuktikan motivasi kerja tidak dapat memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja manajerial aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian (Laka et al, 2017) menunjukkan motivasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian (Al-Musadieq et al, 2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan (Lau, Scully, & Lee, 2018) menyimpulkan jika manajemen ingin agar bawahan berpartisipasi dalam penetapan target, kebutuhan ekstrinsik dan kebutuhan intrinsik dari bawahan haruslah dipenuhi, hal tersebut ditujukan agar mereka termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran. (Ouakouak, Zaitouni, & Arya, 2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan etis dan emosional meningkatkan motivasi karyawan sehingga berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, hasil dari kinerja memberikan efek negatif pada niat untuk berhenti.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang dibangun berdasarkan penelaahan teori dan didukung riset penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh pada penyerapan anggaran. Namun beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga terjadi inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran. (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa hubungan langsung antara variabel independen dan dependen memungkinkan adanya variabel lain yang juga mempengaruhinya, salah satu contohnya adalah variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan suatu variabel yang berpengaruh pada sifat atau arah dalam hubungan antar variabel. Arah hubungan itu dapat menjadi positif atau negatif, sehingga variabel moderasi disebut juga variabel kontingensi. Penelitian ini didasarkan pada suatu gagasan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa berhubungan dengan komitmen organisasi yang mampu mendorong penyerapan anggaran. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan menyebabkan individu bekerja keras mencapai tujuan organisasi serta memiliki pandangan positif terhadap organisasi (Porter et al, 1974). Komitmen yang tinggi menjadikan individu akan lebih memprioritaskan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

- H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja
- H2 : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja
- H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja
- H4 : Proses Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja
- H5 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja

H6 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja

H7 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja

H8 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja

H9 : Motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Belanja

H10 : Motivasi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja

H11 : Motivasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja

H12 : Motivasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian survei yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu dengan melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner ataupun wawancara (Sugiyono, 2019). Desain penelitian ini adalah deskriptif. Studi deskriptif disebut juga studi kausal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris serta menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan 70 barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dengan komitmen organisasi dan motivasi sebagai pemoderasi.

Penelitian ini terdiri dari 7 variabel yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran, komitmen organisasi dan motivasi. Variabel dalam penelitian ini dijabarkan dalam indikator penelitian yang digunakan untuk menyusun instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pematangsiantar Pemerintah yang berjumlah 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penelitian ini, perumusan kriteria sampel didasarkan pada tujuan penelitian, dimana kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh pegawai pengelola anggaran pada masing-masing OPD diyakini mampu menjawab permasalahan penelitian. Responden yang diteliti adalah Pengguna Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan kepada responden. Penyusunan Kuesioner berdasarkan indikator dari setiap variabel yang diambil dari penelitian – penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan SEM (Structural Equation Model) dengan pengukuran Partial Least Square (PLS). Structural Equation Model (SEM) adalah teknik statistik yang memungkinkan pengujian rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan dan parsial. Hubungan yang kompleks dapat dibangun antara satu atau lebih variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen

Analisis PLS-SEM

Analisis PLS-SEM terdiri dari sub model yaitu:

1. Outer Model atau Measurement model, yaitu spesifikasi yang menggambarkan hubungan konstruk dengan indikatornya.

2. Inner Model atau Inner Relation, yaitu spesifikasi yang menggambarkan hubungan antar konstruk. Persamaan dalam penelitian ini adalah:

Model 1

$$PAB = 1(PA) + 2(PLA) + 3(KS) + 4(PBJ) + e$$

Model 2

$$PAB = 1(PA) + 2(PLA) + 3(KS) + 4(PPBJ) + 5(KO*PA) + 6(KO*PLA) + 7(KO*KS) + 8(KO*PPBJ) + 9(MO*PA) + 10(MO*PLA) + 11(MO*KS) + \beta_{12}(MO*PPBJ) + e$$

Keterangan:

- PAB : Penyerapan Anggaran Belanja
- PA : Perencanaan anggaran
- PLA : Pelaksanaan Anggaran
- KS : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- PPBJ : Proses Pengadaan Barang dan Jasa
- KO : Komitmen Organisasi
- KO*PA : Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Perencanaan anggaran
- KO*PLA : Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Pelaksanaan Anggaran
- KO*KS : Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Kompetensi SDM
- KO*PPBJ : Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Proses Pengadaan Barang Jasa
- MO*PA : Interaksi antara Motivasi dengan Perencanaan anggaran
- MO*PLA : Interaksi antara Motivasi dengan Pelaksanaan Anggaran
- MO*KS : Interaksi antara Motivasi dengan Kompetensi SDM
- MO*PPBJ : Interaksi antara Motivasi dengan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Evaluasi Model Pengukuran (Outer model)

Evaluasi model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas dan realibilitas dari indikator – indikator pembentuk konstruk (Ghozali & Latan, 2015). Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah item atau indikator yang merepresentasikan konstruk valid atau tidak. Validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen bertujuan untuk menguji korelasi antar indikator dalam mengukur konstruk sedangkan validitas diskriminan bertujuan untuk menguji indikator dari konstruk lain yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali & Latan, 2015)

Tabel 2
Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumps
Validitas	<i>Loading Factor</i>	➢ 0,7
Konvergen	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	➢ 0,5
Validitas	<i>Cross Loading</i>	➢ 0,7 dalam satu variabel
Diskriminan	Akar AVE, korelasi Variabel laten	Akar kuadrat AVE > korelasi variabel laten

Sumber: (Ghozali & Latan, 2016)

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah indikator dari instrumen dapat digunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang akurat (Ghozali & Latan, 2016). Evaluasi model pengukuran dengan konstruk berbentuk refleksif dalam PLS dapat dimulai dengan melihat nilai indicator reliability yaitu besarnya variance dari indikator untuk menjelaskan konstruk dan composite reliability untuk mengukur reliabilitas konstruk secara keseluruhan (Ghozali & Latan, 2016)

Tabel 3



Parameter Uji Reliabilitas dalam Model Pengukuran PLS

Kriteria	Parameter	Rule of Thumbs
<i>Indicator Reliability</i>	<i>Loading Factor</i>	0.7 untuk <i>confirmatoryresearch</i> 0.6 – 0.7 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>
<i>Internal Consistency Reliability</i>	<i>Composite Reliability</i>	0.7 untuk <i>confirmatoryresearch</i> 0.6 – 0.7 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>

Sumber: (Ghozali & Latan, 2016)

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat besarnya persentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R- Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi. Namun demikian, penggunaan nilai R-Squares akan menyebabkan bias estimasi karena semakin banyak prediktor variabel dalam model, maka nilai R-Squares akan semakin besar dan meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut Cohen menganjurkan model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan ukuran Shrunken atau Adjusted R2 (Ghozali & Latan, 2016). Semakin besar nilai Adjusted R2 menunjukkan bahwa prediktor model semakin baik dalam menjelaskan variance. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya proporsi variance variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat menggunakan ukuran *effect size*. Evaluasi model PLS juga dilakukan dengan melihat Q2 predictive relevance untuk mengetahui apakah model mempunyai *predictive relevance* atau tidak (Ghozali & Latan, 2016). Model memiliki *predictive relevance* apabila nilai $Q^2 > 0$, sedangkan apabila nilai $Q^2 < 0$ berarti model kurang memiliki *predictive relevance*

Tabel 4

Parameter Evaluasi Model Struktural

Kriteria	Rule of Tumb
<i>Adjusted R²</i>	0.70, 0.45, 0.25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah
<i>Q² predictive relevance</i>	$Q^2 > 0$ menunjukkan model mempunyai <i>predictiverelevance</i> dan jika $Q^2 < 0$ menunjukkan model kurang memiliki <i>predictive relevance</i>
<i>Effect Size & Q² predictive relevance</i>	0.02, 0.15, 0.35 (kecil, menengah dan besar)

Sumber: (Ghozali & Latan, 2016)

Pengujian Efek Moderasi

Pengujian efek moderasi dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi dimana variabel moderasi berbentuk metrik laten sehingga dapat secara langsung dilakukan pengujian. Jika konstruk eksogen dan moderator berbentuk refleksif maka metoda yang tepat untuk menguji efek moderasi adalah dengan menggunakan Product Indicator Approach (Ghozali & Latan, 2016). Caranya adalah dengan membuat perkalian antara indikator variabel eksogen dan moderator untuk membentuk konstruk interaksi.

Uji Hipotesis

Hipotesis 1 sampai dengan Hipotesis 5 merupakan pengujian pengaruh langsung, Hipotesis 6 sampai dengan Hipotesis 12 merupakan pengujian efek moderasi. Pada efek moderasi tidak hanya dilakukan pengujian efek langsung dari variabel independen ke variabel dependen, tetapi juga hubungan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Sehingga uji signifikansi dapat dilihat pada tabel total effect karena digunakan untuk melihat efek total prediksi. Pengujian hipotesis pada PLS digunakan untuk mengukur probabilitas sebuah data menggunakan menu Path Coeffisients dan nilai p-value. Pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut :

- a. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} > 1,64$) dan tingkat signifikansi (p- value) $< 0,05$ maka hipotesis diterima
- b. Apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($t_{hitung} < 1,64$) dan tingkat signifikansi (p- value) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

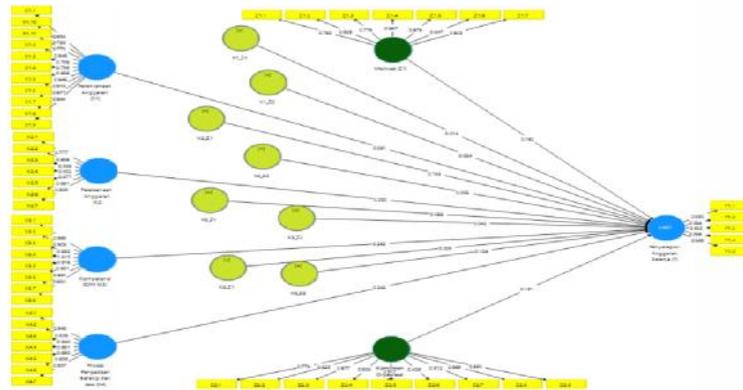
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Kualitas Data (Evaluasi Outer Model)

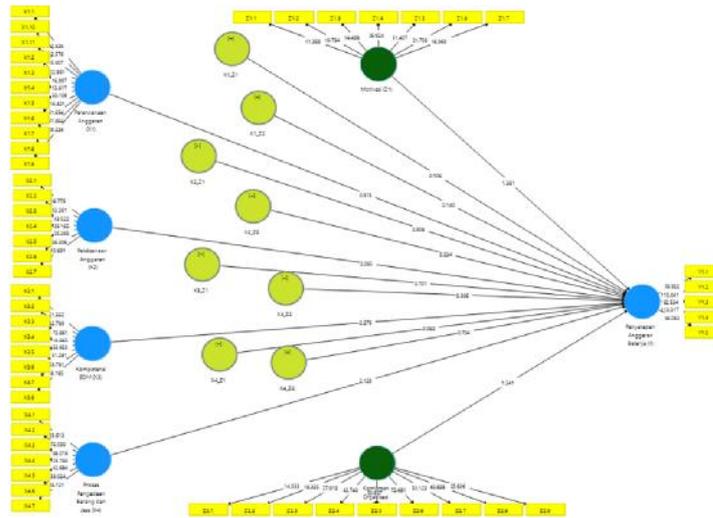
Penelitian ini terdiri dari tujuh konstruk yaitu: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, motivasi dan penyerapan anggaran belanja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS dengan alat bantu software pengolah data Smart-PLS Versi 3.2.8 yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian model pengukuran digunakan untuk menilai validitas konstruk dan reliabilitas instrumen penelitian. Hal ini dikarenakan suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal apabila belum melewati tahap purifikasi model pengukuran. Pengujian outer model terdiri dari pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya indikator yang merepresentasikan variabel laten/konstruk dalam penelitian. Pengujian validitas dalam penelitian ini yakni menguji validitas konstruk atau validitas kuantitatif yang terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan

a. Pengujian Validitas Konvergen

Validitas Konvergen dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan korelasi antara item score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Pada pengujian ini terlihat bahwa nilai loading factor dari indikator telah memenuhi kriteria uji validitas, dikarenakan loading factor pada masing-masing indikator (item pertanyaan) lebih besar dari 0,5. (Ghozali & Latan, 2015:77) menyatakan penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. Hasil loading factor dari masing- masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 First Order Confirmatory Factor Analysis (Loding factor)



Gambar 3 Diagram Jalur Nilai T-Statistik (Bootstrapping)

b. Pengujian Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dinilai dengan cross loading pengukuran dengan konstraknya atau dengan membandingkan akar AVE suatu konstruk dengan korelasi antar konstruk dalam model. Model dinyatakan mempunyai validitas diskriminan yang cukup apabila akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk > korelasi antar konstruk (Ghozali & Latan, 2016). Pemeriksaan dan penilaian terhadap validitas diskriminan untuk dapat diterima jika nilai akar kuadrat AVE-nya lebih besar dari nilai korelasi variabel laten tersebut dengan seluruh variabel laten lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Nilai korelasi setiap variabel laten yang dihasilkan dalam uji model pengukuran dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
 Fornell-Lacker untuk Validitas Diskriminan

	KO	KSDM	M	PLA	PAB	PA	PPBJ
KO	0,866						
KSDM	0,400	0,899					
M	0,410	0,650	0,886				
PLA	0,142	0,191	0,351	0,883			
PAB	0,512	0,526	0,513	0,432	0,940		
PA	0,437	0,420	0,488	0,379	0,516	0,851	
PPBJ	0,243	0,153	0,182	0,322	0,430	0,580	0,895

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE dan nilai korelasi suatu variabel (konstruk) laten dengan konstruk lainnya menunjukkan nilai yang lebih besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan validitas diskriminan melalui kriteria fornell – lacker untuk konstruk laten secara keseluruhan memiliki nilai validitas diskriminan yang valid

c. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam SEM-PLS dapat dilakukan dengan menggunakan nilai composite reliability > nilai 0,7 dan menggunakan nilai Cronbach’s alpha > nilai 0.6 (Ghozali & Latan, 2015:77). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6
 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Hasil
Perencanaan Anggaran	0,962	0,967	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran	0,952	0,961	Reliabel

Kompetensi SDM	0,966	0,971	Reliabel
Proses Pengadaan Barang & Jasa	0,959	0,966	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,945	0,955	Reliabel
Motivasi	0,965	0,970	Reliabel
Penyerapan anggaran belanja	0,967	0,974	Reliabel

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil pengujian reliabilitas konstruk sebagaimana disajikan pada tabel 6 menunjukkan nilai Composite Reliability dan Cronbachs Alpha dari semua variabel laten > 0,70. Sehingga semua variabel manifest dalam mengukur variabel laten dalam model yang diestimasi dinyatakan reliabel. Dengan demikian pengujian model struktural (inner model) dapat dilanjutkan

Pengujian Persyaratan Analisis Data (Evaluasi Inner Model)

Dalam tahap evaluasi model struktural (inner model) memiliki tujuan untuk dapat memprediksi hubungan antar konstruk laten. Hasil pengujian pada model struktural dapat digunakan untuk melihat apakah data empiris pada penelitian mendukung hubungan dari pengembangan hipotesis yang dibuat

a. Variansi Konstruk Endogen pada Nilai R-Square Adjusted

Dalam melihat kekuatan prediksi dari model struktural dapat menggunakan nilai R2 Adjusted dari setiap konstruk endogen (Ghozali & Latan, 2015). Nilai dari R2 Adjusted (0,75), (0,50) dan (0,25) dapat diinterpretasikan bahwa model yang dibentuk (kuat), (moderat) dan (lemah) terhadap jumlah varian dari konstruk yang dapat dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan, 2015), sehingga dapat digunakan untuk mengukur variansi perubahan keempat konstruk eksogen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa terhadap konstruk endogen yaitu penyerapan anggaran belanja. Artinya, bahwa variansi perubahan konstruk endogen (koefisien determinasi) yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Evaluasi Model Struktural

Variabel (Konstruk) Endogen	R Square Adjusted	Keterangan
Penyerapan anggaran belanja	0,638	Moderat

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R Square penyerapan anggaran belanja sebesar 0,638 tergolong moderat, hasil tersebut menjelaskan bahwa 63,8% penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini

b. Predictive Relevance (Q2)

Statistik Q-square digunakan untuk mengukur kualitas model jalur PLS. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan (Ghozali & Lathan, 2016). Rumus untuk menghitung Q-square adalah sebagai berikut:

$$Q2 = 1 - (1 - R12)$$

$$Q2 = 1 - (1 - 0,676) = 0,676$$

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai Q-square sebesar 0,676 yang memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka dalam penelitian ini model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan.

c. Overall Fit Index (GoF)

Kriteria evaluasi overall fit index terhadap keseluruhan model yang diperoleh dari average communalities index dikalikan dengan R2 model. Nilai GoF terbentang antara 1-0 dengan interpretasi terhadap nilai ini adalah 0,1 (GoF Kecil), 0,25 (GoF Moderat), dan 0,36 (GoF Besar), yang mana formula dari GoF Index yaitu:

$$\text{GoF} = \text{Communalities} \times R^2$$

Tabel 8
Overall Model Fit

Variabel	(AVE)	R Square
Percencanaan Anggaran	0,725	0,676
Pelaksanaan Anggaran	0,780	-
Kompetensi SDM	0,808	-
Proses Pengadaan Barang & Jasa	0,802	-
Komitmen Organisasi	0,751	-
Motivasi	0,785	-
Penyerapan anggaran belanja	0,884	-
Rata-rata	0,790	0,676
Nilai GoF		0,731
Kesimpulan	Nilai GoF besar (Model Fit)	

Sumber : Data diolah (2022)

Dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa kesesuaian model secara keseluruhan memperlihatkan nilai sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibentuk dalam penelitian ini secara keseluruhan memiliki kekuatan prediksi yang kuat atau dengan kata lain bahwa model memenuhi kriteria goodness of fit

d. Pengujian Pengaruh Langsung

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka dapat dibuat persamaan model struktural berdasarkan hasil pengujian statistik yang disajikan pada tabel 9 :

Tabel 9
Hasil Pengujian Pengaruh Langsung

Konstruk	Path Coefficients	T Statistic	P values	Keterangan
PA – PAB	0.197	1,737	0,041	Signifikan
PLA – PAB	0.155	1,665	0,048	Signifikan
KSDM – PAB	0.286	3,080	0,001	Signifikan
PPIJ – PAB	0.173	1,797	0,036	Signifikan

Sumber : Data diolah (2022)

e. Pengujian Pengaruh Moderasi

Efek moderasi dilakukan untuk variabel moderator pengendalian internal berbentuk metrik laten, menggunakan analisis efek interaksi antara variabel eksogen dengan variabel moderator dalam mempengaruhi variabel endogen, yaitu variabel moderator dengan tipe indikator reflektif melalui pendekatan product indicator approach. Berikut ini hasil total efek dari uji pengaruh langsung yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Pengujian Efek Moderasi

Konstruk	Path Coefficients	T Statistic	P values	Keterangan
KO*PA → Penyerapan Anggaran Belanja	0,198	2,282	0,011	Signifikan
KO*PLA → Penyerapan anggaran belanja	0,130	2,179	0,015	Signifikan
KO*KS → Penyerapan anggaran belanja	0,027	0,433	0,333	Tidak Signifikan
KO*PIJ → Penyerapan Anggaran Belanja	0,173	2,266	0,012	Signifikan
M*PA → Penyerapan anggaran belanja	0,314	2,778	0,003	Signifikan
M*PLA → Penyerapan anggaran belanja	-0,043	0,593	0,277	Tidak Signifikan
M*KSDM → Penyerapan anggaran belanja	0,156	1,713	0,043	Signifikan

Sumber : Data diolah (2022)

Pengujian Hipotesis

Tabel 9 dan 10 dapat diketahui hasil pengujian hipotesis yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 8 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,197 signifikan pada t-statistic 1,737 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,041 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja
- b. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 8 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,155 signifikan pada t-statistic 1,665 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,048 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja
- c. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 9 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,286 signifikan pada t-statistic 3,080 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,001 serta tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja.
- d. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 9 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,173 signifikan pada t-statistic 1,797 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,036 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja
- e. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 10 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,198 signifikan pada t-statistic 2,282 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,011 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi
- f. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 10 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,130 signifikan pada t-statistic 2,179 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,015 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi
- g. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 10 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,027 signifikan pada t-statistic 0,433 lebih kecil dari t-tabel 1,64 dan pada P-value 0,333 lebih kecil dari tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja dapat ditolak, atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi

- h. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 10 menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,173 signifikan pada t-statistic 2,266 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,012 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi.
- i. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 9 menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,314 signifikan pada t-statistic 2,778 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0, Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel motivasi sebagai pemoderasi
- j. Hasil pengujian yang ditampilkan pada pada tabel 10 menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,043 signifikan pada t-statistic 0,593 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,277 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dapat ditolak, atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel motivasi sebagai variabel pemoderasi
- k. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,156 signifikan pada t-statistic 1,713 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,043 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel motivasi sebagai variabel pemoderasi
- l. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,169 signifikan pada t-statistic 1,819 lebih besar dari t- tabel 1,64 dan pada P-value 0,035 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan dari proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja dengan variabel motivasi sebagai variabel pemoderasi

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 1 menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan penyerapan anggaran belanja OPD dibutuhkan perencanaan anggaran yang baik. Semakin baik kualitas perencanaan anggaran maka kecenderungan penyerapan anggaran belanja akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit namun dapat dicapai akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tujuan yang mudah dan kurang spesifik. Perencanaan anggaran yang baik akan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang berkualitas, karena DPA merupakan hasil dari perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Pemerintah daerah melalui OPD dalam perencanaan anggaran harus dapat menyusun program strategis dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD. Program dan kegiatan yang disusun dengan baik oleh OPD tentu akan memberi pengaruh terhadap besarnya penyerapan anggaran belanja OPD

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja



Hipotesis ke 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh secara positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan Hipotesis ke 2 diterima. Semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini juga mendukung teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa seseorang yang diberikan tujuan yang spesifik dan sulit namun dapat dicapai akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan anggaran yang konsisten dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 3 yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. Hasil pengujian pengaruh utama menunjukkan Hipotesis ke 3 diterima. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia (pengelola anggaran) maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini juga mendukung teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa seseorang yang diberikan tujuan yang spesifik dan sulit namun dapat dicapai akan mempunyai kinerja yang lebih baik dan berusaha meningkatkan kompetensi dirinya

4. Pengaruh Proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 4 yang menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian pengaruh utama menunjukkan Hipotesis ke 4 diterima. Semakin baik proses pengadaan barang dan jasa maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran belanja. Penyerapan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pada umumnya sangat lambat untuk direalisasikan serta sering menumpuk pada akhir tahun. Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama, hal tersebut disebabkan karena hal teknis yang harus dijalankan serta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan undang – undang. Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa seseorang yang diberikan tujuan yang spesifik dan sulit namun dapat dicapai akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Adanya tujuan akan meningkatkan ketekunan individu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat membantu dalam melakukan tindakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

5. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 5 menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian moderasi menunjukkan nilai p value dan koefisien jalur memenuhi syarat yang ditentukan sehingga Hipotesis diterima. Artinya, pengelola anggaran percaya bahwa ketika komitmen organisasi ditingkatkan maka pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja OPD juga akan semakin meningkat. Adanya penetapan sasaran ataupun tujuan yang tertuang dalam perencanaan anggaran OPD dengan didukung komitmen organisasi yang tinggi.

6. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Hipotesis ke 6 menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian moderasi menunjukkan nilai p value dan koefisien jalur memenuhi syarat yang ditentukan sehingga Hipotesis ke 6 diterima. Artinya, pengelola anggaran percaya bahwa ketika komitmen organisasi ditingkatkan maka pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja OPD juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung teori kontingensi dalam konteks penyerapan anggaran belanja OPD. Komitmen organisasi sebagai variabel kontingensi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja OPD. Semakin baik komitmen individu terhadap organisasi didukung pelaksanaan anggaran yang baik maka akan mampu meningkatkan penyerapan anggaran belanja OPD

7. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat keyakinan sejauh mana pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat ditandai dengan menerima tujuan dan nilai organisasi dan melakukan upaya untuk kepentingan organisasi. Hipotesis ke 7 menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian menunjukkan nilai p value dan koefisien jalur tidak memenuhi syarat yang ditentukan sehingga Hipotesis ditolak. Artinya, komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan tingkat penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja OPD kemungkinan disebabkan kondisi di instansi pemerintahan yang cenderung birokratis mengharuskan pagu serapan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD harus tetap dilaksanakan meskipun instansi tersebut tidak memiliki kesiapan baik dari sumber daya yang dimiliki atau komitmen organisasi yang dapat mendukung tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari penempatan sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan daerah seringkali tidak sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai. Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pegawai – pegawai dengan pengetahuan mengenai manajemen keuangan sektor publik, namun seringkali pegawai dengan latar belakang yang berbeda mengisi posisi sebagai pengelola keuangan daerah

8. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat keyakinan sejauh mana pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat ditandai dengan menerima tujuan dan nilai organisasi dan melakukan upaya untuk kepentingan organisasi. Hipotesis ke 8 menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian menunjukkan nilai p value dan koefisien jalur memenuhi syarat yang ditentukan sehingga Hipotesis ke 8 diterima. Artinya komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja.

9. Motivasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan anggaran haruslah memiliki motivasi yang tinggi sehingga mampu memberi ide-ide dalam perencanaan anggaran dan menghasilkan inovasi program dan atau kegiatan yang mampu dijalankan oleh satuan kerja. Dengan motivasi yang tinggi maka hasil dari perencanaan anggaran akan semakin baik sehingga mengurangi adanya revisi anggaran satuan kerja. Hipotesis ke 9 yang menyatakan motivasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis ke 9 diterima. Hal ini berarti motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.

10. Motivasi Memoderasi Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan perencanaan strategik serta melibatkan pegawai dalam pelaksanaannya serta bertanggungjawab untuk keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan anggaran. Hipotesis ke 10 yang menyatakan motivasi dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis ke 10 ditolak. Hal ini berarti motivasi tidak dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil dari penelitian ini tidak

mendukung teori kontingensi dalam konteks penyerapan anggaran belanja OPD. Motivasi dapat mempengaruhi sifat dan perilaku individu, dengan motivasi tinggi individu akan memiliki rasa tanggungjawab atas pekerjaan. Namun tingkatan motivasi setiap individu diperkirakan berbeda pada setiap pola pikir individu. Pengelola anggaran yang memiliki motivasi berprestasi cenderung menyukai tantangan yang sulit dan menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang sulit, menyukai persaingan dan kemenangan serta cenderung mempengaruhi orang lain dalam setiap kegiatan termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan konflik tujuan, apabila terjadi peningkatan konflik kerja, akan menimbulkan penurunan motivasi kerja pegawai

11. Motivasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 11 menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran yang dimoderasi oleh motivasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis ke 11 diterima. Hal ini berarti bahwa motivasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja. Motivasi memiliki peran penting dalam prestasi individu dikarenakan dengan motivasi setiap individu pegawai mau bekerja keras dan memiliki antusiasme yang besar guna mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Setiap organisasi selain mengharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik, namun yang lebih penting adalah mereka mau bekerja keras dan memiliki keinginan terhadap pencapaian kinerja yang optimal. Motivasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang mampu untuk bekerja. Sumber daya manusia yang berkompeten tanpa didukung motivasi yang tinggi akan menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada hanya akan memiliki kualitas yang baik namun kurang termotivasi dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan. Kesesuaian antara kompetensi sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dan motivasi kerja dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yang pada akhirnya berimplikasi pada penyerapan anggaran belanja

12. Motivasi Memoderasi Pengaruh Proses Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ke 12 menyatakan bahwa motivasi dapat memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis ke 12 diterima. Hal ini berarti bahwa motivasi memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini juga mendukung teori kontingensi dalam konteks penyerapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah. Motivasi sebagai variabel kontingensi mampu memoderasi pengaruh proses pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja OPD. Motivasi memiliki peran penting dalam prestasi individu dikarenakan dengan motivasi setiap individu pegawai mau bekerja keras dan memiliki antusiasme yang besar guna mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi akan mendorong pegawai untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada keinginan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik sehingga anggaran belanja dapat terealisasi dengan optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja, serta motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada OPD Kota Pematang Siantar, sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi OPD yang ada

pada Kota Pematang Siantar, dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan di OPD Kabupaten lain. Lingkup penelitian ini terbatas pada beberapa variabel tertentu saja sehingga masih dimungkinkan untuk mencari variabel – variabel lain yang berhubungan dengan penyerapan anggaran belanja OPD, sehingga kajian mengenai penyerapan anggaran semakin komprehensif.

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi praktik pada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pematang Siantar, yakni bukti empiris bahwa penyerapan anggaran OPD Pemerintah Kota Pematang Siantar dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan juga proses pengadaan barang dan jasa, serta peran moderasi komitmen organisasi dan motivasi, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah tentang pentingnya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan juga proses pengadaan barang dan jasa serta pentingnya komitmen organisasi dan motivasi para pengelola anggaran. Pemerintah daerah dapat memberi perhatian lebih pada perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa OPD serta manajemen sumber daya manusia dengan kriteria penempatan pengelola keuangan daerah harus menempatkan pegawai yang mempunyai latar belakang yang memahami proses pengelolaan anggaran/keuangan daerah serta memberikan pelatihan – pelatihan terkait pengelolaan anggaran kepada para pegawai sehingga pengelolaan anggaran menjadi semakin baik lagi. Partisipasi pengelola anggaran pada proses penyusunan anggaran diperlukan untuk meningkatkan komitmen individu pengelola anggaran terhadap organisasinya, serta penerapan reward dan punishment diperlukan dalam meningkatkan motivasi para pengelola anggaran dalam melakukan kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A., Agusdin, A., & Irtianna, E. (2017). Effect of Budgeting, Competence of Human Resources, Organizational Commitment, Drug Procurement Process and Regulations on Budget Funds Absorptioncapitation National Health Insurance Program on Health Center in Central Lombok. *E- Proceeding Stie Mandala*.
- Abdurohman, M., & Marsus, S. (2017). Factor Analysis for Slow Budget Realization. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 3(1), 28-50. DOI: <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.31.2002>
- Adhika, V. N. M., Gede, W. M., Dwija, P. I. A., & Dharma, S. I. (2018). The Effect Of Information Technology Usage On The Relationship Between Budget Planning, Human Resources Competency And Budgetary Implementation At State University In Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 79(7). DOI: <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-07.20>
- Adrianto, Y. (2008). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Job Relevan Information sebagai Variabel Moderating. Thesis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Akram, A., Agusdin, A., & Irtianna, E. (2017). Effect of Budgeting, Competence of Human Resources, Organizational Commitment, Drug Procurement Process and Regulations on Budget Funds Absorptioncapitation National Health Insurance Program on Health Center in Central Lombok. E- proceeding stie mandala. DOI: <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/e proceeding/article/view/132/117>
- Al-Musadieq, M., Nurjannah, N., Raharjo, K., Solimun, S., & Achmad Rinaldo Fernandes, A. (2018). The mediating effect of work motivation on the influence of job design and organizational culture against HR performance. *Journal of Management Development*, 37(6), 452–469. <https://doi.org/10.1108/JMD-07-2017-0239>
- Alam, A. B. M. M., & Alam, M. (2022). Decentralization, resource splitting and budgetary process: an empirical study. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(1),

- 67–95. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0017>
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x>
- Alumbida, D. I., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2016). PENGARUH PERENCANAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.32400/ja.14431.5.2.2016.141-151>
- Andriyani, T., & Putri, I. G. A. D. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1316-1342. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p18>
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor - Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/doi.org/10.30996/dia.v14i01.1014>
- Arif, E., & Halim, A. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 41–61.
- Arthana, I. M., Mimba, N. P. S. H., & Wirakusuma, M. G. (2016). KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI PADA KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (Studi pada Satuan Kerja di Lingkup Pembayaran KPPN Denpasar). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.5, 5(5), 1143–1170.
- Asmara, A., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). The Influence of Perception of Budget Planning And Budget Implementation on Budget Performance Through Application of Budget Expenditure in Public Health Department Bondowoso District. *International Journal Of Research Science & Management*, 5(8), 88–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1401352>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Cut Malahayati, I. H. B. (2015). PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1), 11. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451>
- Dahana, M. A., & Ermwati, . (2020). Analysis of The Budget Planning Process and Budget Execution Process. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.426>
- Dewi, C. M., & Irianto, G. (2016). The Effect of Budgetary Participation on The Performance of Officials With Locus of Control, Job Satisfaction, and Relevant Job Information as Mediating Variables: An Empirical Study at Regional Work Unit (SKPD) in Palu. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 19(1), 37-48. DOI: <http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v19i1.536>
- Dewi, N. L. P. L., Dwirandra, A. A. N. B., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan anggaran dan Kompetensi SDM pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 4, 1609-1638. DOI: <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i02>
- Eliyana, A., & Ma'arif, S. (2019). Job Satisfaction and Organizational Commitment Effect in The Transformational Leadership Towards Employee Performance. *European Research on*

- Management and Business Economics, 25(3), 144-150. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2019.05.001>
- Fajar, S., & Santoso, D. (2010). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Studi di Satuan Kerja Mapolda Jawa Tengah Semarang). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 20-44. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v7i1.521>
- Fitriany, N., Masdjojo, G. N., & Suwarti, T. (2015). Exploring The Factors that Impact The Accumulation of Budget Absorption in The End of The Fiscal Year 2013: A Case Study in Pekalongan City of Central Java Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 7(3), 2289–1560. Retrieved from http://seajbel.com/wp-content/uploads/2015/09/KLIBEL7_Econ-24.pdf
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Galleli, B., & Hourneaux Junior, F. (2021). Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil. *Benchmarking*, 28(9), 2835–2864. <https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2017-0209>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Lest Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Handayani, C. H., Muda, I. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. *Jurnal SNA. Universitas Sumatera Utara*.
- Handayati, P., & Safitri, B. P. A. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kota Batu. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(01), 1-19. DOI: <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i01.82>
- Haque, A., Fernando, M., & Caputi, P. (2020). How is responsible leadership related to the three-component model of organisational commitment? *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(5), 1137–1161. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2019-0486>
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i1.3402>
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*.
- Heriberta, H., Tasman, A., & Yanilia, Y. (2018). Analysis of budget spending and its affect on Jambi Government performance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 244–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v5i4.5118>
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Lembaga/Kementrian di Wilayah Jakarta*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Huynh, T. N., & Hua, N. T. A. (2020). The relationship between task-oriented leadership style, psychological capital, job satisfaction and organizational commitment: evidence from Vietnamese small and medium-sized enterprises. *Journal of Advances in Management Research*, 17(4), 583–604. <https://doi.org/10.1108/JAMR-03-2020-0036>
- Idris, M. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, dan Motivasi

- Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perusahaan Developer di Makasar). Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang
- Imamoglu, S. Z., Ince, H., Turkcan, H., & Atakay, B. (2019). The Effect of Organizational Justice and Organizational Commitment on Knowledge Sharing and Firm Performance. *Procedia Computer Science*, 158, 899–906. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.129>
- Immanuel Laka, E., Sukartha, I. M., & Wirama, D. G. (2017). PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PADA PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4167. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p05>
- Iqbal, M. (2018). Pengaruh Perencanaan anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Tesis. Universitas Hasanuddin
- Jehanzeb, K. (2020). Does perceived organizational support and employee development influence organizational citizenship behavior?: Person–organization fit as moderator. *European Journal of Training and Development*, 44(6–7), 637–657. <https://doi.org/10.1108/EJTD-02-2020-0032>
- Joo, B. K., & Lim, T. (2009). The effects of organizational learning culture, perceived job complexity, and proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 16(1), 48–60. <https://doi.org/10.1177/1548051809334195>
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KONTEKSTUAL TERHADAP PERSEPSIAN PENYERAPAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>
- Jumarny, J. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Kejelasan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada IAIN Ambon). *Soso-Q: Jurnal Manajemen*, 7(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30598/sosoq.v7i2.997>
- Karokaro, N. B. P. B. (2018). Analysis of The Influence of The Quality of Human Resources, Planning, and Budget Implementation on Budget Absorption at The SKPD of The North Sumatera Provincial Administration With The Use of Information Technology as Moderating Variable. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 1(1). Retrieved from <http://ijpbaf.org/index.php/ijpbaf/article/view/14>
- Koriatmaja, S. A. H., & Surasni, N. K. (2020). The Effect of Budget, Budget Execution, Procurement Goods/Services and Human Resources on Absorption Budget (Study at OPD in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia). *Global Journal of Management and Business Research*, 20(1). Retrieved from <https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/3008>
- Kreitner, Robert., & Angelo Kinicki. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Salemba Empat.
- Kung, F. H., Huang, C. L., & Cheng, C. L. (2013). An examination of the relationships among budget emphasis, budget planning models and performance. *Management Decision*, 51(1), 120–140. <https://doi.org/10.1108/00251741311291346>
- Kuswoyo, Iwan Dwi. (2011). Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja di akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- Kwarteng, A. (2018). The impact of budgetary planning on resource allocation: evidence from a developing country. *African Journal of Economic and Management Studies*, 9(1), 88–100. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2017-0056>

- Lane, J. E. (2003). *Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework*.
- Latifah, N. . (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *Fokus Ekonomi*, 5(2), 85–94.
- Lau, C. M., Scully, G., & Lee, A. (2018). The effects of organizational politics on employee motivations to participate in target setting and employee budgetary participation. *Journal of Business Research*, 90, 247–259. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.002>
- Lupia, A., & McCubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research*, 37(3), 291–307. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514>
- Maman, A., & Soffan, M. (2017). Factor Analysis for Slow Budget Realization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT*, 3(1), 28–50. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.31.2002>
- Mangkunegara.A.A Anwar Prabu. (2005). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
- Malahayati, C., Islahuddin., & Basri H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4(1),11-19. DOI: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451>
- Malhotra, N. dan Mukherjee, A. (2014). The RelativeInfluence of Organizational Commitment and JobSatisfaction on Service Quality of CustomerContact Employees in Banking Call Centres,*Journal of Service Marketing*, 18(3), 162-174. DOI: <https://doi.org/10.1108/08876040410536477>
- Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik FEUI*.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(79\)90072-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1)
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksun, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20), 5552–5561.
- Nasikhin, M. A., & Danila, N. (2018). The Impact of Knowledge Management on Work Performance through the Employees’ Competence: A Case Study of “MP” Bank. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(3). <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i3.1135>
- Nazaruddin, I., & Setyawan, H. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 197–207. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/684%5C>
- Ninik, H (2017). Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Pada OPD Pemerintah Kota Malang). Tesis. Universitas Brawijaya, Malang
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 22–37. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i1.23>

- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The case of a structural model approach). *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 21(2), 117-131. DOI: <https://doi.org/10.22146/jkap.23080>
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KUALITAS ANGGARAN SKPD (Suatu Pengujian Struktural). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3621>
- Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413–428. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(80\)90040-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90040-9)
- Otoo, F. N. K., & Mishra, M. (2018). Influence of human resource development (HRD) practices on hotel industry's performance: The role of employee competencies. *European Journal of Training and Development*, 42(7–8), 435–454. <https://doi.org/10.1108/EJTD-12-2017-0113>
- Ouakouak, M. L., Zaitouni, M. G., & Arya, B. (2020). Ethical leadership, emotional leadership, and quitting intentions in public organizations: Does employee motivation play a role? *Leadership and Organization Development Journal*, 41(2), 257–279. <https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2019-0206>
- Priatno, P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–16.
- Pribadi, L. D., Kanto, D. S., & Kisman, Z. (2020). Budget Absorption Performance in Financial Education and Training Agency. *Journal of Economics and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.02.231>
- Puji Handayati, & Brilian Prastiti Andri Safitri. (2020). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAH KOTA BATU. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i01.82>
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Purtanto. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa. (Studi atas Persepsi Pada Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Tegal)*. Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Putri, Y., & Novita. (2020). Pengaruh Partisipasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 176-196. DOI: <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.55>
- Rafi, M., Ahmad, K., Bin Naeem, S., & Jianming, Z. (2020). Budget harmonization and challenges: understanding the competence of professionals in the budget process for structural and policy reforms in public libraries. *Performance Measurement and Metrics*, 21(2), 65–79. <https://doi.org/10.1108/PMM-09-2019-0048>
- Rahim, A., & Saputra, H. (2018). Exploratory Factor Analysis (EFA) Pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 236–254. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.72>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan

- Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing"Goodwill"*, 8(2), 192-202. DOI: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Rifai, A., Inapty, B. A., & M, R. S. P. (2016). KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Rivito, A., & Mulyani, S. (2019). The Effect of Budget Participation on Local Government Performance with Organizational Commitment as Moderating Variable. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 13.
- Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2017). Perilaku Organisasi (Organizational Behavior). In *Salemba Empat* (Vol. 16).
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 45–52. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Saleh, C., Islamy, Zauhar, dan Supriyono. (2013). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Malang, Indonesia: UB Press
- Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(2), 67–73. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8970>
- Sari, L. G. E., Yuesti, A., Sudja, I. N., & Kepramareni, P. (2019). Analysis of Budget Planning, Competence of Human Resources and Implementation of the VIII Lldikti Region Budget with Organizational Commitment as A Moderation. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 10(2), 21273–21288. <https://doi.org/10.15520/ijcrr.v10i02.655>
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satuan kerja Wilayah KPPN Malang. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.232>
- Setiawan, A. (2016). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (Vol. 9). Retrieved from <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Setiyono, N. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Lingkup Pembayaran KPPN Bojonegoro)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020). DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI MODERATING VARIABLE. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 147. <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2690>
- Silvianita, A., & Anjani, F. (2016). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan

- Motivasi Sebagai Variabel Moderator di PT. Telekomunikasi Indonesia Regional III Area Witel Bandung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 175-184 DOI: <https://doi.org/10.31843/jmbi.v3i2.78>
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sudarmanto. (2019). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandani, Y., & Istikhroh, S. (2016). Participatory Budgeting Role in Improving the Performance of Managerial Head of Department East Java. *Review of European Studies*, 8(4), 148. <https://doi.org/10.5539/res.v8n4p148>
- Sulaeman, A. S., Hamzah, A. P., & Priyanto, R. (2012). Penyerapan Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal BPPK*, 4, 18–37.
- Tapatfeto, J. D. (2014). Analisis Komitmen Tujuan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 495-507. DOI: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7212>
- Taufik, T., & Kemala, D. (2013). Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. *Pekbis Jurnal*, 5(1), 51– 63. DOI: <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/1481>
- Testa, M.R. (2011). Organizational commitment, jobsatisfaction, and effort in the serviceenvironment, *Journal of Psychology*, 135,(2), 226-236. DOI: <https://doi.org/10.1080/00223980109603693>
- Usman, E., & Paranoan, S. (2014). Anggaran Partisipatif dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 127-135. DOI: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7187>
- Wadi, M. I., Herawati, R. T., & Husnan, L. H. (2017). Causes of delays in budget absorption as the development of good governance on deconcentration and co-administration task budget (A case study at the work unit of DKP-NTB Province). *The Indonesian Accounting Review*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.14414/tiar.v6i2.1106>
- Wentzel, K. (2002). The Influence of Fairness Perceptions and Goal Commitment on Managers' Performance in a Budget Setting. *Behavioral Research in Accounting*, 14(1), 247–271. <https://doi.org/10.2308/bria.2002.14.1.247>
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2016). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi, Motivasi dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150-166. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v20i1.81>
- Wong-On-Wing, B., Guo, L., & Lui, G. (2010). Intrinsic and extrinsic motivation and participation in budgeting: Antecedents and consequences. *Behavioral Research in Accounting*, 22(2), 133–153. <https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.2.133>
- Yumiati, F., & Islahuddin, N. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPD Di Pemerintah Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4), 43–49.
- Yunarto, I. (2011). Memahami Proses Penganggaran Untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. *Paris Review Jurnal BPPK*.
- Zainuddin, S., & Isa, C. R. (2011). The role of procedural fairness in the relationship between budget participation and motivation. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 1464–

1473.

Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Perencanaan Anggaran. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.